TGL 24-01-2023
NO. INVEN 18/B/B/N/FP/2023
JENIS Buku Hasil Penelitian
PARAF

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Buku : **Pengembangan Jasa Ekowisata Berkelanjutan: Strategi Mengelak Kutukan Sumberdaya Alam**

Penulis : **Samsul Bakri**, Abdul Firman Ashaf, Dikpride Despa, Siti Herawati Sitorus, Mia Putri Utami, Adella Putri Apriliani

Jurusan : Kehutanan

Fakultas : Pertanian

ISBN : 978-623-418-143-2

Jumlah Halaman : 122

Cetaka ke : Satu (Pertama)

Penerbit : Pusaka Media
Anggota IKAPI No.008/LPU/2020

Mengetahui:
Ketua Jurusan Kehutanan

Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si.
NIP 19740222003121001

Bandar Lampung, 16 Januari 2023
Penulis,

Dr. Ir. Samsul Bakri, 2022
NIP 196105051987032001

Menyetujui:

Dekan Fakultas Pertanian Unila

Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.
NIP 196102019860310002

a.n. Ketua LPPM Unila
Sekretaris,

Rudy, S.H., LLM., LLD
NIP 198101042003121001

PENGEMBANGAN JASA EKOWISATA BERKELANJUTAN

STRATEGI MENGELAK KUTUKAN SUMBERDAYA ALAM

PUSAKA MEDIA
penerbit pusaka
pusakamedia@gmail.com
@pusaka_media

ISBN 978-623-418-143-2

PENGEMBANGAN JASA EKOWISATA BERKELANJUTAN
STRATEGI MENGELAK KUTUKAN SUMBERDAYA ALAM
Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si., dkk.

Editor
Prof. Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P.
Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono, M.S.

PENGEMBANGAN JASA EKOWISATA BERKELANJUTAN

STRATEGI MENGELAK KUTUKAN SUMBERDAYA ALAM

Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.
Dr. Abdul Firman Ashaf, S.IP., M.Si.
Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T. IPM, ASEAN Eng
Siti Herawati Sitorus, S.Hut.
Mia Putri Utami, S.T.
Adella Putri Apriliani, S.Hut.

(Cover; Sumber:https://en.wikipedia.org/wiki/Subak_(irrigation)#/media/File:Jatiluwih_rice_terraces.jpg)

PENGEMBANGAN JASA EKOWISATA BERKELANJUTAN

STRATEGI MENGELAK KUTUKAN SUMBERDAYA ALAM

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta
Pasal 1
Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan Pidana Pasal 113
(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PENGEMBANGAN JASA EKOWISATA BERKELANJUTAN

STRATEGI MENGELAK KUTUKAN SUMBERDAYA ALAM

Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.
Dr. Abdul Firman Ashaf, SIP., M.Si.
Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T. IPM, ASEAN
Siti Hermawati Sitorus, S.Hut.
Mia Putri Utami, S.T.
Adella Putri Apriliani, S.Hut.

PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

PENGEMBANGAN JASA EKOWISATA BERKELANJUTAN: STRATEGI MENGELAK KUTUKAN SUMBERDAYA ALAM

Penulis:
Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.,
Dr. Abdul Firman Ashaf, S.I.P., M.Si.
Dr. Eng. Ir Dikpride Despa, S.T., M.T. IPM, ASEAN Eng
Siti Herawati Sitorus, S.Hut.
Mia Putri Utami, S.T.
Adella Putri Apriliani, S.Hut.

Editor:
Prof. Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P.
Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono, M.S.

Desain Cover & **Layout**
Pusaka Media Design

x + 112 hal : 15.5 x 23 cm
Cetakan, Desember 2022

ISBN: 978-623-418-143-2

Penerbit
PUSAKA MEDIA
Anggota IKAPI
No. 008/LPU/2020

Alamat
Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100
Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung
082282148711
email : cspusakamedia@yahoo.com
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

SANWACANA

Puji syukur wajib kami ucapkan atas selesainya buku ini sesuai dengan target waktu yang telah direncanakan. Buku ini merupakan salah satu hasil penelitian berjudul *Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Preferensi Wisatawan Mancanegara Melalui Pemanfaatan Eksternalitas Positif Sumberdaya Alam dan Lingkungan Wilayah Sekitar: Studi di Kabupaten Pringsewu*, yang dibiaya oleh LPPM Unila melalui skema pendanaan Penelitian Multidisplin menggunakan DIPA BLU Unila Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor Kontrak 684/UN.26.21/PN/2022 tanggal 17 Mei 20022. Selain bersumber dari hasil penelitian tersebut, buku ini juga diperkaya dari sumber-sumber lain (yang diolah menurut pemikiran para penulis) seperti yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka buku ini.

Pada garis besarnya isi buku ini mengajukan bukti-bukti dan argumentasi ilmiah, bahwa jasa lingkungan khususnya jasa ekowisata (*ecoturism*) merupakan produk ekonomi tak benda (*intangeble*) yang dapat didayakagunakan untuk mempercepat pembangunan suatu wilayah dalam rangka untuk mengakselerasi level kesejahteraan penduduknya melalui efek pengganda terhadap bangkitnya berbagai sektor hulu sampai ke hilir. Karena itu dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyusun strategi agar tidak terperangkap atau bisa eksit dari kutukan sumberdaya alam (SDA) atau *natural resource curse* atau *Dutch Desease*) khususnya ketika suatu wilayah berlimpah SDA yang tak terpulihkan (*nonrenewable*) yang diperoleh secara cuma-cuma seperti bahan tambang, mineral, energi fosil, bahkan hutan dan perikanan tangkap. Bagi wilayah yang kahat (*deficiency*) akan jenis-jenis SDA yang *non renewable* tersebut

maka buku ini dapat dijadikan pembalajaran untuk terus menggunakan akal budi agar mampu menstimulasi inovasi ipteks dalam setiap kebijakan yang diputuskan. Karena sejauh ini belum ditemukan penulis lain yang mengajukan kebaruan ide tentang pengembangan jasa ekowisata sebagai strategi untuk mengelak kutukan SDA. Oleh karena itu, buku ini ditulis antara lain untuk tujuan-tujuan tersebut.

Pada kesempatan ini patut kami ucapkan pada semua fihak yang telah membantu terhadap penyelesaian penyusunan buku ini. Secara khusus patut kami ucapkan terima kasih kepada Ketua LPPM Unila berserta jajarannya atas alokasi dana yang diberikan untuk kegiatan ini. Selanjutnya kritik yang konstruktif terhadap isi pesan buku ini akan kami terima dengan senang hati dan kami ambil sebagai masukan untuk revisi kemudaian.

Bandar Lampung 8 Oktober 2022
Penulis

DAFTAR ISI

SANWACANA ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **ix**
DAFTAR GAMBAR ..... **x**
I. PENDAHULUAN **1**
1.1 Kebaruan Ide dan Prospek Penerannya 1
1.2 Urgensi Menetapkan Batasan Diksi tentang Pembangunan 3
1.3 Definisi Pembangunan 4
1.4 Level Pemberdayaan dalam Pembangunan 6
1.5 Transformasi Struktural sebagai Runtun Level Pemberdayaan 10
1.6 Produk Jasa sebagai Puncak Produktivitas Tenaga Kerja .. 11

II. RISALAH TEORI PEMBANGUNAN **13**
2.1 Dialetika Sistem Sosial dalam Proses Pembangunan 13
2.2 Pembangunan Berkelanjutan: Tinjauan Empat Model 16
2.2.1 Model Rostow 17
2.2.2 Model Pembangunan Malthusian dan Club Rome .. 21
2.2.3 Model Ricardo 26
2.2.4 Model Maksimalisasi Utilitas Rumah Tangga 33

III. KEWIRAUSAHAAN SEBAGAI DETERMINAN KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN 39
3.1 Peranan Kewirausahaan dalam Pembangunan Ekonomi 39
3.2 Pengukuran Kinerja Entreprenuership pada Tataran Individu 42
3.3 Pengukuran Kinerja Entrepreneurships pada Tataran Bisnis 43
3.4 Peranan Entrepreneurship dalam Pertumbuhan Ekonomi 46

IV. PROGRAM PEMBANGUNAN PBB DAN PENGEMBANGAN JASA EKOWISATA GLOBAL 50
4.1 Kerjasama PBB untuk Penghapusan Kemiskinan dan Degradasi Lingkungan 50
4.1.1 Peran PBB dalam Penghapusan Kemiskinan 50
4.1.2 Prespektif Development as Freedom 56
4.1.3 Kerjasama PBB untuk Mewujudkan Keberlanjutan Lingkungan 58
4.2 Program SDGs dan Perkembangannya 60
4.2.1 Sustainable Development Goals (SDGs) 60
4.2.2 Program-program SDGs 62
4.2.3 Perkembangannya SDGs di Indonesia 65
4.3 Pengembangan Sektor Wisata dan Ekowisata Global 72
4.3.1 Pengembangan Sektor Wisata 72
4.3.2 Konsep Community Base Tourism 73
4.3.3 Ekowisata Berkelanjutan 77
4.3.4 Ekowisata Global 80

V. PENGEMBANGAN JASA EKOWISATA: SEBAGAI STRATEGI MENGELAK KUTUKAN SDA 83
5.1 Fenomena Kutukan SDA 83
5.2 Beberapa Negara yang Terperangkap Kutukan SDA 86
5.3 Strategi Mengelak Kutukan SDA: Pembelajaran dari Provinsi Bali 88

VI. SIMPULAN DAN SARAN UNTUK MENGELAK KUTUKAN SDA 95
6.1 Simpulan..... 95
6.2 Saran: Penerapan Pengembangan Strategi Mengelak Kutukan SDA..... 96

BIOGRAFI PENULIS 108

DAFTAR TABEL

2.1 Pertumbuhan (%) pendapatan per kapita para pekerja di sektor pertanian dan sektor industri untuk kelompok negara maju versusnegara nerkembang 1960-1990..... 38
5.1 Empat negara yang kaya SDA dan kinerja kewirausahaannya tahun 2019..... 86
5.2 Dampak resource curse dan resiko negatif yang berkaitan dengan energi yang terbarukan 87

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kebaruan Ide dan Prospek Penerapannya

Dalam awal bab ini penting untuk dibahas terlebih dahulu mengenai fokus masalah utama bagi perencanaan pembangunan wilayah agar kesejahteraan masyarakatnya tidak tertinggal sebagaimana yang umum terjadi di berbagai negera berkembang. Seperti dapat dirujuk dalam (Stimson dan Stough, 2008) bahwa sepanjang peradaban, telah sering terjadi paradoks bahwa banyak wilayah atau negara yang kaya sumberdaya alam (SDA) ternyata malah banyak mengalami keterbelakangan, dilanda kemiskinan dan malnutrisi, seperti dapat dirujuk dalam karya Acs dkk (2020) dan Leonard (2021) yaitu Serria Lione, Nauru, Ghana, Nigeria dan beberapa lainnya. Sebaliknya, banyak pula wilayah ataupun negara yang kahat (*shortage*) akan SDA malah makmur dan sejahtera (Stimson dan Stough, 2008; Bakri dkk, 2014) seperti Singapura, Jepang, Korea Selatan dan masih banyak lainnya. Lebih dari satu dasawarsa yang lalu para peneliti ini menunjukkan bahwa adanya kelinpahan SDA di suatu wilayah telah menekan kreativitas maupun karakter kewirausahaan (*entrepenurship*) masayarakat dan telah membuat semakin banyak menggantungkan penghidupannya pada SDA yang ada. Fenomena yang paradoksal tersebut pada umumnya terjadi karena masyarakatnya menghargai terlalu rendah (*undervalued*) terhadap SDA yang melimpah yang dimiliki secara cuma-cuma tanpa banyak jerih payah, tanpa banyak berusaha.

Berkaitan dengan itu, untuk level wilayah Rahma dkk (2021) kemudian melaporkan bahwa, beberapa provinsi dengan sumber daya alam tambang yang melimpah cenderung terperangkap dalam fenomena kutukan SDA (*resource curse*) dibandingkan dengan provinsi yang kahat (*deficiency*) SDA yang bersifat ekstraktif yang *non renewable*. Untuk mengkaji dan mengurai fenomena yang paradoksal ini, maka buku ini ditulis, yang dihadirkan sebagai kebaruan (*novelty*) yang belum pernah ditemukan dalam buku-buku lain yang membahas tentang topik pengembangan jasa wisata khususnya wisata alam (*ecotourism*).

Berbeda karakter dan tuntutannya, bagi wilayah atau negara yang kahat akan SDA, seperti diungkapkan Hayami dan Godo (2006), maka telah pengembangan akal-budi mengkodisikan, membimbing, dan menempa individu dalam masyarakatnya untuk senantiasa berperilaku hemat (*parsimonious*), bersahaja (*frugality*), dan tekun (*industrious*) sehingga selalu menghargai setiap kesempatan yang muncul, menempatkan hak kepemilikan (*property right*) secara baik pula serta memelihara hubungan baik dengan individu atau pun pihak lain. Akumulasi norma-norma semacam itu juga bermuara pada perilaku yang ramah (*hospitality*) dari setiap individu di dalam masyarakatnya. Perilaku ini merupakan prasyarat penting bagi kegiatan perekonomian sektor jasa terutama sekali jasa wisata seperti wisata alam.

Oleh karena strategi untuk mengelak atau pun eksit terhadap situasi perangkap itu pada esensinya merupakan kebaruan yang dimaksudkan dalam buku ini. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, sektor jasa wisata khususnya wisata alam, dapat menjadi pintu yang sangat lebar untuk eksit, yaitu ketika aktivitas pembangunan dirancang untuk pengembangan produk jasa ini. Optimisme ini punya basis rasionalitas yang kuat setidaknya ada 4 alasan seperti dilaporkan oleh Bakri dkk (2022a; dan 2022b) yaitu: (a) keelokan, kenyamanan, keindahan, dan keunikan yang dapat dibangkit oleh kondisi iklim dan keragaman lanskap dari SDA yang dimiliki termasuk hutan, gunung, sungai, danau, dan laut, dan (b) investasi pengembangan jasa ekowisata ini jauh relatif lebih murah dari pada sektor-sektor industri jasa lainnya seperti jasa pendidikan,

jasa keuangan dll, dan (c) ekowisata merupakan produk jasa yang mampu menggerakkan hampir semua sektor perekonomian baik sektor-sektor hulu maupun hilir, dan (d) umumnya obyek-obyek ekowisata tersebar di pelosok wilayah sehingga dapat dirancang sebagai fasilitas penurunan kesenjangan antara desa-kota dalam hal kesejahteraan masyarakatnya.

Sehubungan dengan kepentingan untuk tujuan membentangkan pemahaman secara utuh dan komprehensif terhadap kebaruan ide tersebut maka buku ini disusun secara sistematis ke dalam 6 bab. Bab 1 sebagai pendahuluan untuk melingkupi seluruh gagasan, Bab 2 mebahas Risalaha Teori Pembangunan untuk menghadirkan dasar-dasar pemikiran urgensinya transforasmi corak sistem perekonomian dari sektor agraris ke sektor industri dan jasa-jasa secara berkelanjutan. Bab 3 membahas kewirausahaan sebagai determinan keberlanjutan pembangunan. Bab 4 membahas program pengembangan jasa ekowisata global dan oportunitasnya bagi Indonesia. Bab 5 secara khusus membahas strategi pengembangan jasa ekowisata sebagai strategi untuk mengelak dan eksit perangkap kutukan SDA. Bab 6 disajikan penutup sebagai gagasan prospektif untuk diterapkan dalam pengembangan jasa ekowisata. Dengan susunan seperti itu maka buku ini didedikasikan kepada para pembelajar, baik dari kalangan akademisi ataupun praktisi yang tertarik pada perencanaan pembangunan khususnya jasa ekowisata, pemberdayaan masyarakat, pembangunan perdesaan termasuk pertanian dan kehutanan.

1.2 Urgensi Menetapkan Batasan Diksi tentang Pembangunan

Dalam pembicaran dan diskusi sehari-hari kita sering menggunakan diksi pembangunan, pengembangan, konstruksi, dan *development.* Keempat diksi ini memang saling berkaitan, tetapi sesungguhnya punya perbedaan makna yang signifikan, terutama sekali jika digunakan untuk kajian ataupun diskusi yang bersifat akademik dan saintifik, termasuk dalam penulisan karya ilmiah seperti makalah dalam jurnal ilmiah dan prosiding suatu seminar, buku teks, buku ajar, skripsi, tesis, disertasi maupun karya ilmiah

lainnya. Keempat diksi ini haruslah dibuat batasannya secara jelas (*well defined*) agar tidak bias atau menimbulkan interpretasi lain selain dari yang dimaksudkan oleh para penulis ataupun penuturnya.

Urgensi untuk mengungkapkan pengertian ini menjadi kritis ketika dalam suasana diskusi, yang memerlukan respon dialektika yang serba cepat di antara para pihak yang tergabung dalam diskusi. Jika diksi pembangunan dimaknai secara berbeda dalam suatu situasi diskusi, maka akan mengarahkan pada situasi seperti diungkapkan dengan pemeo "debat kusir". Tentu saja diskusi semacam ini akan berakhir tidak produktif dan mungkin saling menimbulkan salah paham yang sangat berbahaya jika dituangkan untuk menyusun suatu kebijakan yang menyangkut kepentingan publik utamanya dalam menyusun program-program pembangunan, tidak terkecuali pada kebijakan pembangunan ekowisata. Karena itu maka pembahasan dalam buku ini akan dimulai dengan membuat batasan tentang keempat diksi tersebut. Selanjutnya batasan tersebut akan digunakan untuk melakukan analisis penyusunan strategi pembangunan ataupun pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

1.3 Definisi Pembangunan

Dalam Bahasa Inggris baik kata pembangunan maupun kata pengembangan digunakan istilah yang sama yaitu *development*. Dalam Bahasa Indonesia kedua kata tersebut dapat memberikan makna atau konotasi yang berbeda. Kata pembangunan digunakan jika proses tersebut dimulai dari nol. Sedangkan pengembangan merupakan proses yang selanjutnya dari yang sudah dicapai melalui pembangunan. Sementara konstruksi punya makna sebagai proses fisik seperti pengadaan gedung, bangunan, jembatan, saluran irigasi dll. Sayangnya kebanyakan kaum teknokra, tenolog, *policy maker* dll, banyak memaknai pembangunan hanya sebagai konstruksi. Walau pun konstruk memang sering digunakan untuk proses pembangunan, tetapi ini bukan yang terpenting. Kegiatan konstruksi fisik hanya bagian dari proses pembangunan, tetapi bukan yang terpenting.

Banyak sekali definisi tentang diksi pembangunan, paling sedikit mungkin sebanyak buku pembangunan yang pernah diterbitkan. Di antara berbagai definisi itu dalam buku ini dipilih definisi yang dikemukakan oleh Amartiya Sen (1997) yaitu *pembangunan sebagai proses pembebasan individu dari segala bentuk belenggu keterbelakangan.* Interpretasi terhadap definisi ini sangat penting agar pembahasan dalam buku ini dapat mengarahkan pada fenomena sehari-hari selain juga pada implikasi pada pemanfaatannya dalam program-program pembangunan secara kongkret dan menghasilkan indikator terukur.

Dari definisi tersebut fokusnya adalah pada individu. Tetapi ada perbedaan yang cukup tajam tentang pemilihan fokus ini bergantung ideologi yang dianutnya. Para ahli pembangunan yang berideologi sosialis, fokus pembangunan selayaknya bukan pada individu fokusnya, melainkan masyarakat atau kelompok. Alasan yang diutarakan kelompok ini bahwa: (i) manusia adalah makluk sosial, tidak bisa hidup menyendiri, melainkan selalu membentuk kelompok atau komunitas, dan (ii) jika individu fokusnya maka akan mengarah pada tercipta masyarakat kapitalis yang mengarah pada keruntuhan peradaban alias peradaban yang tidak berkesinambungan seperti yang dikhawatirkan oleh Karl Marx tentang nilai lebih (*added value*) yang terus berpolar pada segelintir orang yaitu para kapitalis. Sementara masyarakat jumlahnya banyak dalam keadaan tidak akan mampu membeli produk-produk yang dihasilkan oleh para kapitalis. Artinya sistem perekonomian akan ambruk (*collapes*), para kapitalis akan bangkrut, tidak akan mungkin memproduksi barang dan jasa karena tidak akan ada individu mampu membeli.

Bagi kaum individualis, yang tentu saja mendukung ideologi *liberalism*, sebaliknya proses pembebasan tersebut haruslah berfokus pada individu. Alasan yang diutarakan kaum penganut ideologi ini paling sedikit ada 2 alasan. Pertama, masyarakat merupakan kumpulan dari individu-individu. Ketika tidak ada satu pun individu yang tertinggal atau terbelenggu kesejahteraannya, maka otomatis akan tercipta masyarakat yang sejahtera pula. Alasan ke dua, bahwa pelaku pembangunan sejatinya haruslah individu, di

mana dalam wujud sehari-hari pembangunan haruslah ditunjukkan oleh bukti bahwa setiap individu bekerja, tidak ada yang menganggur, produktif sehingga mampu memberdayakan dirinya sendiri, tidak menjadi beban bagi individu lainnya, bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi individu lainnya.

Selain itu ada 2 frase yang penting untuk diuraikan lebih lanjut dari komponen definisi yang diungkapkan oleh Amartya Sen (Gasper dan Staveren, 2003). tersebut, yaitu belenggu keterbelakangan dan proses pembebasan. Frase belenggu keterbelakangan dapat dipahami sebagai perangkap yang dialami seseorang atau individu yang terjebak (*trapped*) oleh kelemahannya sehingga tidak bisa eksit dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Individu secara umum dikatakan sejahtera jika dapat memenuhi kebutuhannya. Jika tidak, maka individu tersebut dikatakan sebagai individu yang tidak sejahtera alias terbelenggu atau terperangkap oleh keterbelakangan.

1.4 Level Pemberdayaan dalam Pembangunan

Pada dasarnya belenggu dapat terjadi pada setiap level dari 5 level kesejahteraan seperti yang dapat dirujuk pada teori Maslow (Uysal dkk, 2018; dan Gargasz, 2010). Individu manusia dikatakan sejahtera jika mampu memenuhi kebutuhan manusianya. Pada dasarnya teori membagi ke dalam 2 kelompok besar yaitu yang pertama adalah kebutuhan dasar atau kebutuhan fisiologis (*physiological needs*) yang umumnya antarindividu tidak beragam. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan aspiratif yang merupakan kebutuhan psikologis (*psychological needs*) yang umumnya beragam antarindividu. Karena itu kebutuhan psikologi ini dibagi lagi menjadi 4 peringkat yaitu: (a) Pemenuhan kebutuhan rasa aman atau *safety* termasuk dari berbagai bahaya dan bencana, (b) pemenuhan kebutuhan untuk mencintai dan dimiliki, (c) pemenuhan kebutuah rasa percaya diri atau *self esteem* seperti menjadi juara, dan (d) puncaknya aktulaisasi diri atau *self-actualization* seperti rekreasi ke luar angkasa, menjadi pemenang nobel dll. Secara diagramatik hirakhi kebutuhan Maslow ini disajikan Gambar 1.1.

Dalam konteks ini pembebasan individu dalam rangka pembangunan seharusnya juga perlu dirancang ke dalam 5 tahapan tersebut. Pada awalnya, ketika seorang individu berada pada perangkap (*trap*) pada level satu seperti kekurangan pangan, tidak mempunyai sandang yang cukup, bahkan tidak punya rumah, maka haruslah diberdayakan dengan cara membebaskan diri (*escape*) dari perangkap kemiskinan ini. Program-program pembangunan haruslah diutamakan pada individu yang berada kelompok masyarakat ini.

Gambar 1.1. Hirarki Maslow tentang kebutuhan manusia (dimodifikasi dari Uysal dkk, 2018; dan Gargasz; 2010 (http://www.gargasz.info/maslowhierarchy)

Peran pemerintah dalam proses pembebasan itu, sebagai otoritas publik, hendaknya membatasi diri hanya untuk inisiasi, tidak terlibat terlalu dalam agar terjadi *self empowering*, bukan malah menyebabkan kebergantungan pada bantuan-bantuan. Lain halnya jika keadaan individu tersebut sangat akut kemiskinannya sudah sangat renta dan sangat miskin sumberdaya, maka otoritas publik harus menjadi pihak yang bertanggung jawab seluruhnya. Jika level perangkap atau belenggu (*trap*) ini pada level 1 ini dapat diatasi, maka dapat diharapkan diwujudkan individu yang mandiri, tidak menjadi beban individu lain tidak pula menjadi beban pemerintah.

Bahkan dengan kemampuannya dalam *self empowerment* tersebut, individu ini bisa lepas terhadap belenggu level ke 2 yaitu lulus untuk memasuki level kebutuhan *love and belonging*, dan seterusnya. Bukan hanya itu lebih jauh juga diharapkan agar mampu menjadi pelopor dalam menyediakan pekerjaan atau berbagai kesempatan produktif bagi individu lainnya sehingga idealnya secara keseluruhan tidak ada satu individu pun yang terperangkap pada setiap level dari 5 level hirarki Maslow tersebut.

Pemberdayaan, dengan demikian, merupakan praksis pembangunan (*praxis of development process*) sebagaimana yang dimaksudkan dalam proses pembebasan menurut Amartya Sen (1997) tersebut. Dalam konteks ini seharusnya terjadi salah kaprah tentang interpretasi dari kata pembangunan yang menyamakan dengan proses konstruksi fasilitas atau bangunan fisik (*constructing physical capital*) saja. Konstruksi bangunan fisik baru mempunyai makna dalam *supporting development* ketika pembuatan konstruksi fasilitas fisik tersebut dapat menopang terjadinya *self empowerment* secara berkelanjutan, mulai dalam mengatasi perangkap dalam penyediaan kebutuhan dasar (level 1) hingga dapat mencapai level 5 dari Hirarki Maslow tersebut. Jika tidak maka adalah kewajiban pemerintah sebagai otoritas publik untuk mengontrol dan menginisiasi agar terbentuk situasi *self empowering* pada setiap level. Bentuk dari inisiasi yang perlu disediakan pemerintah dapat berupa kebijakan publik yang dapat menstimulasi terjadinya *self empowering* pada level individu, seperti penyediaan fasilitas publik atau infarstruktur dan suprastruktur yang menjadi landasan setiap individu dapat mengembangkan interaksi dengan individu lain utamanya dalam berjejaring membentuk yang menimbulkan berbagai bentuk transaksi yang juga berujung pada *self empowering* juga.

Suprastruktur dalam pengertian ini adalah berbagai bentuk institusi baik itu berupa legal formal, norma umum, dan rekognisi budaya (Peters, 2019). Pemerintah sebagai otoritas publik berkewajiban mengembangkan segala bentuk institusi secara berkesinambungan pula. Suprastruktur bagi Hayami dan Godo (2006) juga disebut sebagai institusi. Institusi adalah segala tata

aturan yang mengikat perilaku individu dalam membangun hubungan dengan individu lainnya. Maraknya hubungan-hubungan ini juga akan berdampak positif pada peningkatan efesiensi proses interaksi dan proses-proses transaksi antarindividu, yang berarti meningkatkan munculnya berbagai kesempatan kerja dan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat, serta pendapatan pemerintah dan berarti pula meningkatnya kinerja pembangunan.

Dalam rangka *empowering* tersebut, bersamaan dengan pengembangan suprastruktur tersebut pemerintah sebagai otoritas publik juga berkewajiban untuk mengembangkan fasilitas atau infrastruktur wilayah, khususnya untuk fasilitas publik yang tidak bisa dikerjakan ataupun tidak menarik individu (*private sector*) untuk melakukan investasi karena tidak bisa mendatangkan keuntungan dan tidak menarik bagi *private* untuk melakukannya. Konstruksi jalan umum, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, saluran drainase dan lain-lain merupakan sederet infrastruktur yang harus dikonstruksi oleh pemerintah dengan menggunakan dana-dana publik (APBN dan APBD yang bersumber dari pajak dan pungutan lainnya) dalam rangka pemberdayaan individu. Demikian juga dengan pengembangan aparatur keamanan dan persenjataannya, penyediaan fasilitas peradilan dan penegak hukumnya, fasilitas sekolahan dan guru-gurunya dll merupakan fasilitas atau infrastruktur yang harus disediakan dan dikonstruksi oleh otoritas publik dalam rangka untuk pemberdayaan.

Namun perlu juga untuk dikemukakan di sini, bahwa demi untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pemberdayaan tersebut adalah pentingnya pemerintah mengalihkan tanggung jawab penyediaan layanan suprastruktur atau fasilitas publik kepada private atau swasta. Penyediaan atau pemberian lisensi notariat atau pejabat pembuat akta tanah merupakan bentuk pemberdayaan dalam pengembangan suprastruktur. Demikian juga misalnya pemberian perizinan penyediaan uji kompetensi profesional *lawyer*, praktek dokter dll. Dalam dunia konstruksi, misalnya penyediaan jalan tol merupakan contoh privatisasi dalam rangka pemberdayaan yang juga merupakan salah satu bentuk pengalihan tanggungjawab pemerintah kepada individu atau private. Pemberian berupa lisensi

sebagai salah pemberdayaan masyarakat transportasi dengan cara menyediakan insentif untuk mengambil keuntungan selama periode tertentu. Karena itu, baik lisensi, konsesi perkebunan, dan kehutanan harus diserahkan kembali kepada pemerintah ketika jangka waktunya telah berakhir.

1.5 Transformasi Struktural sebagai Runtun Level Pemberdayaan

Jika pembangunan dimaknai sebagai upaya untuk melakukan eradikasi keterbelakangan melalui *self empowering*, maka menjadi seakan logis munculnya ungkapan, "berarti ketika setiap keterbelakangan sudah diatasi maka pembangunan tidak diperlukan lagi". Dengan kata lain negara-negara maju seperti di USA, dengan begitu, tidak perlu lagi melaksanakan pembangunan. Jawabannya tentu pembangunan akan akan tetap dan terus diperlukan, artinya pembangunan tidak pernah berhenti sepanjang ada manusia. Perlu untuk dikemukakan di sini, bahwa pemenuhan kebutuhan dasar (*physiological needs*) pada manusia memang terbatas dan bisa dibatasi. Di semua negara maju kebutuhan dasar ini umumnya sudah terpenuhi pada hampir semua individu warga negaranya. Tetapi tidak untuk pemenuhan kebutuhan psikologis atau kebutuhan aspiratif tiap individu setiap warga negaranya. Karena pada prinsipnya aspirasi manusia tidak mudah bahkan tidak mungkin bisa dibatasi.

Dalam konteks aspirasi warga negaranya, USA masih menghadapi keterbelakangan karena baru bisa pergi mencapai bulan. Kalaupun setiap individu warga negara USA sudah mampu memenuhi aspirasinya untuk melakukan rekreasi ke ruang angkasa, tetapi belum mampu ke matahari ataupun ke berbagai galaksi lainnya. Artinya aspirasi akan terus berkembang sekalipun setiap individu warga negaranya telah dapat mewujudkan level kebutuhan *self actualization* sekalipun.

Secara agregat dari semua individu dalam masyarakat perkembangan level aspirasi tersebut ditentukan oleh tingkat kemajuan perekonomian. Ketika suatu perekonomian suatu masyarakat masih bersifat tradisional, persoalan utama adalah pemberdayaan setiap individu untuk mencukupi kebutuhan dasar.

Dengan meningkatnya tabungan masyarakat (tidak dihabiskan untuk kebutuhan konsumsi), maka akan diikuti oleh meningkatnya investasi infrastruktur publik yang dapat menggerakkan investasi swasta (*private*). Kedua jenis investasi ini senantiasa akan meningkatkan *empowering* individu melalui bangkitnya permintaan tenaga kerja, menekan angka pengangguran, kembali terjadi peningkatan pendapatan masyarakat maupun pendapatan pemerintah melalui pajak dan berbagai pungutan lainnya, kembali terjadi surplus tabungan untuk investasi publik yang diikuti investasi swasta. Demikian seterusnya perekonomian berkembang mulai dari perekonomian masyarakat agraris atau pengekstrak SDA, berkembang menjadi perekonomian agroindustri, lalu perekonomian masyarakat bercorak industri manufaktur, dan terakhir puncaknya pada perekonomian masyarakat yang bertumpu pada jasa-jasa. Proses ini dikenal dengan istilah proses transformasi struktural tenaga kerja atau pun struktur perekonomian.

Negara-negara yang sebagian besar masyarakatnya telah bertumpu pada aktivitas industri manufaktur dan jasa-jasa dikenal sebagai masyarakat industri maju. Proses transformasi struktural tersebut pada umumnya diiringi oleh perkembangan dominasi aspirasi masyarakatnya. Demikian juga tema pemberdayaan individu dalam setiap level perekonomian juga berkembang mengiringi proses transformasi struktural tersebut. Artinya tuntutan pemberdayaan terhadap belenggu keterbelakangan ini juga beriringan perkembangan aspirasi warga negaranya sebagai dampak keberlanjutan dari proses transformasi struktural menjadi negara industri maju.

1.6 Produk Jasa sebagai Puncak Produktivitas Tenaga Kerja

Dua jenis produk dalam setiap sistem perekoenomian, yaitu produk berupa barang dan berupa jasa. Secara umum proses transformasi struktural perekonomian ataupun struktural tenaga kerja dapat dimulai dari eksploitasi sumberdaya alam, termasuk berburu, menangkap ikan, mengambil hasil hutan, eskpoitasi bahan tambang. Tahap kedua adalah pada dilakukan budidaya perkebunan, dan pertanian-pertanian intensif termasuk peternakan dll. Fase

ketiga adalah pada proses agroindustri, yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Keempat adalah proses industri manufaktur. Ke lima adalah suatu perekonomian yang telah mengandalkan sektor jasa khususnya jasa tenaga ahli di sektor-sektor keuangan, kesehatan, jasa riset dan lain-lain.

Tentu saja setiap fase atau tahap tersebut akan selalu diiringi dan dikendalikan oleh perkembangan, kemajuan, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau Ipteks. Unsur seni juga berperan penting, karena seni dapat membangkitkan imajinasi penerapan maupun inovasi. Demikian pula praktek manajemen, sebagai suatu seni, manajemen tidak pernah absen dalam setiap penatakelolaan baik mulai dari lingkup organisasi yang sederhana yaitu dua orang sampai dengan level komunitas yang luas, bahkan sampai organisasi global. Dalam konteks ini maka, produk berupa jasa merupakan produk yang syarat dengan penerapan Ipteks yang paripurna. Oleh karena itu, produk jasa pada hakekatnya merupakan puncak produktivitas dari setiap fase perekonomian. Artinya negara-negara industri maju, selain mengandalkan produk industri manufakturing juga pada produk jasa. Karena proses produksi begitu sangat efisien, maka produktivitas tenaga rata-ratanya menjadi sangat tinggi sehingga begitu pula kemakmuran jauh meninggalkan negara-negara agraris.

Namun penting dicatat di sini, bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, punya oportunitas yang besar utuk secara relatif cepat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan setiap individu masyarakatnya. Oportunitias itu juga dapat diraih melalui pengembangan produk jasa wisata, terutamakali wisata alam (*ecoturism*).

BAB II
RISALAH TEORI PEMBANGUNAN

Teori merupakan kumpulan pengetahuan yang telah teruji dan tersusun secara sistematis. Kegunaan teori yang terpenting setidaknya adalah sebagai landasan pengembangan prediksi dan untuk melakukan manajemen. Hasil prediksi dapat digunakan untuk melakukan managemen terhadap kejadi yang akan muncul di masa yang akan datang dengan cara membuat perencanaan, pendayagunaan terhdap segala aspek positif dan sekaligus untuk menekan dan memitigasi eksternalitas negatif akan terjadi. Dengan cara ini maka dapat dicapai pemberdayaan. Karena itu, penguasaan ilmu, teknologi, dan seni (Ipteks) dipastikan akan menentukan kekuatan perekonomian, kesejahteraan dan kemajuan peradaban. Teori-teori pembangunan selalu dilandasai oleh pengembangan Ipteks. Karena Ipteks juga terus berkembang maka teori-teori pembangunan juga mengiringinya.

2.1 Dialetika Sistem Sosial dalam Proses Pembangunan

Sistem merupakan sekumpulan atribut yang saling berpengaruh (*dialectic*), ketika salah satu komponen atau atribut berubah maka akan mengubah seluruh keadaan dari sistem tersebut. Demikian pula dengan sistem pembangunan yang menurut Hayami dan Godo (2006) merupakan kumpulan atribut yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 subsistem yaitu pertama adalah subsistem perekonomian (*economic subsystem*) dan ke dua sistem budaya kelembagaan (*cultural-institutional subsystem*). Subsistem pertama sebagai basis atau pondasi subsistem sosial-kultural. Lebih lanjut subsistem yang pertama dapat dikelompokkan menjadi

komponen teknologi dan komponen faktor produksi. Sedangkan subsistem yang ke dua dapat dikelompokkan menjadi komponen nilai (*value*) dan institusi. Secara digramatik sistem sosial ini dapat disajikan dalam Gambar 1.2.

Subsistem perekonomian (*economic subsystem*) saling mempengaruhi secara dialetika dengan subsistem kultural-institutional (*cultural-institusional subsystem*). Ketika terjadi perubahan dalam subsistem perekonomian katakanlah pertumbuhan ekonomi meningkat, maka akan terjadi pola konsumsi dan gaya hidup. Lebih lanjut gaya hidup ini akan mengontrol terjadinya perubahan terhadap pertumbuhan perekonomian (subsistem perekonomian melalui signal harga pasar yang kemudian direspon berupa perubahan sistem produksi. Begitu seterusnya sistem sosial berubah dari masa ke masa yang dapat disaksikan mulai sebelum era revolusi industri (RI) bergerak R1.0 menjadi RI 4.0 dan kini memasuki era RI 5.0 (Bakri, 2022). Proses dialektika secara berlangsung secara terus-menerus dalam sistem sosial ini sebenarnya sama dengan hukum fisika aksi-reaksi yang berlangsung secara terus-menerus pula.

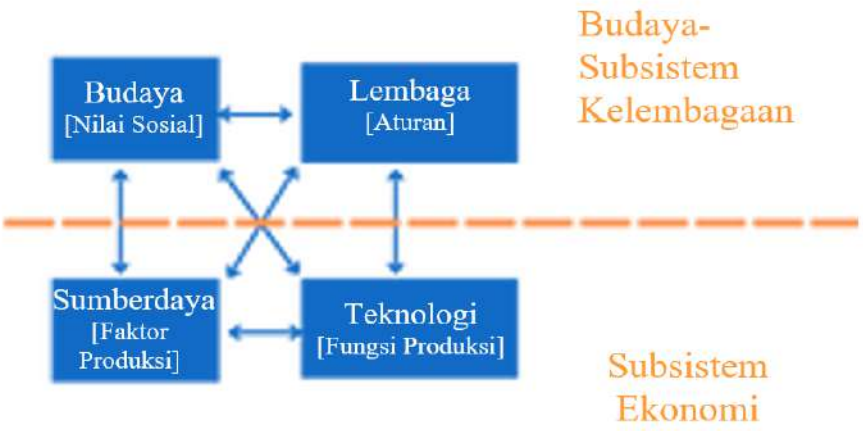

Gambar 2.1. Dialektika sistem sosial dalam pembangunan (Hayami & Godo, 2006)

Dalam subsistem perekonomian juga selalu berlangsung dialetika antara komponen sumberdaya (yang berfungsi sebagai faktor produksi) terhadap komponen teknologi (fungsi produksi). Peningkatan kelangkaan sumberdaya seperti BBM (yang dicerminkan oleh peningkatan harga) maka akan direspon dalam teknologi berproduksi misalnya dengan mengganti mesin-mesin yang menggunakan batubara. Lebih lanjut batubara akan mengalami kelangkaan yang akan direspon oleh inovasi mesin-mesin yang menggunakan energi alternatif berupa *biofule*, *solar energi*, *wind energi* dsb.

Demikian juga dalam subsistem sosial-kultural. Perubahan tata nilai (*culture*) katakanlah dari tata nilai di kawasan *rural agriculture* berevolusi berubah menjadi kawasan perindustrian dan jasa-jasa maka institusi juga akan berubah, tata aturan yang semula membuang limbah pertanian dipandang sebagai tindakan melakukan pemupukan organik berubah menjadi larangan membuang sampah sembarangan. Perubahan tata perilaku ini kemudian pada gilirannya juga menginduksi terjadi perubahan nilai bahwa sampah menjadi kompos yang berarti terjadi tata nilai pemelihara atau kepedulian terhadap lingkungan (*environmental care*). Dalam konteks ini, Mukti dkk (2019) membuktikan dalam penelitiannya di Kecamatan Jati Agung yang merupakan suburban dari Kota Bandar Lampung (peralihan dari kultur perdesaan menjadi perkotaan) bahwa para wanita yang punya karakter pemelihara lingkungan ternyata mempunyai jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) yang kuat. Dalam hal ini kelangkaan telah menyebabkan kreativitas khususnya pada wanita. Munculnya kreativitas ini akan menginduk lebih lanjutan terjadinya perubahan faktor maupun fungsi produksi. Begitu seterusnya dialetika di antara 4 komponen sistem sosial ini berlangsung.

Selain diaktetika di dalam tiap subsistem sosial, proses pembangunan juga menyebabkan dialetika antar komponen dari ke dua subsistem. Seperti dapat ditujukkan dalam Ganbar 2.1 dialetika dapat berlangsung di antara komponen-komponen: (a) Sumberdaya *versus* Budaya, (b) Sumberdaya *versus* Institusi, (c) Teknologi-Budaya, dan (d) Tekologi *versus* Institusi.

Pemahaman terhadap berlangsungnya fenomena dialektika sistem sosial dalam proses pembangunan tersebut antara lain untuk melakukan rekayasa sosial yaitu melalui kebijakan publik untuk menstimulasi dan mempercepat terjadinya perubahan pada terjadinya perilaku tertentu sebagian besar warga negaranya. Sebagai contoh misalnya Hayami dan Godo (20006) dan Bakri (2022) mengungkapkan cadangan BBM dalam perut bumi Norwegia diperkirakan baru akan habis sekitar 200 tahun mendatang. Pemerintah Norwegia mengambil kebijakan harga BBM 3 kali dari harga internasional. Kebijakan ini telah membuat kelangkaan pasokan BBM dalam sistem perekonomian negara kapitalis ini. Dampak dari kebijakan ini telah membuat: (a) membuat perilaku hemat, (b) cadangan BBM dalam perut bumi Norwegia menjadi terselamatkan oleh ancaman perilaku boros individu warga negaranya, (c) menstimulasi inovasi teknologi yang ramah lingkungan seperti solar energi menjadi energi listrik, mobil listrik atau mobil hibrid menggantikan dominasi mobil BBM dll, (d) timbul perilaku individu dalam masyarakat Norwegia yang ramah lingkungan, dan (e) Norwegia menjadi *emitter* GRK terendah di dunia. Untuk dapat mengembangkan ketrampilan dalam merancang kebijakan publik secara komprehensif seperti ini maka pada bagian berikut dibahas berbagai teori-teori pembanguan secara evolusioner.

2.2 Pembangunan Berkelanjutan: Tinjauan Empat Model

Dalam berbagai kajian ilmiah tentang pembangunan senantiasa dijumpai penggunaan diksi model dan teori. Kedua diksi ini sebenarnya sejenis yang sering mempunyai makna yang saling dipertukarkan. Memang keduanya pada hakekatnya sama dengan sedikit perbedaan bahwa teori biasanya bersifat menjelaskan hubungan sebab-akibat beserta dialetikanya dengan menjelaskan pula antitesisnya. Sedangkan model lebih bersifat eksplanatif saja, lebih mengutamakan penjelasan hubungan sebab-akibat. Jadi model bertujuan untuk lebih praktis antara lain banyak digunakan untuk tujuan pengembangan kebijakan. Demikian juga dengan model-model pembangunan.

2.2.1 *Model Rostow*

Teori dan Model Rostow sekarang sebenarnya merupakan model yang kurang relevan untuk dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan. Namun dalam buku ini, sebagai bagian dari risalah teori pembangunan teori ini tetap perlu dibahas sebagai pembelajaran dan untuk mencegah agar tidak keliru dalam mengembangkan praksis kebijakan pembangunan.

Dalam membentangkan model pembangunannya Rostow tahun 1959 menurut Galangmane (2021) menyusun tahapan proses pembangunan ekonomi secara berkesinambungan dalam 5 fase atau tahapan yaitu: (1) Masyarakat Tradisional, (2) Masyarakat Pra-lepas Landas, (3) Masyarakat Lepas Landas, (4) Masyarakat Mengarah Makmur, dan (5) Masyarakat Kaya atau Makmur. Setiap tahap tersebut dibedakan atas dasar komposisi dominan 3 jenis produk yang dihasilkan dalam sistem perekonomian masing-masing. Ketiga jenis produk tersebut adalah produk primer, produk sekunder, dan produk tersier. Secara diagramatik, model Rostow ini disajikan pada Gambar 2.2.

	Sektor Primer	Sektor Sekunder	Sektor Tersier
Masyarakat Tradisional	Sebagian Besar	Sangat Sedikit	Sangat Sedikit
Pra Kondisi Lepas	Sebagian Besar	Sedikit	Sangat Sedikit
Lepas Landas	Menolak	Pertumbuhan Cepat	Sedikit
Bergerak Kedewasaan	Sedikit	Stabil	Berkembang Pesat
Konsumsi Masal Masiv	Sangat sedikit	Menurun Drastis	Sebagian Besar

Gambar 2.2. Ilustrasi Pembangunan Perekonomian Berkelanjutan Rostow (disarikan dari Hayami dan Godo, 2006).

Perlu dikemukakan disini bahwa yang disebut produk primer tersebut adalah identik dengan bahan mentah yang antara lain kayu glondongan, minyak mentah, biji logam hasil tambang (besi; tembaga; bauksit; mangan dll), hasil bumi (gabah; jagung pipilan; biji kedelai; biji kacang tanah; buah sawit, biji kopi; biji kakao; kapas; rotan; kayu manis; getah karet atau lateks; getah pinus; getah damar; kelompok buah segar dll). Kelompok produk sekunder adalah hasil olahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku terutama yang telah dihasilkan melalui proses agroindustri termasuk veneer, kayu lapis, kayu kaso, bahan baku furniture, tepung beras, tepung jagung, tepung kedelai, CPO, kakao fermentasi, kopi bubuk tradisional dll.

Perbedaannya dengan proses industri manufakturing (yang teori Rostow termasuk dalam produk tersier) maka produk sekunder umumnya dipasarkan atau diekspor dalam bentuk curah ataupun kemasan besar (*bulk*) misalnya dengan menggunakan karung-karung dan sejenisnya. Sedangkan produk tersier (khususnya yang berbahan baku dari hasil-hasil proses agroindustri) yaitu produk telah melalui proses pabrikasi masal. Untuk pangan. Garment, kosmetik atau[un obat-obatan, produk tersier umumnya menggunakan kemasan mewah dengan tampilan yang eksotik. Berapa contoh produk tersier antara lain BBM, ban mobil, pernis, lak, furniture, sepatu, baju, minyak goreng, produk *snack*, *confectionary*, jas, baju, mobil, mesin-mesin industri, alat-alat berat dll.

Kelompok produk tertser dalam teori ini juga termasuk produk-produk jasa seperti jasa konsultan, jasa keuangan, perbankan, asuransi, jasa transportasi laut, aviasi, jasa telekomunikasi, jasa layanan medis, jasa audit, jasa *appriasal*, jasa pendidikan, jasa layanan publik dll. Penyediaan berbagai bentuk jasa ini umumnya hanya bisa dilakukan oleh providers yang telah menerapakan sistem managemen moderen yang memerlukan standar layanan dan sertifikasi profesi yang ketat. Artinya hanya negara atau wilayah yang sudah mengalami proses transformasi struktural pada level paripurna saja yang bisa menjalankan secara efisien dan memungkinkan untuk mengalami akumulasi kapital

secara berkelanjutan melalui surplus sektor perekonomian. Hal ini berarti pula bahwa untuk negara-negara ataupun wilayah-wilayah yang sedang berkembang (*developing countries* ataupun *developing regions*) hampir tidak mungkin mempunyai struktur perekonomian dengan kontribusi pendapatannya yang dominan produk sektor jasa. Keadaannya juga semakin sulit bagi bagi negara-negara atau wilayah-wilayah terbelakang (*under developed country* ataupun *under developed regions*).

Fenomena tersebut merupakan fenomena yang dapat menjelaskan adanya disparitas yang terus meningkat antara negara maju terhadap negara berkembang atau pun negara terbelakang. Nilai tambah produk lebih banyak diakses oleh negara-negara maju melalui kecanggihan dalam sistem managemennya yang dilandasi oleh suprastruktur maupun infrastruktur yang lebih dulu mapan. Akibatnya negara-negara berkembang dan negara-negara terbelakang selalu dan terus bergantung kepada negara-negara industri maju baik melalui ekspor bahan-bahan mentah (yang berarti banyak terjadi kebocoran nilai tambah), impor barang-barang sekunder seperti mesin-mesin dan peralatan (yang berarti menekan peluang berkembangnya inovasi di negara-negara berkembang) maupun penggunaan impor tenaga ahli (penyedia jasa layanan). Impor tenaga ahli ini tidak mungkin bebas dari maju kepentingan negaranya, yaitu untuk melanggengkan kepentingan negara maju agar berkembang dan terbelakang terus bergantung dengan produk-produk industri dari negara-negara maju. Mekanisme kebocoran nilai tambah melalui impor tenaga ahli ini yang telah menjadikan situasi seperti yang disebut Lipton (1977) dengan frase "*Why poor stay poor*".

Walaupun begitu ada, masih ada celah bagi negara-negara berkembang ataupun negara-negara terbelakang untuk meraih rente perekonomian (*economic rent*) yang tinggi melalui pemberdayaan pelaku *suplay chain* di sektor jasa yaitu jasa wisata terutama wisata alam (*ecotourism*). Wisata merupakan aktivitas konsumsi mewah, dalam arti segmen pasarnya adalah para konsumen yang telah mencapai kebutuhan psikologis paling tidak mencapai pada kebutuhan pada level *self esteem* dalam Hirarki

Maslow (Uysal dkk, 2018). Artinya pengembangan sektor jasa wisata ini di negara-negara berkembang dapat diharapkan dapat menjadi faktor pengungkit (*leverage*) untuk meraih peluang tingkat pendapatan yang bisa setara bahkan di atas pendapatan di sektor industri manufaktur.

Peluang tersebut makin besar jika dikaitkan dengan keberadaan obyek-obyek wisata alam (*ecotourism*) yang pada umumnya berada di wilayah perdesaan sehingga dapat menjadi instrumen pemerataan dan mengurangi disparitas pendapatan antara perkotaan terhadap perdesaan. Bukan hanya itu, sektor pariwisata sebenarnya dalam neraca perdagangan dikelompokkan sebagai penerimaan dari sisi ekspor, penghasil devisa dan yang lebih istimewa lagi importirnya yang datang sendiri membeli komoditas ke dalam negeri sehingga bea ekspornya bukan menjadi pengeluaran, melainkan malah menjadi pendapatan sektor pajak juga bagi pemerintah.

Tambahan pula, bahwa keunggulan sektor pariwisata untuk pemberdayaan individu dalam masyarakat adalah pada sisi investasi pengembangannya maupun konstruksi infrastrukturnya. Menurut Zulkarnain dan Ulfa (2021) untuk membangkitkan 1 lapangan pekerjaan di sektor wisata hanya diperlukan investasi publik rata-rata sekitar USD 6.400 sedangkan untuk sektor-sektor lain rata-rata minimal USD 56.000. Keunggulan kompetitif yang hampir 10 kali lipat ini menjadi akan makin eskalatif jika sektor pariwisata yang dikembangkan mengambil ceruk pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan atau yang populer disebut jasa ekowisata. Eskalasi ini dapat difahami mengingat obyek-obyek bentang alam, pemandangan, ataupun suasana alam lainnya sudah tersedia. Tidak diperlukan investasi khusus dalam penyediaan debur ombak di pantai untuk hanya dilihat, untuk berselancar, keindahan laut untuk snorkeling ataupun menghadirkan pemandangan berbagai perahu-perahu nelayan dan lainnya. Demikian pentingnya pendayagunaan SDAL bagi negara-negara berkembangyang mempunyai banyak kawasan perdesaan melalui pengembangan ekowisata dalam rangka meraih rente yang sangat besar dari sektor jasa tersebut. Karena itu secara khusus pengembangan sektor

ekowisata akan dibahas secara tersendiri dalam kaitannya dengan pemberdayaan setiap individu dalam masyarakat.

Tahap pembangunan untuk mencapai corak perekonomian industri manufaktur dan jasa-jasa tidak bisa dipungkiri memang penting menurut teori ini. Tetapi juga perlu dikemukakan di sini keterbatasan dari Model Rostow (1959 dalam Hayami dan Godo, 2006) ini adalah: *Pertama* pada adanya asumsi yang sangat naïve, yaitu seolah industrialisasi dapat terus berlangsung dan berkesinambungan langsung tanpa dilandasi pengembangan sektor pertanian, seolah ketika suatu negara telah lepas landas seolah tidak akan memerlukan sektor pertanian khususnya pangan, padahal penyediaan pangan selalu merupakan komoditas yang kritis pada setiap fase pembangunan. India dan beberapa negara Eropa Timur telah gagal dalam melaksanakan pembangunan dengan mengejar industrialisasi manufaktur tanpa mengembangkan sektor pertaniannya. *Ke dua* seolah pembangunan hanya sekedar transformasi struktural perekonomian (*Economic Subsystem*), tanpa diiringi dengan pengembangan sub sistem sosial (*Cultural-Instiitional Subsystem*) sebagaimana kritik yang diajukan oleh Hayami dan Godo (2006).

Menurut kedua begawan tersebut, pertumbuhan dan kemajuan subsistem perekonomian merupakan syarat perlu bagi kebersinambungan pembangunan, tetapi tidak cukup. Syarat lebih lanjut agar pembangunan berkesinambungan dapat diwujudkan adalah terwujudnya subsistem kultural-institutional yang lentur (*resilience*) terhadap terjadinya dialektika sistem sosial dari setiap perubahan semua komponennya. Hendaknya subsistem ini mampu mengubah perilaku individu warga negaranya agar sesuai dengan tata nilai atau tatanan perdaban dalam sistem industri. Dengan begitu akan terwujud sistem sosial yang adil sebagai prasyarat keberlanjutan pembangunan menuju masyakat adil dan makmur.

2.2.2 Model Pembangunan Malthus dan Kelompok Roma

Thomas Robert Malthus (1766-1834) adalah ekonom yang pertama kali melangsir ancaman kebersinambungan suatu sistem peradaban. Teori Malthus yang sangat populer itu secara sederhana

dapat diungkapkan bahwa pertumbuhan bahan pangan mengikuti deret hitung sedangkan pertumbuhan populasi mengikuti deret ukur. Akibatnya suatu saat terjadi kepunahan manusia akibat SDAL tidak mampu untuk memproduksi pangan dalam menopang pesatnya pertumbuhan populasi. Kepunahan disini juga berarti sebagai bentuk ketidakbersinambungan peradaban. Secara diagramtik model Malthus ini dapat disajikan dalam Gambar 2.3.

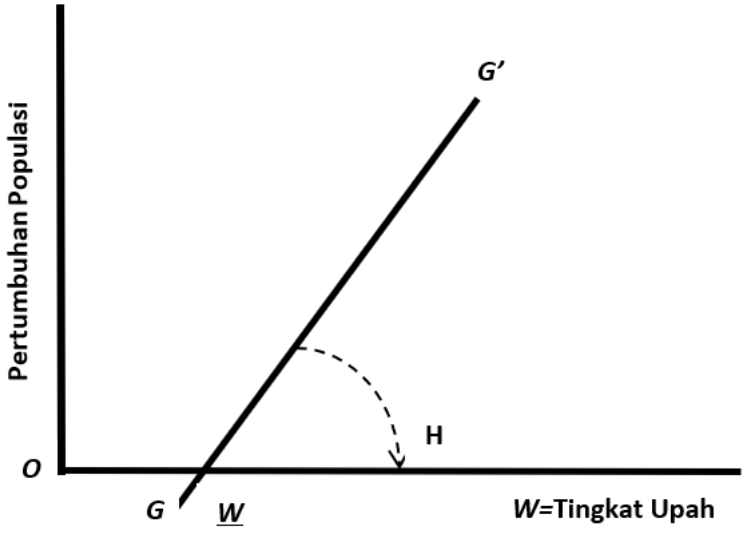

Gambar 2.3. Ilustrasi Model Malthus (Modifikasi dari Hayami dan Godo, 2006)

Pada Gambar 2.3, Sumbu tegak mewakili tingkat pertumbuhan populasi, dan Sumbu datar mewakili tingkat upah yang merupakan proksi dari pasokan pangan kepada para pekerja. Simbol **W** untuk menunjukan tingkat upah minimum (seperti UMP: upah minimum provisi) atau dalam sistem ekologi sebagai daya dukung SDAL. Tentu saja **W** tidak boleh di titik *nol* (**O**) karena individu yang belum bisa mencari nafkah secara mandiri tetap bergantung pada induknya ataupun dari subsidi, derma, *charity* dll. Demikian pula orang yang menganggur harus tetap makan atau bahkan memerlukan kebutuhan hidup minimum alias kebutuhan dasar atau kebutuhan fisilogis dalam kacamata Abraham Maslow (Uysal dkk, 2018).

Prediksi yang diteorikan oleh Malthus: (1) Ketika pasokan bahan pangan meningkat berarti akan terjadi keadaan bahan pangan yang tersedia melebihi W, yang juga berarti terjadi ketercukupan nutrisi. Dengan ketercukupan nutrisi ini, akan meningkatkan kesehatan individu meningkat diiringi dengan peningkatan fertilitas pasangan usia subur yang berujung pada peningkatan kelahiran disertai dengan penurunan tingkat kematian. Akibatnya terjadi peningkatan populasi neto yang digambarkan kurva berwarna merah (kurva pertumbuhan populasi) meningkat secara linier. (2) Fenomena peningkatan kurva pertumbuhan populasi (dari perpotongan **W** dengan sumbu datar) ini tidak pernah ke titik **G'**) melainkan akan ambruk seperti yang ditunjukan dengan garis putus-putus seperempat lingkaran yaitu di titi **H**.

Ambruknya sistem perekonomian (dan tentu saja sekaligus merupakan acaman ambruknya sistem peradaban) sebagaimana yang diramalkan oleh Model Malthus ini bakal terjadi karena daya dukung SDAL tidak mampu lagi menopang jumlah populasi yang pesat tingkat pertumbuhannya. Dengan demikian Model Malthus merupakan salah satu teori yang pesimis dalam memprediksi keberlanjutan pembangunan. Artinya bagi Malthus pembangunan berkesinambungan tidak dapat diwujudkan karena SDAL tidak akan mampu menopang pesatnya pertumbuhan populasi.

Perlu dicatat disini bahwa motif utama membangun suatu teori antara lain adalah untuk mengelola masa depan, dengan cara melakukan prediksi secara sahih dengan persisi yang tinggi. Hasil prediksi ini digunakan untuk memitigasi ketika di masa mendatang secara meyakinkan akan terjadi sesuatu yang membahayakan sekaligus memanfaatkan segala peluang kejadian yang menguntungkan. Teori Malthus dikembangkan sejak abad ke 18, tetapi bencana yang diramalkan dengan Model Malthus ini belum pernah terjadi sampai kini. Artinya seolah bangun teorinya bagus, tetapi prediksinya buruk.

Berkaitan dengan buruknya ramalan Malthus itu setidaknya ada 2 aspek yang saling berkaitan yang perlu untuk diajukan suatu bentuk kritik yang tajam. Aspek yang pertama, bahwa Malthus memandang insting manusia seperti hewan (*animal instict*) yang

akan punah ketika menghadapai kelangkaan sumber daya. Padahal manusia dibekali akal-budi yang akan memberikan respon *survival* yang lebih kuat dari pada binatang ketika menghadapi kelangkaan. Respon survival itu dimanifestasikan berupa munculnya berbagai inovasi Ipteks. Sebut saja ketika terjadi kelangkaan bahan bakar kayu untuk mesin uap maka muncul inovasi teknologi mesin motor bakar yang mengikuti prinsip Siklus Otto, yang kemudian dikenal dengan mesin otomotif disusul dengan mesin disel yang dipelopori oleh Sady Carnott. Ketika terjadi kelangkaan rasa aman terhadap penyakit akibat mikroba maka muncul inovasi antibiotik. Ketika puncaknya RI 1.0 di Inggris, menyebabkan kota-kota besar seperti London dan Glasgow mengalami sanitasi yang sangat buruk, kemudian muncul berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri khususnya TB paru dan kolera, yang memicu inovasi antibiotik yang dipelopori oleh Luis Pasteure dan Robert Koch. Demikian juga terhadap kemudian virus muncul inovasi vaksin termasuk vaksin terhadap Covid19 yang belakangan ini terjadi.

Aspek kedua yang diabaikan dalam Model Malthus tidak menggunakan argumentasi proses akumulasi kapital. Adanya karakter manusia yang responsif terhadap insentif, maka ketika terjadi kelangkaan suatu sumberdaya itu berarti ada insentif orang untuk melakukan suatu inovasi yang dapat digunakan mengatasi masalah melalui proses produksi bahan baru yang lebih efisien, lebih efektif dan lebih unggul. Disini terbuka untuk melakukan akumulasi kapital melalui oportunitas untuk mengumpulkan keuntungan atas penerapan suatu inovasi ini sebagai respon dari adanya kelangkaan sumberdaya tersebut.

Atas dasar kedua kritik tersebut ini maka teori Malthus tidak dapat dipandang sebagai teori ekonomi. Walaupun Malthus adalah seorang begawan ilmu ekonomi, tetapi teori yang dihasilkan bukan teori ekonomi melainkan teori populasi. Keterkaitan antara dua aspek yang tidak dipenuhi dalam Model Malthus sangat kuat. Manusia yang diberi akal budi merupakan mahluk yang responsif terhadap insentif. Ringkasnya ketika terjadi kelangkaan ada insentif yang kuat untuk mendorong manusia mencari solusinya dengan mendayagunakan akal-budi yang dimiliki untuk memperoleh

manfaat atau keuntungan, termasuk keuntungan material yang dapat diakumulasikan untuk pengembangan aspirasinya.

Implikasi penting bagi para pemangku kebijakan publik yang antimalthusian (*contra-malthusian*) telah diuraikan pada *Sub-sub bab* 2.2.1 di atas tentang penetapan harga BBM di Norwegia sangat mahal yaitu hampir 3 kali harga minyak di pasar internasional. Harga BBM yang tinggi ini merupakan pengkondisian agar BBM menjadi barang yang sangat langka sekalipun cadangan minyak bumi di Norwegia cukup melimpah, yang baru akan habis 200 tahun lebih. Pengkondisian kelangkaan ini telah banyak menimbulkan insentif ekonomi untuk menemukan berbagai energi alternatif sekaligus menekan polusi udara.

Teori berikutnya yang tergolong pesimis yang bersifat malthusian adalah teori yang dicetuskan oleh Kelompok Roma (*Rome Club*) suatu kelompok peneliti yang bergabung di MIT. Kelompok Roma yang diketuai oleh Meadow dkk (1972) menerbitkan paper berjudul *The Limit to Growth* atau batas pertumbuhan alias batas kebersinanbungan pembangunan. Paper ini membuat perbincangan publik ilmuwan dunia karena dua tahun sebelum terbitnya paper tersebut telah terjadi peningkatan harga pangan dunia yang sangat spektakuler. Keadaan ini telah menimbulkan spekulasi bahwa ramalan Malthus bakal terjadi. Namun setelah diperiksa oleh banyak kalangan ilmuwan seluruh dunia, ternyata disimpulkan bahwa kelangkaan pangan yang ditunjukkan oleh signal harga pangan sangat tinggi itu merupakan suatu falasi.

Ada 2 penyebab terjadi falasi tersebut, yaitu pertama adanya embargo minyak yang dilakukan OPEC (*Organization of Petroleum Exporting Countries*), Indonesia merupakan alah satu anggotanya. Penyebab ke dua adalah adanya gagal tanam akibat elnino. Setelah USA mengeluarkan cadangan minyaknya disertai selesainya elnino disusul penanam tanaman pangan normal kembali maka harga pangan dunia kembali normal. Teori *The Limit to Growth* menjadi bahan tertawaan.

2.2.3 *Teori Pembangunan Model Ricardo*

Teori pembangunan Model David Ricardo (Hayami dan Godo, 2006) dapat dipandang sebagai teori pembangunan yang paling tulen (*genuine*). Sampai dewasa ini Model Ricardo masih sangat relevan untuk menjelaskan adanya kebergantungan dan kendala pada sumberdaya alam seperti dijelaskan oleh Hayami dan Godo (2006). Prinsipnya Model Ricardo harus menggunakan dua kurva yang bersisian seperti ditampilkan pada Gambar 2.4. Kurva sebelah kiri kita dimaksudkan untuk menjelaskan proses akumulasi kapital yang menjadi prasyarat perlu agar suatu pembangunan (atau perekonomian atau pun peradaban) bisa mencapai target berkesinambungan. Kurva sebelah kanan pada prinsipnya untuk merepresentasikan variabel sumberdaya sebagai kendala yang harus dirancang untuk diatasi agar suatu pembangunan bisa mencapai target keberlanjutan.

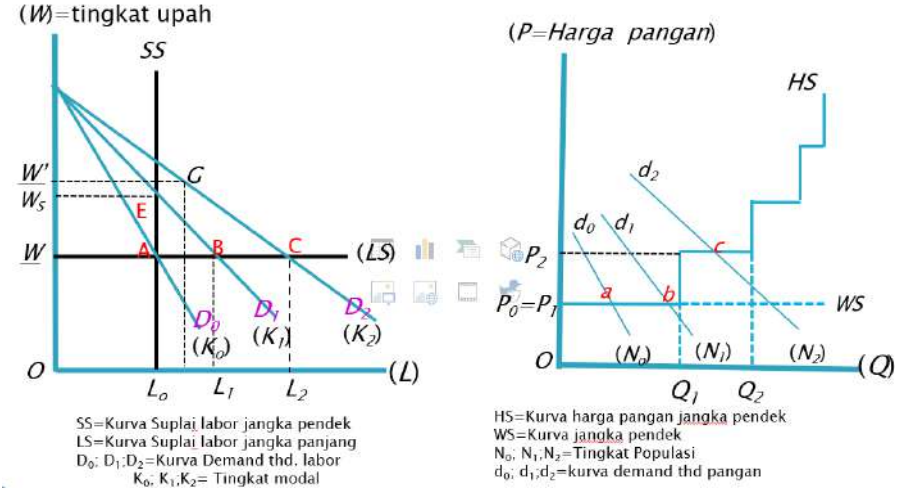

Gambar 2.4. Ilustrasi Model Pembangunan David Ricardo (Hayami dan Godo, 2006)

Secara rinci model Ricardo dapat dijelaskan seperti berikut:

[1] Perekonomian bermula pada posisi modal (kekayaan kapitalis) sebesar K_0, level upah pada $\underline{W}$ dengan *demand* tenaga kerja (TK) pada level L_0. Dalam posisi ini kurva permintaan terhadap TK berupa Kurva DD_0 dengan kurva suplai TK jangka pendek

SS (*short run suplay*) yang diasumsikan bentuknya tegak. Asumsi ini didasarkan pada realitas bahwa dalam jangka pendek tidak mungkin terjadi penambahan terjadi penambahan ataupun penurunan suplai TK berhubung proses produksi sudah diputuskan oleh pengusaha tahun sebelumnya atau tahun yang tidak mungkin untuk diubah seketika itu juga.

[2] Pengusaha dapat dipastikan selalu ingin melakukan reinvestasi atas keuntungannya untuk terus meraih keuntungan yang masih terbuka oportunitasnya. Dalam keadaan awal atau keadaan [1] ini, maka akan tercipta keuntungan pengusaha sebesar sebesar segitiga AD$\underline{W}$. Dengan keuntungan ini maka terjadi akumulasi kapital K_1=(K_0 + AD$\underline{W}$). Total kapital ynag tumbuh menjadi K_1 yang kemudian untuk diinvestasikan Kembali (*reinvested*) lagi demi untuk mencari keuntungan lebih jauh lagi.

[3] Dengan reinvestasi itu, maka berarti juga berakibat demand terhadap TK menjadi lebih banyak jumlahnya yaitu ke L_1 dengan kurva demand terhadap TK atau kurva DD_0 bergeser ke DD_1. Implikasinya terjadi kenaikan upah sebesar $\underline{W}$Ws. Kenaikan ini sama dengan yang digambarkan dalam Hukum Malthus bahwa ada kenaikan demand dari L_0 ke L_1, yaitu ketika belum terjadi kelangkaan pangan atau sumberdaya.

[4] Begitu seterusnya prosesnya untuk akumulasi kapital pada level K_2 yang juga berakibat pada permintaan TK menjadi sejumlah L_2. Namun perilaku kapitalis selalu menekan upah agar selalu menjadi ke level $\underline{W}$, yang menjamin agar insentif bagi kaum kapitalis selalu ada agar terus tertarik untuk selalu melakukan reinvestasi keuntungannya. Akibat perilaku kapitalis ini maka upah TK dalam jangka panjang maka upah buruh riil (upah yang diukur menggunakan unit produk alias bukan upah yang dinyatakan dalam satuan nominal uang) selalu konstan sepanjang masa. Fenomena ini juga menyebabkan kurva *suplay* TK jangka pajang selalu horizontal yaitu *LS*.

Pertanyaan kemudian sampaikan kapan pertumbuhan sistem perekonomian (*baca*: pembangunan atau peradaban) kapitalisme ini bisa dijamin terus keberlanjutan? Untuk menjawab pertanyaan ini maka diperlukan analisis daya dukung SDAL dalam menyokong keberlanjutan sistem perekonomian *capitalism* ini, seperti diilustrasikan pada Gambar 2.4 sebelah kanan. Garis tegak mewakili harga pangan, sebagai proksi atau ukuran pewakil kebutuhan minimum agar buruh atau TK dapat hidup pada level subsistem atau kebutuhan dasar yang dalam kosakata Indonesia adalah upah minimum. Adapun elaborasi tentang daya dukung SDAL terhadap perekonomian sistem kapitalisme itu oleh Bakri (2012) disarikan pada bagian berikut.

Kendala terhadap pertumbuhan seperti ini selalu dialami dalam sektor modern yang ditunjukkan oleh adanya fenomena DRS (*decreasing return to scale*) dalam memproduksi pangan (Rodríguez-Villalobos dkk, 2018). Diagram sebelah kanan Gambar 2.4 menyajikan suatu pasar pangan yang diwakili oleh bijian, di mana sumbu horizontal mengukur output bijian (sebagai proksi dari level konsumsi) dan sumbu vertikal adalah harga pangan. Garis *HS* mewakili sekedul suplai bijian yang ditentukan oleh biaya marjinal dalam memproduksi pangan. Sekedul ini arah naik, karena sumberdaya lahan (SDL) digunakan (*exploited*) dimulai dari yang paling fertil sampai ke katagori yang paling marjinal dan luasan SDL tiap katagori kesuburan suplainya tetap (*fixed*). Biaya marjinal dalam produksi bijian tetap konstan pada OP_0 (dimana OP_0=OP_1) sampai mencapai output maksimum yang bisa diproduksi oleh SDL kategori terbaik (OQ_1) namun melompat sampai ke OP_2 ketika output melebihi batas tersebut dan SDL kelas 2 mulai digarap. Peningkatan maju (*stepwise*) berlanjut ketika lebih makin banyak SDL yang kesuburannya inferior (*marginal land*) mulai digunakan untuk budidaya.

Karena bijian dikonsumsi oleh hampir semua TK dan juga karena pendapatan perkapitanya konstan pada level subsisten dalam jangka panjang, maka terjadi suatu pergeseran kurva permintaan *dd* sebagai respon dari pertumbuhan populasi itu sendiri. Dalam diagram sebelah kanan, d_0d_0 mewakili kurva permintaan yang

bersesuaian terhadap lapangan kerja sektor industri yang ditunjukkan oleh OL_0. Ketika lapangan kerja meningkat ke OL_1, dan kemudian ke OL_2, pertumbuhan populasi proporsional dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan menggeser kurva bijian ke d_1d_1, dan kemudian ke d_2d_2 berturut-turut. Untuk memperluas permintaan bijian dipenuhi dengan produksi hanya menggunakan katagori SDL terbaik, seperti dalam kasus d_1d_1, harga bijian tetap pada OP_0 (=OP_1). Namun ketika permintaan bijian meningkat ke d_2d_2, harga bijian menjadi OP_2; bersesuaian dengan biaya marjinal produksi menggunakan SDL kelas 2 untuk melakukan budidaya. Di sini dianggap bahwa peningkatan biaya marjinal dalam peningkatan produksi bijian dengan cara memanfaatkan SDL kelas 2 untuk budidaya adalah sama saja artinya dengan menggunakan jumlah kapital dan TK yang lebih banyak terhadap produksi dengan menggunakan SDL kelas 1.

Ketika harga bijian meningkat dari OP_1 ke OP_2, maka tingkat upah subsisten OW_0 yang digunakan untuk mencukupi buruh (TK) dalam membeli bijian dalam jumlah yang memadai untuk hidup subsisten pada level harga OP_0 menjadi tidak cukup lagi. Oleh karena itu, tingkat upah dalam sektor industri harus ditingkatkan dalam jangka panjang ke level OW', yang memungkinkan para TK untuk membeli bijian yang cukup untuk bertahan hidup mereka. Kemudian profit dalam sektor industri (yang menggunakan jumlah kapital K_2) menurun dari luasan $CD\hat{W}$ ke GDW'. Oleh karena itu, tingkat profit kapital dalam sektor industri akan menurun secara progresif ketika SDL yang sangat marginal mulai dibuka untuk dibudidayakan. Fenomena ini punya efek pada penurunan pendapatan wirausahawan kapitalis maupun penurunan insentifnya.

Di lain pihak, ketika harga bijian naik dari OP_1 ke OP_2, maka para produsen bijian menggunakan SDL kelas 1 yang dapat meraup ekses profit sebesar P_1P_2 per unit output. Karena ekses profit dapat diperoleh dengan menggunakan SDL kelas 1 dari pada SDL kelas 2, maka kompetisi diantara para produsen bijian untuk menggunakan SDL kelas 1 tersebut akan meningkatkan rentenya ke P_1P_2 dengan pendapatan tuan tanah menggunung. Jadi para tuan tanah dapat

menangkap *windfall gain* dari akumulasi kapital di sektor industri melalui pertumbuhan populasi maupun permintaan pangan.

Teori Ricardo memprediksi bahwa (di bawah *Resource Endowment* berupa SDA yang ada dalam ukuran luasan sumberdaya lahan yang tetap), maka harga pangan meningkat akibat dari pertumbuhan populasi akan mengendalikan perekonomian kedalam keadaan yang stasioner dimana tingkat keuntungan begitu rendah sehingga tidak ada insentif untuk melakukan investasi tambahan dan upah TK tidak menjadi divergen terhadap upah subsisten yang minimum, sementara itu para tuan tanah sendiri memperoleh perluasan *rent revenue* dan menghamburkan konsumsinya yang mencolok mata. Mekanisme SDL yang tetap (*fixed land resource endowment*) yang membatasi pertumbuhan ekonomi pada fase awal industrialisasi terkenal dengan sebutan *Ricardian Trap* atau *food problem.* Perangkap ini umumnya dikenal sebagai kerawanan pangan atau *food insecurity* yang belakangan ini juga terjadi di Sub Saharan Afrika (IMF, 2022).

Pilihan kebijakan (*policy*) yang diusulkan oleh Ricardo agar perekonomian Inggris waktu itu dapat terbebas dari perangkap kendala SDL (*Ricardian Trap*) adalah dengan melakukan liberalisasi impor bijian atau secara lebih khusus mencabut *Corn Law* yang telah banyak membebani hambatan tarif terhadap impor bijian murah dari luar negeri sebagai bagian dari sistem perdagangan (*mercantile system*) waktu itu. Ricardo berargumentasi bahwa SDL superior haruslah tersedia dalam luasan yang tidak terbatas, bukan hanya di Negara Inggris tetapi di seluruh dunia termasuk di benua baru. Ini yang kemudian menjadikan imperialisme atau penjajahan Dunia Barat ke Negara-negara Berkembang.

Akibat dari liberalisasi perdagangan itu, total suplai bijian baik dari dalam maupun dari luar negeri akan menjadi horizontal pada harga yang rendah (OP_0), seperti diwakili oleh garis WS (Gambar 2.4, sebelah kanan). Dengan begitu suplai TK bagi sektor industri dapat berlanjut menjadi horizontal pada tingkat upah $O\hat{W}$ dimana akumulasi kapital dan pertumbuhan ekonomi di sektor industri modern dapat dipertahankan agar *sustainable.* Pencabutan *Corn Law* merupakan kondisi yang perlu untuk mempertahankan

pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan yang dimulai ketika awal Revolusi Industri (RI 1.0).

Model Ricardo memulai secara jelas persoalan kendala SDA yang harus dihadapi oleh *low-income economy countries* dalam melakukan pembangunan industri ketika sektor pertanian mengalami stagnasi. Bila pertumbuhan populasi di fase awal industrialisasi tidak paralel dengan peningkatan suplai pangan, maka harga pangan akan meningkat secara tajam yang berimplikasi pada peningkatan biaya hidup bagi masyarakat *low-income* yang dicirikan oleh tingginya *Engle Coefficients*. Tingginya koefisien Engle ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan dihabiskan untuk pangan. Fenomena ini akan menyebabkan tekanan yang kuat pada kenaikan upah melalui serikat buruh dan juga dapat menyebabkan *food riot.* Resultansi dari peningkatan upah akan mempunyai implikasi terhadap goncangan serius (*serious blow*) bagi sektor industri di fase awal, yang tergantung kepada *labor-intensive technologies.*

Menurut Hayami dan Godo (2006) dan Hayami (2001) *Ricardian trap* yang dihadapi oleh berbagai *low-income developing economies* dewasa ini sama sekali tidak dapat dipecahkan melalui liberalisasi impor pangan. Saran yang diberikan oleh Ricardo berupa perdagangan bebas hanya relevan bagi Inggris pada awal abad ke 19, ketika itu populasinya hanya merupakan bagian yang kecil saja dari populasi dunia dan juga supremasi Inggris dalam produktivitas di sektor industri telah membuat negeri ini mudah dalam mendapatkan nilai tukar asing dalam jumlah yang cukup untuk impor pangan. Namun tidak mudah bagi negara berkembang dewasa ini untuk mendapatkan nilai tukar asing yang cukup yang bersumber dari barang-barang industri selama periode awal industrialisasinya. Kesulitan ini terjadi karena barang-barang industri yang dihasilkan oleh negara-negara berkembang kualitasnya belum mendapatkan kepercayaan pasar (*market trust*) yang besar. Kecuali itu juga begitu banyak negara berkembang berkompetisi dalam impor pangan, maka harga pangan internasional akan meningkat sebegitu besar sehingga harga dalam negeri akan menjadi tidak stabil.

Bagi negara berkembang, tampaknya tidak ada jalan lain untuk melepaskan diri dari *Ricardian Trap* selain dengan mengembangkan teknologi budidaya pertanian yang diiringi dengan pembangunan sektor-sektor industri hilirnya. Ricardo tidak mengelak posibilitas dalam pengembangan teknologi pertanian, tetapi menganggap bahwa hal itu akan sangat dibatasi oleh skala pengembalian yang menurun (*decreasing return to scale*) dalam produksi sektor pertanian dalam jangka panjang. Anggapan itu terbentuk ketika perkembangan teknologi pertanian utamanya hanya didasarkan kepada pengalaman maupun coba-coba dari para petani.

Namun fakta **s**ejarah telah membuktikan bahwa melalui penerapan ilmu pengetahuan secara terorganisir terhadap pemecahan masalah produksi pertanian (yang dimulai pada akhir abad ke 19), kemajuan teknologi dalam pertanian telah mengalami percepatan secara nyata sehingga tingkat pertumbuhan dalam produktivitas pertanian telah melebihi dari apa yang sebelumnya dicapai oleh negara-negara industri maju kala itu. Karena itu negara-negara berkembang menurut Hayami (2001) agar dapat eksit dari perangkap Ricardian Trap, maka pola pertumbuhan produktivitas pertanian dari negara-negara maju di masa lalu dengan melakukan investasi dalam bidang sumberdaya manusia dan riset untuk mengembangkan akumulasi pengetahuan dalam teknologi budidaya agar dapat melakukan transformasi struktural melalui batu pijakan sektor-sektor industri pertanian.

Sebagaimana diungkapkan oleh Stimson dan Stough (2008) bahwa dengan demikian kini proses transformasi struktural tersebut keberhasilannya sangat tergantung pada kemampuan wilayah untuk mencapai surplus produksi sektor pertanian dan ekstraksi SDA (sebagai *Re=Resource endowment* atau sumberdaya warisan) agar mencapai keunggulan kompetitifnya sehingga mampu bersaing di pasar global. Karena itu tinjauan terhadap kinerja *Re* dan pasar ekspor (*M*) menjadi variabel yang sangat penting pada awal proses transformasi struktural tersebut.

2.2.4 Model Maksimalisasi Utilitas Rumah Tangga

Teori ini menggunakan 3 tahapan dalam menjelaskan model pembangunan berkelanjutan, yaitu meliputi: (i) Fase awal yang dimulai dengan perekonomian agraris dan perekonomian berbasis eksploitasi SDA, (ii) Fase ke dua, proses transisi perekonomian dari agraris ke perekonomian industri pengolahan, dan (iii) Fase ke tiga ketika perekonomian telah menjadi negara industri maju.

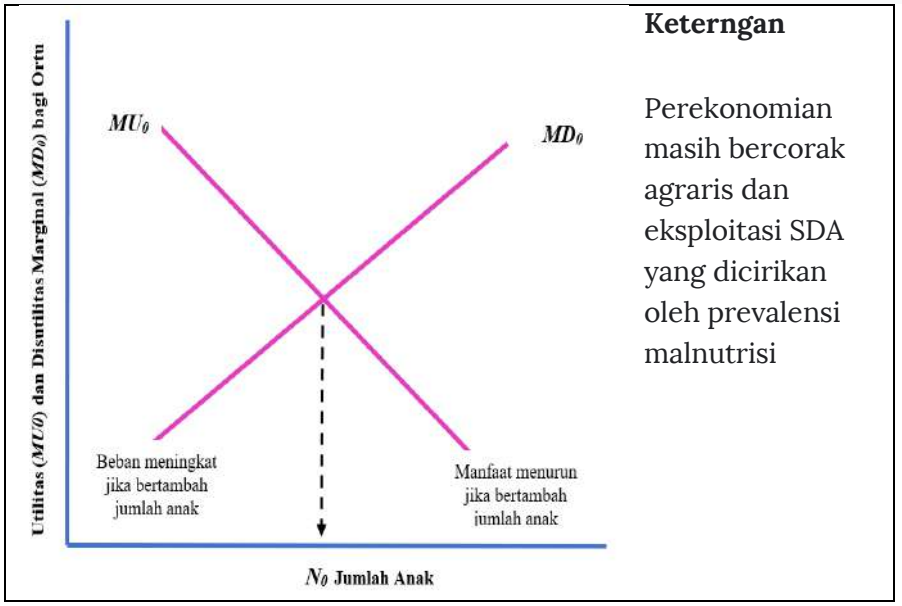

Gambar 2.5. Fase Awal Pembangunan Perekonomian

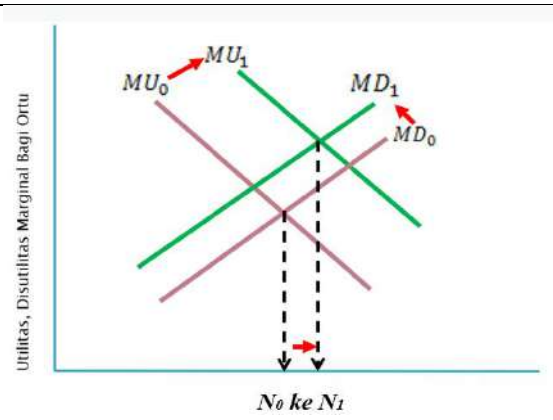

Keterangan

Pembangunan dapat berdampak pada peningkatan pendapatan rumah tangga, perbaikan nutrisi dan meningkatknya fertilitas pasangan usia subur, maka akan terjadi kenaikan populasi dari N_o ke N_1

Gambar 2.6. Fase 2 Transisi ke Agroindustri: Penurunan Jumlah Populasi dari N_o ke N_1

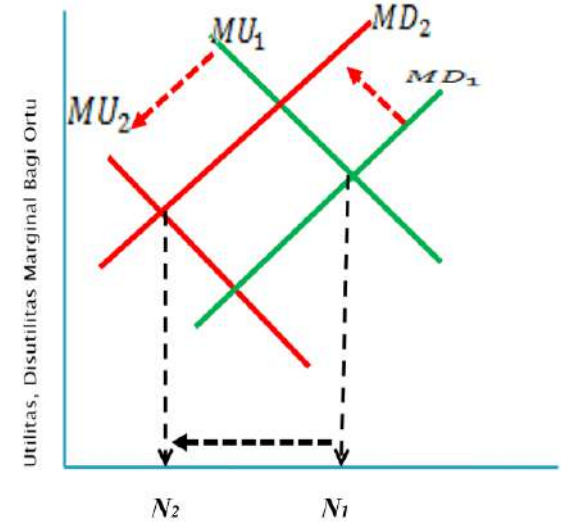

Keterangan

Biaya perawatan anak sangat mahal, institusi asuransi hari tua dapat mereduksi kekawatiran orang tidak terurus oleh anak-anaknya disertai dengan meningkatnya panti-panti jompo, maka terjadi penurunan populasi dari N_1 ke N_2 umumnya jumlah penduduk usia tua dominan seperti piramida terbalik

Gambar 2.7. Fase 3 Ketika Telah Menjadi Negara Industri Maju akan Terjadi Penurunan Jumlah Populasi dari N_1 ke N_2

Pada fase awal, perekonomian banyak mengandalkan eksploitasi SDA dan pertanian tradisonal. Fase ini dicirikan oleh masalah prevalensi malnutrisi (Puspaningrum, 2022; Bakri dkk, 2018; Saputri dkk, 2015) dan masalah kesehatan (Sriyani, dkk, 209; Hartuti dkk, 2019; Pelita dkk, 2019; dan Saputri dkk, 2015). Berarti pula banyak terjadi Kedua masalah ini disebabkan oleh tingkat pendapat per kapita yang masih rendah. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi diikuti dengan peningkatan tabungan nasional (tabungan masyarakat + tabungan pemerintah) maka dapat digunakan untuk investasi publik termasuk infrastruktur (jalan, jembatan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi pelabuhan, bendungan, persenjataan dsb), untuk pendidikan, pengendalian degradasi lingkungan dll. Dalam keadaan ini perekonomian mulai berkembang dan beralih dari agraris + eksploitasi SDA) menjadi perekonomian agroindustri (Gambar 2.5).

Selanjutnya *public investment* ini akan diikuti oleh berbagai *private investment*, menciptakan lapangan kerja, menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat, maupun pendapatan pemerintah diikuti dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu masalah malnutrisi, kesehatan, masalah sosial, dan masalah keamanan makin di atasi. Dengan begitu pula tatanan kelembagaan yang mengatur hubungan antarorang atau pun orang dengan organisasi dan juga antarorganisasi dapat dikuatkan. Dengan kata lain suprastruktur semakin baik dalam memberikan rasa saling percaya (*trust*) dalam berelasi antarpihak. Dalam keadaan ini perekonomian mulai berkembang dan beralih dari perekonomian agroindustri menjadi perekonomia yang telah dominan (Gambar 2.6).

Dalam situasi infrastruktur maupun suprastuktur yang makin menguat disertai pula dengan ketercukupan tabungan nasional ditambah pula meningkatnya kepercayaan (*trust*) internasional (biasanya diiringi dengan penyaluran pinjaman) serta FDI (*foreign direct investment*) maka perekonomian mulai memasuki corak *manufacturing industry.* Perekenomian bercorak *manufacturing industry* ini tidak memerlukan luasan lahan yang relative ekstensif dibandingkan dengan perekonomian agroindustri maupun

perekonomian agraris. Artinya dengan luasan lahan yang relatif sempit saja akan mampu menghasilkan rente perekonomian yang jauh lebih besar, yang berarti dapat untuk melebihi tuntutan kebutuhan individu warga negara di atas level kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasar. Fase ini akan ditandai dengan banyaknya lahan-lahan pertanian yang dilepas oleh banyak warga negara karena memasuki dunia kerja di berbagai sektor industri maupun berbagai sektor jasa modern seperti keuangan, akuntan, insinyur, asuransi pendidikan, kesehatan dll. Dengan begitu maka ada sebagian kecil warga negara yang tetap menjalani penghidupan sebagai petani akan mempunyai kesempatan untuk melakukan konsolidasi lahan sehingga mempunyai lahan garapan yang sangat luas.

Berkaitan dengan proses konsolidasi lahan tersebut, menurut Eastwood dkk (2010) pada saat negara-negara industri maju beranjak dari negara agraris memasuki ke negara yang bercorak industri pengolahan rata-rata pemilikan lahan untuk kawasan Amerika Bagian Tengah rata-rata 10,7 ha per KK sedangkan untuk Eropa sekitar 32,2 ha per KK, bahkan untuk Amerika Utara mencapai 178,4 ha per KK. Sedangkan untuk negara-negara Asia Selatan hanya sekitar 1,4 ha dan negara-negara Asia Tenggara hanya sekitar 1,8 ha saja. Implikasi dari penguasaan lahan yang relatif besar ini, maka peningkatan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian selalu melebihi yang bekerja di sektor industri yang berarti sektor pertanian selalu dapat mengalami surplus dan mampu menopang sektor-sektor industri dan jasa di bagian hilir system perekonomian secara berkesinambungan.

Peningkatan konsolidasi luasan lahan yang semakin meguat tersebut ditopang oleh semakin menyusutnya jumlah penduduk yang pada umumnya telah bertransformasi menjadi pekerja dalam sektor-sektor modern. Menyusutnya jumlah penduduk ini menyebabkan konsolidasi luasan lahan untuk budidaya pertanian yang semakin besar, sehingga umumnya petani banyak menguasi lahan yang luas. Konsolidasi luasan kepemilikan lahan per rumah tangga ini diperkuat oleh semakin menyusut jumlah penduduk ketika suatu negara mulai menapaki menjadi negara industri

manufaktur seperti telah diuraikan sebelumnya. Dengan begitu juga berarti perekonomian menjadi tidak banyak memerlukan luasan lahan yang ekstensif. Karena itu pula degradasi sumberdaya lahan, seperti erosi, banjir, kekeringan ataupun degradasi lingkungan lainnya juga berkurang. Bahkan banyak sekali lahan-lahan yang menjadi hutan kembali karena ditinggalkan penggarapnya beralih mata pencaharian ke sektor-sektor yang bisa memberikan pendapatan yang lebih tinggi.

Semakin lama menjadi negara industri manufaktur, semakin konsolodasi lahan semakin besar, pertumbuhah produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian semakin melampaui produktivitas produksi sektor moderen (sektor industri manufaktur dan jasa-jasa). Pada Tabel 2.1 disajikan fakta pertumbuhan tingkat produktivitas tanaga kerja di sektor pertanian yang melampaui sektor modern di beberapa negara kapitalis yang menunjukkan indikator kebersinambangunan yang kuat.

Sebagaimana dapat dicermati pada Tabel 2.1 tersebut bahwa, kecuali Jepang, bahwa di negera-negara maju pertumbuhan pendapatan per kapita para pekerja di sektor pertanian selalu di atas pertumbuhan pendapatan per kapita yang bekerja di sektor industri. Fakta ini memberikan makna bahwa produktivitas tenaga sektor pertanian harus surplus agar pertumbuhan industri dapat ditopang oleh sektor pertanian. Dengan begitu industri (sebagai tulang punggung bagi pemenuhan kebutuhan aspirasi manusia yang paling efisien) akan terus tumbuh secara berkesinambungan. Tentang fenomena Jepang, sebenarnya pada tahun 1990 dimana saat itu ada defisit relatif kecil yaitu -0.04%, nampaknya dalam posisi kritis.

Tabel 2.1. Pertumbuhan (%) pendapatan per kapita para pekerja di sektor pertanian dan sektor industri untuk kelompok negara maju *versus* negara berkembang 1960-1990

No.	Negara Maju (1-5) *versus* Negara Berkembang (6-8)	Pertanian [A]	Industri [B]	Selisih [A]-[B]
1	USA	3,6	3,3	0,3
2	Inggris	3,9	3,2	0,7
3	Perancis	5,7	3,6	2,1
4	Jerman Barat	5,9	3,4	2,5
5	Jepang	5,1	5,5	-0,4
6	Korea Selatan	3,4	7,1	-3,7
7	Philippines	1,7	6,4	-4,7
8	India	1,6	3,2	-1,6

Sumber: Hayami dan Godo (2006)

Kemudian ternyata Jepang mampu melewati posisi tersebut dan masih berkesinambungan sampai kini. Untuk level provinsi, Bakri (2012) di Provinsi Lampung juga memberikan kesimpulan yang sangat mirip.

Sebagai akhir dari bab ini, penting untuk dicatat di sini, bahwa keberlanjutan sistem perekonomian berbasis pada ideologi kapitalisme ini dapat bertahan hingga era RI 4.0 atau bahkan RI 5.0 ini banyak ditopang oleh institusi pasar dimana ada sekelompok orang yang selalu tertarik pada insentif pada oportunitas untuk selalu meraup keuntungan yang benar-benar baru. Kelompok ini dikenal sebagai wirausahawan alias *entrepreneur* (Hien, 2010).

BAB III
KEWIRAUSAHAAN SEBAGAI DETERMINAN KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN

3.1 Peranan Kewirausahaan dalam Pembangunan Ekonomi

Istilah kewirausahaan dalam Bahasa Inggris setara dengan (*Entrepreneurship*), yang selanjutnya ditulis dengan *E*. Pasti ini menyangkut karakter dari seseorang yang menurut Stimson dan Stough (2008) adalah orang mampu melihat dan mampu mewujudkan ada suatu keuntungan yang benar-benar baru dalam sistem perekonomian pasar, bukan orang yang meniru praktek kegiatan yang bermotif ekonomi yang telah ada. Dengan demikian orang yang berjiwa *entrepreneurship* selalu dituntut untuk selalu melakukan inovasi. Alasan utamanya karena setiap inovasi maka akan selalu diikuti dengan *profit taking*. Setelah itu akan diikuti oleh adanya praktek yang meniru dengan cara membuat produk yang serupa. Bahkan seringkali yang meniru, atau produk yang datang belakangan bisa mempunyai kualitas lebih baik dari pada produk yang mendahuluinya. Sebagai contoh dalam emisi telepon seluler misalanya, yang paling awal muncul adalah merek Ericson dan Motorola pada awal tahun 1990-an. Tak lama kemudian muncul Nokia yang pada awal tahun 2010 juga menghilang dari pasaran.

Demikian pula untuk para pelaku atau penyedia jasa ekowisata, akan selalu dituntut menyedia produk-produk yang inovatif. Produk-produk kerajinan, *souveneer*, *handy craft*, tampilan produk-produk kuliner, ornamen hidangan dan kue-kue bahkan atraksi dan permainan serta berbagai bentuk layanan haruslah selalu

dikemas dalam bentuk selalu baru. Apalagi pada era ICT seperti dewasa ini, sajian produk barang dan jasa yang dipasarkan dalam setiap kegiatan wisata akan mudah ditiru oleh berbagai pihak di seantero dunia. Tuntutan untuk melakukan inovasi dalam dunia wisata akan semakin besar agar bisnis tersebut tetap dapat *survive* dan berkelanjutan. Sebagaimana telah diungkapkan pada bagian sebelumnya, bahwa kemampuan dari sektor wisata dalam menggerakan berbagai sektor hulu maupun hilir maka maraknya inovasi di sektor wisata ini akan menjadi harapan bagi keberlanjutan penyerapan tenaga yang terus tumbuh hingga mencapai RI 4.0 yang ditandai oleh penyusutan pertumbuhan jumlah penduduk seperti dijelaskan dalam teori utilitas rumah tangga pada bab sebelumnya.

Dalam konteks itu, sebagaimana diungkapkan oleh Hayami dan Godo (2006) bahwa subsistem sebagai syarat perlu (Gambar 2.1). Maka *E* merupakan variabel yang menjadikan penentu dari awal keberlanjutan dari setiap peradaban. Untuk itu maka pengertian tentang *E* ini menjadi sangat penting untuk dipahami dalam setiap kebijakan untuk pengembangan ekoturisme secara berkelanjutan,

Menurut Kitzner (1973 dikutip Hien, 2010) bahwa kewirausahaan atau *E* adalah kesiagaan (*alertness*) terhadap adanya oportunitas akan kemungkinan munculnya suatu profit baru. Lebih lanjut menurut Hien (2010) bahwa definisi yang kini telah diterima secara meluas tentang *E* adalah definisi yang dikemukakan oleh (Shane dan Venkataraman, 2000 dikutip Hien, 2010): adalah suatu proses penemuan dan proses eksploitasi terhadap oportunitas kemungkinan munculnya suatu profit baru yang belum diketahui oleh siapapun di dalam pasar. Oportunitas akan keuntungan baru berarti bukan yang muncul dari kerangka cara-akhir dari tindakan orang yang sudah ada (*existing means-end framework*). Di sini *mean-end frame* perlu dipahami sebagai cara berpikir tentang hubungan antara aksi dengan *output* (Hien, 2010).

Mengingat faktor *E* berkaitan erat dengan berbagai oportunitas yang baru, maka oportunitas tersebut memerlukan tindakan orang secara aktif dalam menciptakan suatu *means-end framework* ketimbang hanya mengoptimalkan *framework* lama yang sudah ada. Kata kesiagaan (*alertness*) dalam definisi yang

dikemukakan oleh Kizner punya implikasi bahwa E harus 'menemukan' (*discover*) oportunitas baru dari stok pengetahuan yang ada. Dalam pengertian ini juga berarti bahwa oportunitas yang ditemukan oleh para *entrepreneur* itu "sudah ada di sana", yang merupakan produk dari suatu proses pasar. Para partisipan pasar yang lain tidak mampu untuk menemukenali (*recoginizing*) terhadap *means-end framework* yang ada, dan oleh karena itu, oportunitas itu sebenarnya sedang menunggu orang lain yang menggunakan *local knowledge* yang dimiliki untuk menemukannya melalui penciptaannya (Acs dan Storey, 2004).

Menurut Hien (2010) walaupun konseptualisasi E dari Shane dan Venkataraman (2000, dikutip Hien, 2010) secara luas sudah banyak diterima, namun operasionalisasi dari konsep ini sulit dilakukan dalam riset empiris. Oportunitas merupakan sesuatu yang tidak dapat diobservasi. Penemuannya maupun eksploitasinya pun demikian, tidak dapat diamati. Karena itu para peneliti berupaya untuk menemukan indikator yang mencerminkan sebanyak mungkin keluaran yang menciri/efek dari proses penempaan untuk mempunyai karakter sebagai E tersebut. Indikator tersebut meliputi inovasi, *risk-taking*, ataupun berbagai perkembangan perekonomian di suatu wilayah. Dengan begitu maka kini ada banyak perbedaan di dalam *conceptual frameworks* tentang E diantara para teoritikus terhadap para peneliti empiris dalam menggunakan indikator untuk mengukur E. Ada suatu rentang indikator dalam pengukuran yang dapat dipilih oleh para peneliti yang salah satunya ataupun beberapa untuk melakukan studi empiris, tak masalah dengan kerangka teori yang mereka pegang: apakah beraliran Schumpeterian, Kiznerian ataupun Knightian ataupun aliran lainnya.

Dalam riset empiris, konsep kinerja E umumnya sering digunakan. Kinerja dari E umumnya mencerminkan upaya proses pembentukan jiwa *entrepreneurial*. Dalam pengertian ini, kinerja tersebut sebenarnya merupakan suatu *outcome* dari berbagai proses yang telah berlansung,m bukan dari suatu proses tunggal. Sehubungan dengan ini, maka pengukuran kinerja E bisa bertindak sebagai proksi bagi kekuatan dari kinerjanya. Misalnya, *self-employment* dan *new firm entry* merupakan 2 macam ukuran yang

digunakan untuk merefleksikan kinerja *E*. Sementara itu, *survival*, *growth*, *profitability* dan *initial public offering* seringkali diadopsi untuk mengukur kinerja *entrepreneurial*.

Secara simultan, aspek-aspek tersebut di atas juga dapat digunakan untuk mengukur *E* (Shane *dkk*., 2003 dikutip Hien, 2010). Dalam konteks ini indikator *E* dapat dibagi kedalam 2 kelompok menurut unit analisis yang digunakan: (i) pada level individual yang diturunkan dari karakteristik individual seperti *self-employment* atau kepemilikan bisnis, dan (ii) pada level bisnis yang didasarkan pada catatan statistik perusahaan seperti laju entri-eksit dalam bisnis.

3.2 Pengukuran Faktor *Entreprenuership* pada Tataran Individu

Ukuran pertama *E* pada tataran individual adalah banyaknya orang atau tingkat mempekerjakan diri sendiri (*self-employment*). Dalam tataran ini *E* didefinisikan sebagai rasio jumlah *self-employment* terhadap angkatan kerja. Cara ini telah digunakan untuk membandingkan *E* antarnegara atau antarwilayah. Penggunaan yang meluas ukuran *E* pada level individu ini sebagian didorong oleh keserupaan definisi antarnegara (OECD, 2000).

Keuntungan utama penggunaan *self-employment* ini setidaknya dapat menangkap sebagian dari sejumlah orang yang telah melakukan aktivitas tahap awal dengan cara membuat pilihan pekerjaan untuk dirinya sendiri. Namun ada beberapa keterbatasannya di sini. Pertama, laju *self-employment* dapat dikendalikan oleh faktor-faktor lain yang mempengaruhi orang untuk pindah dari orang upahan ke *self-employment* ini; misalnya menjadi *self-employment* disebabkan oleh ketiadaan oportunitas pekerjaan, bukan karena memang pilihannya untuk menjadi *self-employment*. Kedua, ada masalah statistik dalam laju *self-employment* yang sangat dipengaruhi oleh struktur industri dan komposisi demografi tiap wilayah yurisdiksi (Hien, 2010).

Sejumlah alternatif indikator didasarkan pada perubahan dalam *self-employment* yaitu ukuran transisi. Ukuran yang paling mendasar adalah laju entri-eksit ke *self-employment* sebagaimana yang digunakan oleh OECD (2000). Indikator lain yang

mencerminkan dinamisnya pendekatan *E* adalah *Total Entrepreneurial Activity* (TEA) indeks yang dihitung oleh *Global Entrepreneurship Monitor* (GEM). Ukuran ini ditentukan oleh pangsa populasi dewasa yang terlibat dalam penciptaan enterprise dalam periode waktu tertentu. Jika dibandingkan dengan laju entri ke *self-employment*, maka keuntungan dari survai *GEM* adalah bahwa isu *owner-manager* dari penggabungan bisnis (*incorporated business*) bisa diminimalisir seperti survai yang fokus pada seluruh individu yang terlibat dalam fase *start-up*.

Ukuran lain bagi aktivitas *E* lebih berfokus kepada penciptaan pertumbuhan seperti pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan profit dan pertumbuhan lapangan pekerjaan adalah dengan cara untuk mendefinisikan dan untuk melakukan pengukuran *E* sebagai orang-orang utama pada saat *pre-startup*, saat *startup* dan fase awal dari suatu bisnis. Definisi ini lebih condong ke arah *aktivitas E* awal dan *startup* karena ukuran-ukuran itu merupakan target untuk pengukuran kebijakan. Namun ada perubahan yang cukup besar dan inovasi yang disumbangkan oleh *incumbent entreprise* kepada semua ukuran, ataupun apa yang seringkali ditunjukkan sebagai *E* (Acs dan Storey, 2004).

3.3 Pengukuran Kinerja *Entrepreneurships* pada Tataran Bisnis

Suatu keunggulan pengukuran dalam level bisnis adalah dalam hal penyertaan pemilikan tunggal selain dari *incorporated business*. Laju lahir-matinya bisnis ataupun jumlah (*turnover*) dan perbedaan (*net birth*) merupakan indikator umum yang sering digunakan pada level bisnis. Indikator-indikator ini mencerminkan proses memulainya suatu *enterprise* yang baru. Keunggulan utama penggunaan laju kelahiran bisnis sebagai indikator *E* adalah pada keterwakilannya dari cara-cara utama dari berbagai macam orang yang membawa berbagai ide kedalam pasar. Perlu dibedakan di sini, penciptaan bisnis yang baru adalah untuk merepresentasikan suatu mekanisme yang digunakan oleh para *entrepreneur* dalam mengumpulkan, menggabungkan dan dalam mengkombinasikannya

untuk membuat ide-ide agar mempunyai nilai komersial (Hien, 2010).

Keterbatasan utama penggunaan kreasi bisnis sebagai indikator *E* adalah tidak diketahuinya kelas ukuran bisnis seberapa yang paling sesuai. Di lain pihak, ketika kembali ke tataran empiris, beberapa persoalan sering muncul. Misalnya, sulitnya menemukan apakah suatu entri itu merupakan fakta suatu perusahaan baru ataukah merupakan hasil dari suatu merger; ataupun masuknya perusahaan hanyalah salah satu dari tugas-tugas *E* yang tidak perlu menunjukkan derajat yang sama dari inovasi diantara berbagai negara (Hien, 2010).

Kepemilikan bisnis (yang menjadi ukuran jumlah ataupun laju *employer-owned business*), sering digunakan sebagai alternatif bagi *self-employment*. Serupa dengan laju *self-employment*, indikator ini sering digunakan untuk mengukur jumlah orang yang telah meninggalkan *wage-based employment* dan telah mengambil resiko untuk memulai kepemilikan bisnisnya. Penting untuk membedakan antara *self-employment* terhadap kepemilikan bisnis. Keduanya merupakan konsep yang berbeda dengan beberapa interseksi. *Self-employment* didefinisikan sebagai penampilan kinerja pekerjaan untuk keuntungan secara personal ketimbang bekerja karena dibayar oleh orang lain; *self-employed person* adalah bekerja untuk dirinya sendiri ketimbang untuk orang lainnya ataupun untuk perusahaan (Shane dan Echardt, 2003 dikutip Hien, 2010).

Sementara itu *ownership* merujuk kepada bagaimana suatu bisnis didirikan secara legal. Suatu kepemilikan bisnis tidak memerlukan penanganan langsung (*hand-on approach*) dalam operasionalnya sehari-hari bagi perusahaannya, sedangkan untuk *self-employed person* harus memanfaatkan pendekatan yang sangat memerlukan penanganan langsung agar dapat survive. Akibatnya, studi tentang *self-employment* dapat meliputi situasi dalam *self-employed person incorporate* suatu bisnis dan memperkerjakan orang lain, juga dalam berbagai situasi yang mana hal-hal tersebut tidak muncul. Sedangkan studi tentang kepemilikan bisnis mencakup suatu rentang dari yang biasanya *small self-employer owned bussiness* (kepemilikan tunggal) sampai ke rentang bentuk-

bentuk kepemilikan bisnis yang besar yang terdaftar secara legal seperti kemitraan (*partnership*), koperasi, dan korporasi (Hien, 2010).

Lebih lanjut menurut Hien (2010), bahwa secara empiris ada dua macam konsep yang seringkali digunakan dan saling dipertukarkan sebagai ukuran E. Beberapa peneliti memfokuskan pada studi tentang *self-employment*; sedangkan beberapa peneliti lainnya mendefinisikan *entrepreneur* sebagai pemilik bisnis. Perbedaan antarkedua kelompok tersebut tidak begitu penting untuk diterapkan di negara-negara maju. Namun secara empiris memperlihatkan bahwa kepemilikan bisnis berbeda dalam cara-cara yang penting terhadap *self-employment* di negara-negara berkembang. Oleh van Praag *dkk*., (2002) ditunjukkan kasus di Kolombia bahwa *self-employment* dalam sektor-sektor informal lebih menjamur dari pada kepemilikan bisnis di sektor-sektor informal, dan kepemilikan bisnis berasosiasi dengan E sedangkan *self-employment* secara mendasar merupakan suatu aktivitas yang subsisten sifatnya.

Harapan yang diinginkan ketika indikator kepemilikan bisnis ini digunakan adalah bahwa pada level yang lebih tinggi kepemilikan bisnis menunjukkan suatu wilayah *entrepreneurial* yang lebih banyak yang dimana orang lebih siaga terhadap berbagai oportunitas *entrepreneurial* yang mungkin muncul. Kepemilikan bisnis merupakan ukuran yang ideal karena dapat meniadakan akan keperluan untuk mengukur kelas (besar-kecilnya) perusahaan. Ukuran ini juga dapat digunakan untuk menggambarkan derajat aktivitas *entrepreneurial* (Hien, 2010).

Menurut Fritsch (2008) ukuran tersebut merupakan proksi yang sangat bermanfaat bagi aktivitas *entrepreneurial* ketika melakukan pembandingan lintas negara maupun antarwaktu. Namun hal itu tidaklah jelas bagaimana caranya untuk membedakan struktur kepemilikan dan pengaturan yang akan diukur. Ketika melakukan interpretasi terhadap ukuran-ukuran itu, maka pembuatan bersama semua tipe terhadap berbagai aktivitas yang heterogen sifatnya untuk sepanjang spektrum sektor yang luas dan konteksnya dalam ukuran yang terpisah ataupun ukuran yang

tersendiri. Ukuran tersebut memandang semua bisnis adalah sama, baik itu bisnis yang menggunakan teknologi tinggi maupun teknologi sederhana. Dalam hal ini tidak memperhitungkan pengaruh besarnya industri ataupun dampak dari industri yang ukurannya beragam. Di lain pihak, itu hanya mengukur stok bisnis dan bukanlah *start up* yang baru.

Laju pertumbuhan dan survivalnya perusahaan baru juga merupakan ukuran yang umum untuk menggambarkan kuat-lemahnya suatu *E* di suatu wilayah. Rasio pertumbuhan bisnis baru terhadap total bisnis yang ada dalam suatu perekonomian telah digunakan untuk melakukan karakterisasi *E*. Namun landasan teori terhadap ukuran-ukuran tersebut agak terbatas. Tidaklah pasti, apakah suatu tingkat *survive* yang besar merupakan suatu indikator besar-kecilnya kekuatan *E*. Memang benar bila suatu tingkat survival yang lebih lama itulah yang bisa dijadikan indikator bagi cerminan tingginya jiwa *entrepreneurial* perekonomian di suatu wilayah (van Praag *dkk*., 2002).

Ukuran-ukuran lain bagi *Entrepreneur* lebih difokuskan pada perubahan yang berasosiasi dengan berbagai aktivitas inovasi dalam suatu industri. Ukuran-ukuran tersebut mencakup indikator aktivitas *research and development*, jumlah penemuan paten, dan produk inovasi baru yang diperkenalkan ke dalam pasar. Ukuran-ukuran ini punya keunggulan termasuk hanya perusahaan-perusahaan yang secara aktual membangkitkan perubahan inovatif pada level industri saja yaitu pada level di luar perusahaan itu sendiri. Namun, berbagai ukuran semacam itu harus selalu dikuantifikasi oleh kegagalannya dalam menggabungkan jenis-jenis yang signifikan tentang aktivitas yang inovatif dan perubahan tidak dicerminkan oleh ukuran-ukuran semacam itu (Hien, 2010).

3.4 Peranan *Entrepreneurship* dalam Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Hein (2010) meskipun peranan *E* telah ditemukenali (*recognized*) oleh beberapa ekonom terkenal seperti Schumpeter, Knight, dan Mises tetapi baru beberapa tahun belakangan saja secara sistematis *E* diusulkan sebagai faktor tambahan dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Beberapa ahli belakangan ini

memposisikan faktor *E* pada bagian utama sebagai komponen yang ke empat yang baru dari "N*ew Growth Theory*" yang dikenal sebagai *entrepreneurial capital* (*EC*), selain *traditional capital*, *labor*, *knowledge* pada tatanan riset regional. *EC* dapat didefinisikan sebagai *kemampuan suatu sistem perekonomian di suatu wilayah dalam membangkitkan segala aktivitas entrepreneurial.* Pengertian ini mencerminkan begitu luasnya rentang aspek legal, faktor (*I*)*nstitusi* maupun faktor sosial. Unit spasial yang relevan untuk melakukan pengukuran terhadap *EC* biasanya bisa negara, wilayah ataupun kota sebagai unit analisisnya. Walaupun pengukuran *EC* bersifat multifaset dan heterogen sifatnya, tetapi pengukuran tersebut mengejawantah (*manifests*) dengan sendirinya dalam munculnya berbagai perusahaan baru (*the start up new enterprises*).

Ada 3 saluran bagaimana kinerja *E* yang secara positif dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu: (i) meningkatkan inovasi dan *knowledge spillover*, (ii) meningkatkan kompetisi, serta (iii) meningkatkan keragaman dalam berbagai sektor perekonomian maupun melalui munculnya keragaman perusahaan. Melalui saluran yang pertama, *E* merupakan mekanisme yang dapat meningkatkan permeabilitas kedapnya filter pengetahuan, memfasilitasi *the spillover of new knowledge* yang pada akhirnya membangkitkan aktivitas perekonomian untuk mencapai surplus dan pertumbuhan ekonomi Acs dan Storey (2004). Pengetahuan baru punya suatu pengaruh positif secara langsung pada perkembangan perekonomian wilayah dan secara tidak langsung punya pengaruh positif terhadap perilaku *E*. Sebagai bagian dari pengetahuan baru yang akan digunakan oleh para pengusaha *entrepreneur*, maka kinerja *E* akan meningkatkan daya eksploitasinya terhadap pengetahuan baru sebegitu rupa sehingga punya dampak positif terhadap kinerja perekonomian di suatu wilayah.

Namun, kapasitas suatu perekonomian dalam membangkitkan perilaku *entrepreneurial* yang produktif tersebut dibentuk oleh perluasan *EC* yang melandasinya. Perilaku *entrepreneurial* melibatkan *start up and growth of new enterprises* yang bertindak sebagai suatu mekanisme bagi *knowledge spill-over* dari sumber

asalnya. Teori imbasan pengetahuan (*knowledge spill-over*) telah memposisikan *entrepreneurship* sebagai hasil dari oportunitas yang tercipta melalui aktivitas kreatif dalam suatu usaha atau ventura. Artinya setiap perusahaan yang baru melakukan langkah adaptasi dengan mengembangkan kapasitasnya terhadap ide-ide baru ataupun ide-ide yang telah diterapkan oleh berbagai perusahaan lainnya, haruslah bisa mendayagunakan *resource endowment* yang ada. Ide-ide baru semacam ini umumnya dihasilkan melaui berbagai riset yang dilakukan oleh kalangan universitas (Agarwal dkk, 2007).

Selain itu dapat ditempuh melalui saluran yang ke dua, yaitu *entrepreneur* bisa meningkatkan daya kompetitifnya dalam menerapkan ide-ide baru yang melekat pada agen-agen ekonomi yang memfasilitasi masuknya beberapa perusahaan yang baru muncul dengan cara memilih spesialisasi dalam ceruk teretentu pada suatu wilayah tertentu pula. Dengan begitu maka kinerja *entrepreneurship* di setiap wilayah akan meningkat akibat dari adanya keragaman jenis industri maupun adanya peningkat berbagai inovasi. (Hien, 2010).

Dalam konteks itu, menurut Fritsch (2008) pengaruh peningkatan kinerja *entrepreurship* tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sutau wilayah dapat tergerak melalui 4 mekanisme: (i) efek turbulensi kinerja pertumbuhan perekonomian, (ii) efek peningkatan *magnitude* seberaran *entrepreurship* di suatu wilayah yang diiringi oleh peningkatan kinerja perekonomian, dan (iii) efek kompetisi memperebutkan pangsa pasar, dan yang terakhir adalah (iv) efek maraknya pertumbuhan s*elf-employemen* sebagai pengiringnya yang sifatnya turbulen.

Pada level industri situasi *entry-exit turnover* hanya akan berdampak secara signifikan bagi peningkatan produktivitas dalam jangka panjang (Hien, 2010). Dalam tataran ini pula Brixy and Grotz (2006 dalam Hien, 2010) menunjukkan bahwa efek turbulensi tersebut akan mempengaruhi *total factor productibity* (TFP) bukan dalam sektor produk barang yang *tangibel* melainkan dalam sektor jasa-jasa, tidak terkecuali jasa wisata. Sedangkan pada level wilayah peningkaytan aktivitas *entreprenurship*, umumnya sangat

berdampak positif pada pertumbuhan lapangan pekerjaan terutama sekali nampak usaha *start up* (Acs dan Storey, 2004). Banyak riset yang melaporkan bahwa kepeloporan usaha kecil-menengah (UKM) yang mendongkak pertumnbuhan lapangan pekerjaaan, peningkatan pajak, menurunkan pengangguran, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi, baik itu pada level industri maupun level wilayah punya, yang merupakan efek pengiring peningkatan kinerja *entrepreneurship* tersebut (OECD, 2000).

Sebagai tambahan bahwa menurut Hien (2010) banyak hasil riset yang mengkaji dampak dari pembangunan ekonomi pada peningkatan kinerja *entrepreneurship*. Namun demikian, kajian tersebut hasilnya masih baur tergantung pada ukuran yang diterapkan untuk memproksi pembangunan ekonomi yang digunakan seperti GDP per kapita, pertumbuhan lapangan kerja, atau pun pening produktivitasnya.

BAB IV
PROGRAM PEMBANGUNAN PBB DAN PENGEMBANGAN JASA EKOWISATA GLOBAL

4.1 Kerjasama PBB untuk Penghapusan Kemiskinan dan Degradasi Lingkungan

4.1.1 Peran PBB dalam Penghapusan Kemiskinan

Indikator capaian kinerja pembangunan ekonomi pada negara dapat diukur dengan sedikitnya jumlah angka kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan menunjukkan kegagalan negara dalam mengatasi salah satu persoalan ekonomi masyarakat. Salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat yaitu dengan cara membuat barang komoditi dan jasa yang dapat di produksikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dalam tiap negara merupakan salah satu ukuran kinerja pembangunan ekonominya.

Globalisasi mendorong setiap daerah berkompetisi melaksanakan pembangunan. Pembangunan menjadi salah satu strategi daerah mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah untuk membuka jalan mengatasi kemiskinan. Kerjasama internasional daerah merupakan salah satu strategi mengatasi kemiskinan sekaligus mengurangi ketergantungan kepada pendanaan pusat. Kerjasama internasional daerah juga menjadi sarana untuk mengembangkan potensi daerah.

Permasalahan kemiskinan pada dasarnya merupakan fenomena klasik yang hingga saat ini menjadi perhatian utama negara-negara di dunia. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah diupayakan dan digagas, baik oleh pemerintah maupun organisasi di luar pemerintah (sektor swasta, NGO, *donor agency*). Bahkan organisasi dunia seperti PBB telah mendorong negara-negara di dunia untuk memerangi musuh kemiskinan melalui berbagai forum. Diantara hasilnya ialah telah dicanangkannya *Millenium Development Goals* (MDGs) sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan dalam memerangi kemiskinan. Untuk mereduksi kesenjangan ekonomi ini tidak hanya sekedar dengan meningkatkan produksi dan kekayaan saja, akan tetapi yang lebih mendesak adalah untuk memperbaiki distribusinya agar optimal, karena sebenaranya kesenjangan tersebut berwaral dari ketidakmerataan atas pendistribusian hasil-hasil pembangunan (Syaputra, 2016) yang sebenarnya merupakan hasil kerja secara bersama.

Kelanjutan dari MDGs adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan kerangka pembangunan ekonomi yang baru dengan tujuan untuk mengakomodasi semua perubahan pada semua negara. Dengan demikian SDGs) sangat tepat sebagai instrumen baru dalam mengatasi permasalahan global tersebut. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia menyetujui untuk menjadi s*takeholder* dan ikut serta dalam melakukan perjanjian dengan PBB untuk melaksanakan dan merealisasikan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) secara bersama (Trihano, 2015).

Pembangunan berkelanjutan (SDGs) merupakan rencana aksi untuk umat manusia, planet dan kemakmuran yang bertujuan untuk memperkuat perdamaian universal dalam kebebasan yang sangat luas tanpa ada yang di marjinalkan oleh kelompok tertentu. Singkatnya adalah pembangunan bereklanjutan (SDGs) di rancang untuk mengatasi kemisikinan yang terjadi pada semua negara merupakan tantangan yang ekstrim secara global. Pembangunan berkelanjutan (SDGs) adalah agenda yang di program dalam jangka waktu yang sangat panjang yaitu sampai pada tahun 2030 sebagai pembangunan berkelanjutan bersama yang di buat untuk semua

negara dan dapat persetujuan dari berbagai pihak kepala negara di forum resolusi (PBB) (Chaidir *dkk*., 2021).

Keprihatinan yang sama juga melanda beberapa negara berkembang lainnya, yang menjadi titik perhatian dunia, khususnya organisasi dunia dari PBB, sehingga mendorong PBB mengeluarkan deklarasi dan pencanangan MDGs, yang intinya bertujuan melaksanakan berbagai program pemerataan pembangunan, agar tingkat kemiskinan di dunia berkurang, bahkan bisa dihapuskan. Melalui komitmen seluruh negara diharapkan negara-negara industri maju agar membantu dengan cara menyisihkan sebagaian keuntungannya untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan di berbagai negara berkembang. Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan merupaka masalah dunia yang paling akut yang disebabkan oleh ketimpangan ekonomi yang makin tajam. Berawal dari keprihatinan inilah Jef- frey Sachs, Direktur Program MDGs PBB, melahirkan ide MDGs, melalui buku *The End of Poverty*,

Dokumen akhir yang dihasilkan dari KTT Dunia 2005, yang berlangsung 14-16 September, di Markas Besar Perserikatan PBB NewYork, masih mengidam-idamkan terwujudnya sebuah dunia yang aman, damai, makmur, dan bermartabat bagi seluruh umat manusia. Dokumen akhir KTT terdiri dari bagian-bagian besar, yaitu nilai-nilai dan prinsip-prinsip *(values and principles)*:

1. Pembangunan *(development)*
2. Perdamaian dan keamanan kolektif *(peace andcollective security)*
3. Hak asasi manusia dan supremasi hukum *(human rights and the rules of law)*
4. Penguatan PBB *(strengthening the unitednations)*
5.

Pada bagian nilai-nilai dan prinsip-prinsip, terdapat 16 butir pernyataan yang berisi penegasan komitmen para kepala negara. Antara lain disampaikan, "Kami menekankan kembali bahwa keyakinan kami kepada PBB dan komitmen kami pada tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip yang dimuat dalam Piagam PBB dan hukum internasional, yang merupakan landasan-landasan yang sangat diperlukan bagi dunia yang lebih damai, lebih makmur,dan lebih adil."

Pada butir lain disebutkan, bahwa prinsip pemerintahan yang baik dan penegakan hukum di tingkat nasional maupun internasional merupakan sesuatu yang esensial bagi pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, penghapusan kemiskinan dan kelaparan.

Program MDGs, yang disepakati para anggota PBB, sejak tahun 2000 lalu dalam sebuah KTT Global, yang kemudian melahirkan *Millenium Declaration*, adalah suatu inisiatif global untuk mengurangi jumlah orang miskin di dunia menjadi agar dapat dientaskan sekitar 50 persennya pada tahun 2015. SDGs memiliki delapan tujuan (*goals*) dan 18 target yang harus dicapai oleh negara-negara berkembang dan juga negara-negara maju. Upaya masyarakat internasional untuk mencapai MDGs, pada tahun 2015, menyegarkan kembali gagasan "jebakan kemiskinan" (*poverty trap*), suatu gagasan yang sangat terkenal pada dekade1950-an.

Pada masa kini, gagasan ini terutama dikembangkan oleh Jeffrey Sachs, yang adalah penasihat khusus Sekjen PBB, Kofi Annan. Ide itu menyatakan bahwa negara-negara berkembang terperangkap dalam "jebakan kemiskinan", karena itu membutuhkan "dorongan yang kuat" (*big push*) dalam wujud bantuan luar negeri (*aid*) dan investasi untuk dapat "lepas landas" (*take-off*) dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapitanya dan tingkat kehidupan yang lebih baik.

Nilai-nilai untuk mencapai MDGs (yang disepakati di Deklarasi Milenium):

1. Kemerdekaan (dari kelaparan, ketakutan,ketidakadilan, dll)
2. Kesetaraan (antar bangsa, antarmasyarakat,antarjender)
3. Solidaritas (dalam mengatasi kesenjangan)
4. Toleransi (dalam keanekaragaman menuju kedamaian)
5. Penghargaan pada alam (dan melestarikanlingkungan)
6. Berbagi tanggung jawab (global, nasional,lokal) (Yuningsih, 2007)

Upaya bersama pencapaian SDGs di Asia Pasifik: *Goal* 1 sampai dengan 7. tentang berbagi Informasi/pengetahuan/ pengalaman, yakni bagaimana:

1. Sumber dana lebih tepat menjangkau masyarakat miskin.
2. Informasi/pengetahuan lebih cepat/tepat sampai.
3. Sistem pelayanan masyarakat terjangkau masyarakat miskin.
4. Infrastruktur bagi masyarakat miskin dengan teknologi tepat guna (energi, air bersih, transportasi, komunikasi, dll).
5. Menggalang kemitraan pemerintah dengan swasta dan masyarakat dengan lebih efektif dan setara.
6. Meningkatkan kemampuan statistik dan pendataan yang lebih akurat sehingga bisa lebih tepat sasaran.
7. Mengarahkan (dan bukan diarahkan) donor/ kerja sama bilateral dan multilateral.
8. Replikasi *(upscaling)* proyek-proyek percontohan yang berhasil, program nasional yang terdesentralisasi.
9. Harmonisasi strategi penanggulangan kemiskinan nasional dengan pencapaian SDGs.
10. Melakukan "*affirmative action*" atau memberi kesempatan/perlakuan khusus bagi "kantong- kantong kemiskinan"/daerah-daerah dengan potensi/kemampuan pencapaian SDGs yang rendah (Yuningsih, 2007).

Ancaman terhadap ketimpangan dan kemiskinan adalah salah satu masalah yang sangat mendasar bagi ketidakbersinambungannya pembangunan. Eskalasi pertumbuhan penduduk miskin akan menjadi tantangan bagi setiap pemerintah dalam melaksanakan progam kerja sehingga akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Bahaya eskalasi kemiskinan dan kelaparan menjadi perhatian utama PBB. Peringatan ini telah dicantumkan dalam dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berjudul *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development* yang bertanggal 25 September tahun 2015.

Dalam konferensi tersebut PBB tersebut secara tegas tealah diungkapkan bahwa untuk mengatasi masalah kemiskinan telah dijadikan salah satu pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan. Dokumen yang berisikan 17 Tujuan dan terdiri atas 169 Sasaran adri pembangunan berkelanjutan SDGs. Periode berlakunya dimulai tahun 2016 hingga tahun 2030. Untuk tujuan pengentasan kemiskinan, maka setiap pemerintah daerah haruslah dapat memberi kontribusi yang besar untuk mencapai target pencapaian pembangunan berkelanjutan. Keberadaan daerah baik secara langsunga ataupun tidak, akan menjadi pusat pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan mengutamakan pengelolaan kearifan lokal. Meskipun tidak memiliki otoritas yang cukup besar dalam melakukan hubungan internasional, akan tetapi akses pemerintah daerah langsung berhubungan dengan masyarakat daerah. Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan akan berkontribusi secara langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nasional. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu memiliki strategi yang efektif dalam mengatasi perangkap kemiskinan warganya.

Lebih lanjut peran pemerintah lokal dalam mendukung target pencapaian SGDs telah dipertegas memalui pembentukan gugus tugas yang melibatkan peran dari berbagai organisasi dan asosiasi kota maupun kepala daerah. Diantaranya adalah *International Council for Local Environmental Initiatives* (ICLEI), *The Network of Regional Governments for Sustainable Development* (NRGSD), and *United Cities and Local Governments* (UCLG). Dalam forum tersebut kepala daerah dari seluruh dunia berkomitmen dalam merencanakan, membuat keputusan dan melaksanakan *global development agenda.*

Selanjutnya melalui *the achievement of the global agendas from the bottom-up*, pemerintah daerah dari berbagai negara menghasilkan dokumen *New Urban Agenda.* "*New Urban Agenda*" (NUA) yang merupakan hasil kesepakatan pada *Habitat III Cities Conference* di Quito, Ecuador pada bulan Oktober tahun 2016. Dokumen tersebut merupakan bentuk penegasan komitmen bersama dalam pembangunan daerah maupun perkotaan agar dapat

mencapai berkelanjutan. Pertemuan itu mencerminkan bahwa cara untuk mewujudkan target pencapaian SDGs hanya mungkin dilakukan melalui potensi percepatan *New Urban Agenda*. Kinerja kepemimpinan lokal dan penyediaan layanan lokal akan sangat menentuka untuk mengakselerasi pembangunan karena bertumpu pada realitas budaya, sosial, lingkungan dan ekonomi di masing-masing wilayah. Argumetasi ini menguatkan pentingnya peran pemerintah lokal dan regional dalam pengembangan, pelaksanaan maupun dalam pelaporan kebijakan internasional. Dengan begitu mala melokalkan tujuan pembangunan global lebih mungkin untuk diwujudkan (Issundari dan Yani, 2021).

4.1.2 Perspektif Development as Freedom

Menurut Indro (2013) pada tahun 1981 Amartya Kumar Sen mulai terkenal di dalam bidang ekonomi politik melalui tulisannya dalam buku yang berjudul *Poverty and Famine: An Essay on Entitlement and Deprivation*. Menurut Sen, kemiskinan dan kelaparan tidak hanya diakibatkan oleh bencana alam tetapi juga kediktatoran dalam sistem politik suatu negara. Lebih lanjut teori Sen perlu mendapatkan perhatian khusus sehubungan dengan dua alasan. Pertama, Sen tidak hanya menekankan pembangunan sebatas pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengutamakan pembangunan sebagai penciptaan ruang kebebasan yang lebih luas.

Lebih lanjut Sen (McDonald, R. 2006) menyatakan bahwa kebebasan merupakan tolok ukur pembangunan dengan dua alasan, yaitu:

a. Alasan evaluatif, penilaian atas keberhasilan pembangunan dipahami berdasarkan sejauh mana kebebasan manusia meningkat. Dengan demi adanya . peningkatan kebebasan, manusia semakin mampu untuk mengungkapkan dan berusaha memenuhi kebutuhannya dalam pembangunan.
b. Alasan efektivitas, keberhasilan pembangunan sepenuhnya tergantung pada manusia yang bebas. Dengan kebebasan yang dimilikinya, manusia menentukan tujuan dan cara pemenuhan kebutuhannya.

Amartya Sen (McDonald, R. 2006) mengartikan pembangunan sebagai *development as freedom*, oleh karena itu sudah sewajarnya bagi semua kalangan yang dalam hal ini adalah pemerintah, masyarakat dan sektor privat untuk merealisasikan prinsip tersebut sesuai dengan tuntunan UNDP. Dalam hal ini perlu adanya upaya untuk memperbanyak pilihan yang berkualitas bagi masyarakat agar mampu mengaktualisasikan dan merealisasikan haknya sebagai manusia. Kebutuhan dasar lainnya yang sangat penting menurut Sen, yang kemudian diadopsi oleh UNDP sebagai Indeks Pembangunan Manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Selain kedua hal tersebut, perlu juga meningkatkan kekuatan daya beli masyarakat.

PBB merupakan organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara berdaulat yang terikat dalam kesepakatan internasional yang menyatakan hak dan kewajiban negara-negara tersebut pada *United Nations Charter*. Kesepakatan ini dicetuskan pada tanggal 26 Juni 1945 dalam konferensi internasional di San Fransisco. Tujuan utama PBB adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, meningkatkan hubungan baik antar negara-negara, mempromosikan perubahan sosial, taraf hidup yang lebih baik serta Hak Asasi Manusia. Salah satu mandat yang harus diperjuangkan oleh PBB adalah mempromosikan pembangunan, baik ekonomi ataupun sosial. Berkaitan dengan tujuan tersebut di atas, tujuh puluh persen dari sistem kerja PBB didedikasikan bagi program pembangunan. Semua tujuan tersebut didasari pandangan bahwa untuk menciptakan perdamaian, menghilangkan kemiskinan dan meningkatkan kehidupan seluruh manusia di dunia merupakan tugasnya (*United Nations*, 2004) Berdasarkan piagam di atas, terdapat enam badan utama dalam PBB, yaitu meliputi (1) *General Assembly*, (2) *Security Council*, (3) *Economic and Social Council*, (4) *Trusteeship Council*, (5) *International Court of Justice dan Secretariat*, dan (6) Economic and Social Council merupakan dewan utama PBB yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu ekonomi dan sosial yang salah satunya adalah pembangunan. Dewan ini juga memiliki banyak badan-badan khusus yang salah satu di antaranya adalah *The United Nations Development Programme* (UNDP). Sebagai

sebuah organisasi pembanguan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNDP bekerja untuk mengatasi kemiskinan melalui pembangunan manusia secara berkesinambungan. Agar usaha tersebut lebih terarah, dibentuk MDG's waktu itu.

4.1.3 *Kerjasama PBB untuk Mewujudkan Keberlanjutan Lingkungan*

Isu utama dalam lingkungan global mulai mengemuka dalam berberapa dekade akhir-akhir ini. Kesadaran umat manusia akan pentinga lingkungan hidup nya yang telah banyak mengalami degradasai ini membuat kesadaran untuk penyelamatan lingkungan ini terus meningkat. Pada skala internasional sebenarnya telah disepakati Deklarasi Rio de Jenerio yang merupakan konferensi PBB mengenai lingkungan hidup yang kedua setelah konfererensi PBB mengenai lingkungan hidup yang pertama di Stockholm Swedia tahun 1972. Hasil konferensi Deklarasi Rio de Jenerio menetapkan serangkaian pedoman pembangunan (Anggraeni, 2016).

Persoalan lingkungan hidup pada dasarnya adalah persoalan semua orang, gerakan-gerakan kesadaran yang dibangun untuk memulihkan kondisi-kondisi lingkungan kearah yang lebih baik adalahh suatu keharusan, dengan mengambil peran apapun yang bisa dilakukan oleh semua pihak untuk melakukan perbaikan terhadap kerusakan lingkungan hidup disekitarnya. Pada perkembangannya kemudian, konsepsi tentang lingkungan hidup baru terwujud secara jelas ketika dilaksanakannya Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup dan Manusia di Stockholm, Swedia pada tanggal 5-6 Juni tahun 1972, yang melahirkan dokumentasi berupa Deklarasi Stockholm. Konferensi ini adalah tonggal awal dari kesadaran komunitas global pada pentingnya proteksi lingkungan hidup sebagai bagian mendasar dalam komitmen terhadap HAM (Arliman, 2018).

Upaya untuk mewujudkan masyarakat dunia yang peduli terhadap lingkungan hidup telah cukup lama dilakukan. Pada periode sebelum tahun 1940-an ada beberapa kesepakatan yang telah dicapai oleh masyarakat internasional yaitu *Convention for Protection of Useful Birds to Agriculture* tahun 1902, *Treaty of Preservations of Fur Seals* di Wahington tahun 1911, *Convention*

Regulation of Whaling tahun 1931), dan *Convention on Nature Protection and Wildlife Preservation in the Western Hemisphere* di Washington 1940). Pada periode 1940- 1972 setidaknya ada 60 perjanjian internasional yang berkaiatan dengan perlindungan beberapa komponen lingkungan hidup yang dipandanga sangat bagi seluruh umat manusia. Organisasi di bawah PBB berperan aktif dalam mengangkat isu lingkungan seperti WHO, WMO, ICAO, IAEA, FAO, UNESCO, OECD, IMO, ILO dan lain-lain.

Pada tahun 1968 dan 1969 melalui PBB telah disahkan resolusi untuk pelaksaan *The United Nations Conference on Humant Environment*. Konferensinya itu sendiri baru dapat dilksanakan pada tahun 1972 di Stockholm yang kemudian dikenal sebagai Konferensi Stockholm. Kemudian seytelah itu pada periode 1972-1992 PBB membentuk Bandan yang dikenal sebagai UNEP dan Dana Lingkungan (*Environment Fund*). Mulai saat itu dilakukan penanganan berbagai masalah lingkungan yang meruapakan masalah klasik termasuk pelestarian flora dan fauna langka, polusi air dan udara, perlindungan habitat dan lain-lain.

Masyarakat global bukan Cuma berupaya untuk proteksi lingkungan melalui berbagai konvensi yang dihasilkannya tetapi juga melalui jalur pendidikan lingkungan. Ketika itu isu lingkungan hidup gencar dibicarakan secara simultan. UNEP, UNESCO dan IEEF (*International Environment Education Program*) melaksankan berbagai pertemuan untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan masalah pendidikan lingkungan hidup seperti yang diselenggarkan di Paris pada tahun 1974, Belgrade pada tahun 1975, Tblisi pada tahun 1987 dan lain-lainnya. Salah satu hasil dari pertemuan itu adalah dirumuskannya definisi tentang Pendidikan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Environmental Education is the process of recognizing values and clarifying concepts in order to develop skills and attitudes necessary to understand and appreciate the inter-relatedness among men, his culture and his biological surroundings. Environmental education also entails practice in decision making and self-formulation of a code of behavior about issues concerning environmental quality (UNESCO 1983).

Definisi tersebut memberikan arahan yang jelas bahwa pendidikan lingkungan bukan sekedar memberikan pengetahuan tentang lingkungan tetapi membentuk keterampilan dan sikap yang baik terhadap lingkungan. Semua itu memerlukan proses pengenalan nilai dan konsep tentang hubungan antara manusia terhadap lingkungannya.

Upaya mewujudkan pembangunan berkesinambungan melalui pendidikan semakin jelas setelah dilaksanakan Pertemuan Tingkat Tinggi Pembangunan Berkelanjutan (*World Summit on Sustainable Development* atau WSSD) tanggal 25 Agustus sampai dengan 4 September 2002 di Johannesburg Afrika Selatan. Pertemuan tersebut membahas antara lain pelaksanaan Agenda 21 yang meliputi rencana program aksi di bidangbidang sosial, perekonomian maupun lingkungan hidup. WSSD juga telah menyusun rekomendasi yang sangat urgen yaitu dokumen MDGs yang di dalamnya menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai jika pendidikan ditempatkan sebagai prioritas utama.

Dalam dokumen MDGs juga mengharuskan penghapusan paradigma lama yang sangat mengejar kepentingan pertumbuhan ekonomi yang mengabikan kelestarian lingkungan. MDGs menekankan pada suatu prinsip pembangunan dengan mengintegrasikan variabel ekonomi, sosial dan ekologi dalam setiap aktivitas pembangunan. Lingkungan sebagai sumberdaya merupakan asset yang diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat. Konsep ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945.

4.2 Program SDGs dan Perkembangannya

4.2.1 *Sustainable Development Goals*

Sebelum pelaksanaan *Millennium Development Goals* (MDGs) berakhir, pada *UN Summit on MDGs* 2010 telah dirumuskan agenda pembangunan dunia pasca 2015. Agenda ini diperkuat dengan disepakatinya dokumen "*The Future We Want*" dalam *UN Conference on Sustainable Development* 2012. Kedua hal ini menjadi pendorong utama penyusunan agenda pembangunan pasca 2015 yang disepakati dalam Sidang Umum PBB pada bulan September tahun

2015. PBB telah mencanangkan program pembangunan berkelanjutan yang kemudia dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Program untuk menggantikan program *sebelumnya Millennium Development Goals* (MDGs) yang selesai pada akhir tahun 2015. SDGs tersebut akan otomatis berlaku bagi negaranegara maju dan berkembang untuk kurun waktu hingga 2030 (Ishartono, dan Raharjo, 2016).

Memasuki era SDGs, yang dimulai dengan pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 25-27 September 2015 di markas besar PBB di New York. Acara seremoni pengesahan dokumen SDGs yang dihadiri oleh perwakilan dari 193 negara yang secara aklamasi menyetujui dokumen berjudul "*Transforming Our World*: *The 2030 Agenda for Sustainable Development*" atau "Mengalihrupakan Dunia Kita: Agenda Tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan". Dokumen SDGs pun dicanangkan untuk melanjutkan dan memantapkan target-target MDGs yang telah dilaksanakan sebelumnya agar langgeng dan berlanjut seterusnya yang di antaranya mengakhiri kemiskinan, menjamin kehidupan sehat, mempromosikan pendidikan dan memerangi perubahan iklim (Yekti, 2020). Beberapa argumen yang dapat diterima kenapa Program-program SDGs akan jauh lebih baik dari pada MDGs antara lain adalah:

1. SDGs lebih bersifat global dalam mengembangkan program-programnya. Adapun MDGs hanya diprakarsai oleh kelompok negara OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*) bersama dengan beberapa lembaga internasional lainnya. Sebaliknya SDGs dibentuk melalui negosiasi internasional, bukan hanya oleh negara-negera besar melainkan juga oleh partisipasi dari negara negara yang penduduknya berpendapatan menengah maupun yang berpendapatan rendah.
2. Dalam SDGs, sektor swasta juga akan memiliki peran yang sama, bahkan lebih besar ketimbang sebeleumnya dalam MDGs.
3. MDGs dipandang tidak mempunyai standar dasar untuk HAM. Karena itu MDGs dipandang telah gagal dalam memprioritaska keadilan secara merata, malah masih dirasakan bentuk-bentuk diskriminasi dan pelanggaran HAM. Karena itu dengan MDGs

pada akhirnya berujung keadaan masih cukup banyaknya yang terjebak dalam kemiskinan. Di lai fihak SDGs dirasakan sudah menggunakan dasar-dasar dan prinsip-prinsip HAM yang lebih baik.

4. SDGs adalah program yang terasa inklusif. Tujuh target dari SDG sangat eksplisit tertuju kepada orang dengan kecacatan, dan tambahan enam target diprioritaskan untuk situasi yang darurat, dan tujuh target juga yang bersifat universal serta ada dua target untuk mewujudkan antidiskriminasi.
5. Beberapa indikator yang diterapka adalah untuk memberikan kesempatan untuk meningkatkan peran masyarakat sipil.
6. PBB dinilai bisa memberikan menginspirasi negaranegara di dunia dengan Program SDGs tersebut.
7. Dalam acara pelaksanaan *Conference of the Parties* 21 (COP21) di Paris telah dilahirkan perjanjian global perubahan iklim sebagai kerangka transisi menuju ekonomi dan masyarakat yang berperilaku rendah karbon dan memiliki kelenturan terhadap adanya fenomean perubahan iklim merupakam salah satu kesempatan untuk maju dan berkesinambungan

4.2.2 Program-program SDGs

Lahir dengan nama SDGs) merupakan sebuah inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kualitas kehidupan manusia ke arah yang harus lebih baik dalam bidang ekonomi maupun sosial dengan catatan bahwa kegiatan yang akan dibentuk dan dilaksanakan tetap dapat bersinergi dengan baik terhadap aspek lingkungan (Ishartono dan Raharjo, 2016). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjamin peningkatan kesejahteraan secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat secara berkelanjutan, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup antargenerasi (BAPPENAS, 2020). Dalam menjaga keseimbangan tiga dimensi pembangunan tersebut, SDGs membawa 5 prinsip-prinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan,

yaitu *People*, *Planet*, *Prosperity*, *Peace*, dan *Partnership* yang ingin mencapai tiga tujuan mulia paling lambat harus diwujudkan pada akhir tahun 2030. Pada akhir tahun 2030 itu harus diakhiri segala bentuk kemiskinan, dicapai kesetaraan dan sekaligus mengatasi perubahan iklim. Artinya kini kemiskinan masih menjadi isu sentral, selain dua isu lainnya.

Sebagaimana diungkapkan oleh Ishartono, dan Raharjo (2016), untuk mencapai target tiga tujuan mulia tersebut, maka disusunlah 17 Tujuan Global (Gambar 4.1):

1. Eradikasi Kemiskinan.
   Tidak dijumpai kemiskinan dalam segala bentuk di muka bumi.
2. Tanpa ada Kelaparan.
   Tidak dijumpai lagi kelaparan, disertai ketercapaian ketahanan pangan, perbaikan gizi, yang dilandasi budidaya pertanian yang tangguh dan berkelanjutan.
3. Kesehatan yang Baik dan Mensejahteraan.
   Menjamin kehidupan masyarakat yang sehat yang menjadi landasan kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat untuk seluruh rentang umur.

Gambar 4.1. Simbol 17 Tujuan Global SDGs (*Sustainable Development Goals Knowledge Platform*)

4. Pendidikan yang Berkualitas.
   Menjamin distribusi pendidikan secara merata dengan kualitas yang baik dan meningkatkan partispasi dan kesempatan belajar bagi setiap individu, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat bagi bagi setiap orang.
5. Kesetaraan Gender.
   Mencapai kesetaraan gender dan meningkatkan keberdayaan kaum ibu dan kelompok perempuan lain.
6. Air Bersih dan Sanitasi.
   Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi lingkungan hidup yang berkelanjutan bagi setiap orang.
7. Energi Bersih yangTerjangkau.
   Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, kerdibel, berkelanjutan dan moderen bagi setiap individu.
8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak.
   Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur.
   Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi Kesenjangan.
    Mereduksi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.
11. Keberlanjutan Kota dan Komunitasnya.
    Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan bekelanjutan.
12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab.
    Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
13. Aksi Terhadap Iklim.
    Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

14. Kehidupan Bawah Laut.
    Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.
15. Kehidupan di Darat.
    Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan keberlanjutan penggunaan ekosistem daratan, mengelola ekosistem hutan secara berkelanjutan, mengurangi sebaran tanah tandus melalui tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan penurunan keanekaragaman hayati.
16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Berkedamaian.
    Meningkatnya perdamaian merupakan pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan, karena itu menjadi urgen dalam menyediakan akses pada keadilan bagi setiap individu dan bertanggung jawab bagi seluruh golongan, serta meningkatkan keefetifan institusi yang akuntabel, dan inklusif untuk setiap level.
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
    Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan di level global untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

4.2.3 *Perkembangan SDGs di Indoensia*

Dokumen SDGs atau dikenal dengan Agenda 2030 itu lahir bukan sebagai dokumen *legally binding* yang mentargetkan agar negara-negara tidak memiliki kewajiban untuk memberikan pelaporan terhadap progres SDGs yang dilakukan di tingkat nasional, namun bukan berarti pelaksanaan SDGs dapat lolos tanpa melalui mekanisme pelaporan secara terstruktur dan transparan. *High Level Political Forum* (HLPF) dibentuk sebagai suatu forum secara terpadu yang difasilitasi oleh PBB dengan menghadirkan berbagai sektor stakeholder guna saling memantau tingkat perekembangan kemajuan masing-masing negara dalam pelaksanaan SDG sebagai salah satu mekanisme monitoring, tindak lanjut dan pelaporan di tingkat global. Untuk tujuan mengukur

kinerja berbagai hasil pembangunan sebagai bagian dari SDGs, maka perlu dilakukan tindak lanjut dan pelaporannya (*follow up and review*) yang berbasiskan pada serangkaian indikator. Rangkaian ini dipersiapkan pada level global, regional maupun nasional (Panuluh dan Fitri, 2016).

Adapun HLPF menggunakan mekanisme *national voluntary review* yang merupakan pelaporan negara secara sukarela. Tidak semua negara harus melaporkan perkembangan pelaksanaan SDGs per tahun. Adapun pertemuan HLPF meliputi pertemuan per tahun pada level *Ministrial Meeting* yang perlu ada partisipasi *stakeholder* pemerintah maupun non pemerintah. Pertemuan ini perlu diselenggarakan dinaungan oleh isntitusi Dewan Ekonomi dan Sosial (*ECOSOC*) PBB. Pertemuan juga dilaksanakan dala empat tahunan yang merupakan pertemuan para Kepala Negara yang dinaungi oleh institusi Majelis Umum (Gereal Assemble) PBB. HLPF harus dapat membuat kesimpulan bahwa diperlukan pendekatan yang bersifat integratif dalam pelaksanaan SDGs dengan pebibata peran seluruh *stakeholder*, baik itu dari kalangan pemerintah maupun non-pemerintah. HLPF juga menilai perlunya pemahaman baru untuk melakukan reorientasi kebutuhan ekonomi yang dapat memebrikan dorongan pembangunan manusia, keberlanjutan bumi, dan meningkatlan kesejahteraan masyarakat.

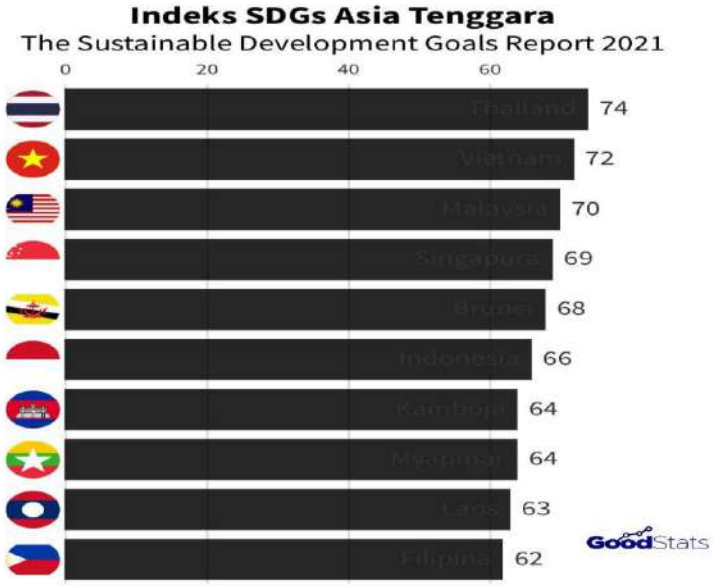

Gambar 4.2. Indeks SDGs di Asia Tenggara (Luthfi, 202) diakses Pukul 20.30 WIB, 15 September 2022 https://www.goodnewsfromindonesia.id/

Negeri dengan julukan Gajah Putih berada di posisi teratas dalam pencapaian SDGs 2021 dengan 74,19 poin. Vietnam mengekor di peringkat ke dua dengan 72,85 poin, Malaysia di peringkat ke tiga dengan 70,88 poin. Sementara itu, Indonesia menempati urutan ke 6 capaian SDGs 2021 di wilayah Asia Tenggara dan peringkat ke 97 secara global. Terhitung sejak 6 tahun belakangan dunia telah mengadopsi tujuan dan target SDGs ke dalam rencana pembangunan nasionalnya di setiap negara masing-masing. Namun berdasarkan beberapa laporan yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga internasional seperti *The Sustainable Development Goals Report Report 2021*, progress yang dilakukan oleh negara-negara dunia belum seperti yang diharapkan. Walaupun hasil pencapaian SDGs belum sepenuhnya seperti yang telah ditargetkan, namun dapat disaksikan bahwa ada peningkatan secara gradual untuk masing-masing tujuan dan target indikator (Luthfi, 2021).

Gambar 4.3. Index Pelaksanaan SDGs Indonesia 2016-2021 (Luthfi, 2022) diakses Pukul 21.30 WIB,15 September 2022 www.goodnewsfromindonesia.id/

Indeks pelaksanaan SDGs oleh Indonesia selalu mengalami perubahan, baik perubahan secara poin maupun peringkat global. Tercatat, nama Indonesia pertama kali masuk dalam *The Sustainable Development Report/ The SDG Index & Dashboards* pada tahun 2016. Jika diperiksa di dalam laporan itu, ternyata Indonesia berada pada posisi ke 98 dengan total nilai 54,38 poin. Laporan tersebut dikeluarkan untuk pertama kalinya sebagai ukuran titik awal kinerja SDGs tahun 2015 untuk katagori level negara. Pada tahun berikutnya yaitu 2017, peringkat Indonesia merosot ke urutan 100, sekalipun terjadi peningkatan total poin yakni ke angka 62,9. Pada laporan kala itu sampai tahun 2021, peringkat dan poin Indonesia pada laporan *The Sustainable Development Report* sama dengan laporan sebelumnya yakni menempati peringkat ke 97 dengan poin 66.3. Laporan *The Sustainable Development Report* semakin kompleks dan semakin detail isinya dalam mendeskripsikan perkembangan dari masing-masing negara selama pelaksanaan SDGs (Luthfi, 2021).

Pada katagori level nasional, Kementarian PPN/BAPPENAS bersama dengan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud serta para pemangku kepentingan secara resmi menerjemahkan istilah SDGs menjadi TPB untuk mewujudkan kesamaan pemahaman tentang pengertian SDGs. Target sebagian besar dari MDGs telah dicapai Indonesia yaitu 49 dari 67 indikator MDGs. Walaupn begitu tetap masih dijumpai beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan SDGs (BAPPENAS, 2020). Indikator yang harus dilanjutkan tersebut adalah penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minimum di bawah 1.400 kkal per kapita per hari, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi perdesaan serta untuk menekan kesenjangan target capaian antarprovinsi yang masih lebar (Arianto, 2017). Ikhtiar pencapaian target SDGs tersebut menjadi telah dijadikan prioritas pembangunan nasional. Prioritas ini memerlukan sinergi kebijakan tentang perencanaan di level nasional maupun provinsi serta level kabupaten/kota. Oleh karena itu SDGs tidak lain merupakan penyempurnaan dari MDGs, karena lebih komprehensif dengan melibatkan partisipasi lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang. SDGs juga dapat memperluas sumber-sumber pembiayaan, dan menekankan pada peneguhan komitmen terhadap hak asasi manusia, bersifat inklusif yang melibatkan berbagai ormas dan media mass. Bukan hanya itu, SDGs juga dapat menarik uluran tangan para filantropi dan kerjasama dengan para pelaku usaha serta akademisi maupun para pakar dalam semua bivvdang (Fardan, 2015).

Pelibatan semua institusi seperti digambarkan oleh Fardan (2015) tersebut di Indonesia telah menghasilkan rumusan Rencana Aksi SDGs sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di level nasional (Rencana Aksi Nasional atau RAN) maupun di tingkat daerah (Rencana Aksi Daerah atau RAD). Renaksi SDGs merupakan dokumen rencana kerja 5 tahunan untuk melaksanakan berbagai aktivitas baik yang secara langsung maupun tidak langsung terus mendukung pencapaian target nasional ataupun target daerah. Dengan renaksi tersebut diharapkan berbagai fihak yang terkait di

level nasional ataupun level daerah dapat memegang komitmen demi kejelasan dalam bidanga perencanaan maupun pelaksanaan program-programnya demi mencapai target atau sasaran SDGs.

Perpres SDGs yang tengah disusun nantinya akan memuat dan menghasilkan beberapa keputusan diantaranya :

1) Peta Jalan Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang merupakan dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis tahapan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional tahun 2016 hingga tahun 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, yang akan berlaku maksimal 12 bulan sejak penetapan Perpres;
2) Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Naisonal, yang merupakan dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian SDGs yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, yang akan berlaku paling lama 6 bulan sejak penetapan Perpres; dan
3) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang merupakan dokumen rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah, yang akan berlaku paling lama 12 bulan sejak penetapan Perpres.

Di luar muatan tentang strategi dan kerja yang akan dilaksanakan pemerintah dalam pencapaian SDGs, Peraturan Presiden ini selain mengatur peran setiap Kementerian dan Lembaga dalam pelaksanaan SDGs juga mengatur peran tiap-tiap *stakeholder* nonpemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan SDGs, seperti kelompok masyarakat sipil, akademisi, filantropi, dan pelaku usaha. Berkaitan dengan hal ini, presiden sekaligus mengatur pembentukan untuk pelaksanaan SDGs yang disebut Tim Koordinasi Nasional, yang akan terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Kelompok-kelompok Kerja dan Dewan Pakar. Harapannya, *stakeholder* kunci yang terlibat dapat terwakili dalam tiap komponen

Tim Koordinasi Nasional. Penyusunan indikator nasional untuk SDGs dilakukan dalam koordinasi terpusat oleh Bappenas bersama Badan Pusat Statistik sebagai penyedia data nasional. Hingga saat ini, proses penyusunan indikator nasional SDGs masih terus berjalan sehingga dapat diupayakan menjadi dokumen pendukung dalam Peraturan Presiden untuk Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Nasional. Penyusunan indikator nasional dilakukan dalam proses diskusi dan konsultasi publik dengan berbagai pihak, diantaranya Kementerian/Lembaga terkait, kelompok masyarakat sipil, akademisi, filantropi, serta pelaku bisnis dan usaha (BAPPENAS, 2020).

Jika diperbandingkan dengan kondisi pada 15 tahun sebelumnya yaitu pada saat awal pengesahan MDGs, tentulah Indonesia tekah mencapai banyak kemajuan yang dalam hal ketepatan target waktu maupun dalam pengembangan partisipatif. Kendatipun demikian, tantangan yang harus dihadapi oleh para pelaksanaan SDGs bukanlah hanya dua aspek tersebut saja. Dari sisi substansinya, obsesi dalam SDGs untuk menghilangkan dampak negatif pembangunan secara keseluruh sebenarnya merupakan pekerjaan yang dapat dikatakan utopia. Dari sisi prosesnya pun, pelaksanaan SDGs di level nasional masih mensisakan banyak pekerjaan rumah seperti dalam hal mekanisme pemenuhan akuntabilitas, pengembangan akses untuk memperoleh data terutama dari pihak non-pemerintah. Demikian juga dengan proses pengembangan partisipasi itu sendiri. Hal ini seharusnya tidak perlu dipandang sebagai beban melainkan tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan kinerja bagi akselerasi pembangunan nasional Indonesia hingga 2030. Peranan aktif pemerintah tentu menjadi modal utama bagi pelaksanaan dan pencapaian SDGs di Indonesia (Panuluh dan Fitri, 2016). Hal lain yang penting untuk dicatat sebagai langkah baik berbagai *stakeholder* yakni:

1. Pemerintah Indonesia menjadi salah satu dari 193 kepala Negara dan pemerintahan yang ikut menyepakati agenda pembangunan global ini.
2. Peraturan Presiden sedang disiapkan untuk dapat menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan SDGs.

3. Organisasi Masyarakat Sipil ikut merapatkan barisan dengan membentuk Koalisi Masyarakat Sipil untuk SDGs.
4. Pemerintah Daerah telah ikut serta memulai pelaksanaan SDG antara lain Kab Bojonegoro, dan Pangkep
5. Inisiatif yang datang dari berbagai pihak, termasuk Perguruan Tinggi atau Universitas membawa optimisme bahwa SDGs akan dilaksanakan dengan prinsip inklusif dan partisipatoris

4.3 Pengembangan Sektor Wisata dan Ekowisata Global

4.3.1 *Pengembangan Sektor Wisata*

Pengembangan adalah usaha atau cara untuk memajukan serta mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Di dalam sektor kepariwisataan, maka pengembangannya dapat diartikan sebagai segala upaya untuk peningkatan elemen-elemennya agar menjadi lebih baik sehingga dapat memaksimalkan utilitasny. Pentingnya dalam pengembangan sektor ini tidak lain karena sektor wisata tergolong sebagai industri jasa terbesar di dunia saat ini, dalam arti produktivitasnya ataupun kemampuannya dalam menyerap tenaga kereja melalui kemampuannya dalam membangkitkan efek pengganda (*multiplier efffect*) baik ke sektor-sektor insutri hulu (*backward lingkage*) maupun aktivitas perekonomian hilir (*forwras lingkage*) khususnya industri padat karyawan. Sektor pariwisata kini telah berakitan erat dengan produktivtas perekonomian, menyangkut isu sosial maupun pemecahan masalah lingkungan yang menonjol yang sangat mewarnai agenda berbagai kebijakan pada semua negara. Pengembangan pariwisata, karena itu, senantiasa digunakan untuk menciptakan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptkan lapangan kerja sekaligus untuk pemberdayaaan masyarakat. Kecauli itu pariwisata juga digunakan dalam agenda pelestarian lingkungan khususnya melalui ekowisata (*ecotourism*) yang di dalamnyadikandunga muatan konservasi dan sekaligus sebagai wahana edukasi.

Pengembangan pariwisata akan mempunyai dampak positif terhadap pembangunan ekonomi negara. Pada prisipnya pengembangan pariwisata atidal lain merupakan suatu proses untuk melakukan *matching* dan *adjustment* secara kontinyu antara sisi *supply* dan *demand* keperawisataan yang ada demi untuk mencapai misi yang harus dijalankan (Nuryanti, 1993). Pada tahapan selanjutnya harus dikembangkan model pengelolaan setiap kawasan wisata yang punya orientasi pada pelestarian lingkungan hidup (Ramly, 2007). Disamping itu untuk dapat melakukan pengembangan perlu memperhatikan berbagai aspek, diantaranya :

a. Seleksi terhadap potensi, hal ini dilakukan untuk memilih dan menentukan potensi objek wisata yang memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dana yang ada
b. Evaluasi terhadap letak dan potensi wilayah, dimana pekerjaan ini didasarkan pada pemikiran tentang keberadaan pertentangan atau kesalahpahaman antar wilayah administrasi yang terkait.
c. Pengukuran jarak antar potensi, untuk mendapatkan informasi tentang jarak antar potensi, sehingga perlu adanya peta agihan potensi objek wisata

4.3.2 Konsep Community Based Tourism

Pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*/CBT) merupakan konsep pengembangan kepariwisataan yang konkuren dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Konsep ini mengutamakan partisipasi dan peran aktif dari masyarakat agar mampu meningkatkan kesejahteraan dengan tetap berkomitmen untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu juga harus dapat untuk melindungi kehidupan sosial dan budayanya, sehingga implementasinya mampu mendukung tercapainya tiga pilar keberlanjutan (*the three pillars of sustainability*) yaitu keberlanjutan di bidang ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan (Asker dkk, 2010).

Ada 3 aktivitas utama dalam kepariwisataan yang dapat mendukung perwujudan konsep CBT. Pertama adalah aktivitas penjelajahan (*adventure travel*). Ke dua adalah wisata budaya

(*cultural Tourism*). Ke tiga adalah ekowisata (*ecotourism*). Ketiga bentuk pariwisata tersebut semuanya dapat memberikan opotunitas kepada setiap anggota masyarakat lokal untuk dapat mengontrol dan terlibat dalam aktivitas perekonomian wisata. Dengan begitu juga punya oportunitas untuk mendapat keuntungan. Menurut (Endah, 2007) batasan tentang maksud dari CBT yaitu :

a. Bentuk pariwisata yang dapat memberikan oportunitas pada masyarakat lokal untuk berperan dalam pengontrolan sekaligus juga terlibat dalam manajemen maupun pengembangan wisata.
b. Masyarakat yang tidak dapat terlibat langsung dalam satupun usaha pariwisata juga bisa memperoleh keuntungan dari keberadaan aktivitas di suatu obyek wisata tersebut.
c. Pemberdayaan masyarakat secara politis dan demokratis serta distribusi keuntungan kepada kelompok yang kurang mempunyai akses perekonomian di pedesaan.

Suansri (2003) mengungkapkan beberapa aspek utama dalam pengembangan CBT terdapat 5 dimensi, yaitu:

a. Dimensi ekonomi, dengan indikatornya adalah berupa ketersediaan dana untuk pengembangan komunitas lokal, terciptanya lapangan kerja di sektor yang terkait dengan pariwisata diiringi dengan peningkatan pendapatan masyarakat lokal dari sektor wisata.
b. Dimensi sosial dengan indikatornya berupa peningkatan kualitas hidup, kebanggaan komunitas, terciptanya pembagian peran yang setara gender, terjaminnya keadilan antargenerasi, dan terbangunnya penguatan institusi dalam masyarakat.
c. Dimensi budaya dengan indikatornya berupa meningkatnya rasa hormat masyarakat terhadap perbedaan budaya, adanya stimulasi bagi berkembangnya proses aklulturasi atau pertukaran budaya, munculnya budaya pembangunan yang melekat dengan budaya lokal yang ada.
d. Dimensi lingkungan, dengan indikatornya berupa terpelajarinya *carryng capacity area*, pengelolaan sampah yang efisien, adanya peningkatkan keperdulian untuk melakukan konservasi.

e. Dimesi politik, dengan indikatornya berupa peningkatkan partisipasi masyarakat lokal, peningkatan keberdayaan komunitas yang lebih luas, dan ternjaminnya hak-hak dalam pengelolaan SDA.

Pengembangan CBT dengan pendekatan partisipatif agar terbentuk kemitraan di antar-*stakeholder* yang ada (Demartoto, 2009). Pendekatan partisipatif membutuhkan koordinasi dan kerjasama serta peran yang berimbang antara berbagai unsur *stakeholder* termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemberdayan masyarakat merupakan suatu proses dalam koridor usaha untuk memperkuat karakter kemandirian (*community selfreliance*). Dalam proses ini masyarakat didampingi dalam melakukan analisis terhadap segala permasalahan yang dihadapi, dibantu dalam menemukan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi, serta diperkenalkan strategi dalam memanfaatkan berbagai sumberdaya yang telah dikuasai ataupun yang tersedia di sekitarnya.

Secara konseptual, pemberdayaan harus memenuhi enam aspek sebagai berikut:

a. *Learning by doing*. Pemberdayaan adalah proses belajar, dan terdapat tindakan konkrit yang kontinyu dan dampaknya apat terlihat.
b. *Problem solving*. Pemberdayaan harus memberikan pemecahan masalah krusial pada waktu yang tepat.
c. *Self evaluation*, yang dalam hal ini pemberdayaan harus mampu mendorong masyarakat untuk melakukan *self evaluation*.
d. *Self development and coordinatio* yang dalam hal ini proses pemberdayaan agar dapat menstimulasi pengembangan diri dan agar mampu untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak lain yang lebih luas.
e. *Self selection* yang dalam hal ini proses pemberdayaan harus mempu menumbuhkan kemandirian dalam merencanakan tahapan dan langkah ke depan.
f. *Self decisim* yang dalam hal ini proses pemberdayaan harus membuka kesadaran untuk mengambil tindakan yang tepat

diseratai dengan kepercayaan diri yang kuat yang berarti dapat mengambil keputusan secara mandiri (Alfitri, 2011).

Dari sudut pandang atau prespektif pekerjaan sosial menurut Suharto (2005) terdapat beberapa prinsip pemberdayaan yaitu:

1. Pemberdayaan merupakan suatu proses yang bersifat kolaboratif. Karena itu maka para pekerja sosial harus bekerja sama sebagai suatu mitra.
2. Proses pemberdayaan haruslah menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang cakap dan mampu untuk menjangkau berbagai sumberdaya maupun berbagi oportunitas.
3. Masyarakat harus memandang dirinya sendiri sebagai agen penting yang mampu mengendalikan perubahan.
4. Kompetensi harus diperoleh dan diasah melalui pengalaman dalam kehidupan, khususnya yang dapat memberikan kepercayaan diri yang kuat dalam masyarakat.
5. Solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
6. Jejaringan sosial yang bersifat informal umumnya bisa merupakan sumber dukungan yang sangat penting untuk menurunkan ketegangan yang ada dan jugas dapat untuk meningkatkan kompetensi maupun kemampuan dalam mengendalikan orang lain.
7. Masyarakat seharusnya selalu berpartisipasi dalam pemberdayaan dirinya sendiri, dalam menentukan tujuan, menetukan strategi dimana target hasilnya harus dirumuskan oleh mereka sendiri juga.
8. Kesadaran merupakan kunci dalam setiap proses pemberdayaan. Dengan kesadaran maka orang akan dapat meningkatkan pengetahuan yang selanjutnya dapat digunakan untuk melakukan mobilisasi tindakan untuk melakukan perubahan yang diinginkan.
9. Pemberdayaan akan selalu memerlukan peningkatan akses terhadap berbagai sumberdaya dan peningkatan kemampuan

untuk menggunakan berbagai sumberdaya tersebut secara efektif.

10. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus dan evolutif. Dengan begitu maka permasalahan selalu memiliki beberapa alternatif untuk menuju solusi.

4.3.3 *Ekowisata Berkelanjutan*

Konsep pembangunan berkelanjutan dirumuskan oleh *The World Commissions for Environmental and Development* (WCED), yaitu komisi dunia untuk lingkungan dan pembangunan, yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB. WCED mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mempertaruhkan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan pembangunan dengan lingkungannya sejak awal mulai dari proses penyusunan kebijakan, pengambilan beberapa keputusan strategis hingga pada penerapannya. Sedangkan menurut *Federation of Nature and National Parks* (1993) memberi batasan tentang pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah segala bentuk pembangunan, pengelolaan dan aktivitas pariwisata yang memelihras terhadap integritas lingkungan, sosial, ekonomi untuk mencapai kesejahteraan melalui pemanfaat sumber daya alam dan mendayagunakan budaya yang ada untuk jangka waktu yang tak terbatas.

Pariwisata berkelanjutan adalah penyelenggaraan pariwisata bertanggungjawab dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan maupun aspirasi manusia saat ini, tanpa mengorbankan kepentingan generasi di masa mendatang. Untuk itu maka penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan, kelayakan secara ekonomi (*economically feasible*) maupun kelayakan kapasitas sangga lingkungan (*environmentally feasible*) yang harus bisa diterima secara sosial (*socially acceptable*), dapat mendayagunakan teknologi atau *technologically appropriateness* (Alimudin, 2010).

Beberapa pengertian di atas secara umum memiliki kesamaan yang merupakan terjemahan lebih lanjut dari pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu kegiatan wisata dianggap berkelanjutan apabila memenuhi syarat yaitu :

1. Secara ekologis berkelanjutan, yaitu pembangunan pariwisata tidak menimbulkan efek negatif bagi ekosistem setempat ataupun ekosistem di tempat lain. Kecuali itu, itu konservasi merupakan kebutuhan yang harus diupayakan untuk melindungi sumberdaya alam dan lingkungan dari efek negatif kegiatan wisata.
2. Secara sosial dapat diterima, yaitu dengan mengacu pada kapasitas masyarakat lokal untuk mengambil peran aktif dalam berbagai aktivitas pariwisata tanpa menyebabkan timbulnya konflik sosial.
3. Secara kultural dapat diterima, artinya masyarakat lokal mampu beradaptasi dengan budaya wisatawan yang cukup berbeda (*tourist culture*).
4. Secara ekonomis menguntungkan, artinya keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Munculnya konsep pembangunan berkelanjutan menandai menyatunya pembangunan ekonomi dan lingkungan, dimana dinyatakan secara resmi pada tahun 1972 dalam Konferensi mengenai Manusia dan Lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan ini kemudian mulai diterima secara luas oleh berbagai kalangan dan mulai memberi inspirasi bagi pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, termasuk pariwisata. Untuk menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan dalam dunia pariwisata, beberapa usaha nyata telah dilakukan, misalnya; tersusunnya indikator dari pembangunan pariwisata berkelanjutan yang dikembangkan WTO, akreditasi yang dikembangkan oleh *Green Globe* dan *Australian Nature and Ecotourism Accreditation Program.*

Kemudian oleh Burns dan Holder (1997) konsep pembangunan berkelanjutan diadaptasikan untuk bidang pariwisata sebagai suatu model yang mengintegrasikan lingkungan fisik, lingkungan budaya

(*host community*), dan wisatawan (*visitor*). Dalam mencapai pembangunan wisata yang berkelanjutan, kemudian Suwena (2010) mengkontruksikan ketiga aspek tersebut melalui tujuh prinsip, yaitu :

1. Lingkungan mempunyai nilai intrinsik yang hakiki, berguna bagi lingkungan sendiri selain punya nilai guna bagi manuisa untuk berbagai kentingan termasuk unutk jasa wisata. Nilai guna yang sekarang (*use value*) harus meliputi konservasi dan proteksi lingkungan untuk kepentingan masa mendatang. Konservasi dan proteksi ini semakin penting pada sektor wisata alam.
2. Pariwisata haruslah dirancang untuk berbagai kegiatan yang positif dalam arti dapat menciptakan keuntungan masyakarakat dan wisatawan itu sendiri sekaligus bagi konservasi dan proteksi lingkungan.
3. Pariwisata dan lingkungan memiliki hubungan bahwa kegiatan pariwisata tidak boleh merusak sumber daya alam sehingga lingkungan tersebut dapat Agar pariwisata bisa mencapai berkelanjutan, maka harus dapat dirancang untuk menghindari kemungkinan overexploitatvi terhadap SDAL. Dengan demikian SDAL dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang, tanpa mewariskan kerusakan.
4. Kegiatan pariwisata dan kegiatan pembangunan harus mempedulikan terhadap kapasitas daya dukung SDAL agar kedua kegiatan tersebut tidak antagonis untuk dilakukan secara bersisian dan bersamaan.
5. Harus dibangun harmoni dan keserasian antara kebutuhan wisatawan, lokasi kegiatan, dan kebutuhan masyarakat. Dengan begitu dapat dihindasri situasi yang *zerro sum game* dimana manfaat yang diporoleh dari kegiatan wisata harus lebih besxar dari pada biaya rekrostruksi kerusakan SDAL dan biaya kompensasai yang harus dipikul oleh publik dan masyarakat setempat.
6. Dunia yang cenderung dinamis dan penuh dengan adanya berbagai perubahan selalu memberi keuntungan. Adaptasi terhadap berbagai perubahan dunia tidak boleh bertenatanga dengan setiap prinsip tersebut di atas.

7. Harus dibangun sinergi antara pelaku dalam industri pariwisata, pemerintah dan kelompok LSM pengampu hak asasi komponen biaotik dan komponen abiotik sehingga ketiga unsur *governance* tersebut dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat manusia sekaligus viabilitas ekologis melalui pemenuhan terhadap hak asiasi tumnbuhan untuk tetap berkembang, hak asai sungai untuk tetap jernih, hak asasi bukit untuk tidak digusur dsb.

4.3.4 *Ekowisata Global*

Aktivitas pariwisata berkembang antara lain karena adanya gerakan manusia dalam mencari keragaman siatuasi yang tidak monoton, melepas kejemuhan, kepenatan, keluar dari rutinitas dll sehingga dapat mebangkitkan daya ciptanya kembali. Oleh karena itu, pariwisata sering digolongkan sebagai kegiatan rekreasi. Kegiatan menjelajahi wilayah yang baru, mencari perubahan atau kergaman lingkungan yang membawa suasana baru seringkali bisa didapatkan melalui perjalanan ke tempat-tempat yang baru pula. Karena itu pariwisata kini telah menjadi salah satu industri besar di dunia, menggerakkan hampir seleuruh sektor perekonomian dunia sekaligus menjadi andalan utama dalam menghasilkan devisa di berbagai negara. Negara-negara dan teritori, seperti Thailand, Singapore, Filipina, Fiji, Maladewa, Hawaii, Tonga, Galapagos, Barbados, Kepulauan Karibia, dan sebagainya, sangat tergantung pada devisa yang didapatkan dari kedatangan wisatawan.

Pada beberapa negara di Kepulauan Karibia, pariwisata merupakan penyumbang terbesar dalam penciptaan pendapatan masyarakat dan negara. Pada tahun 2001 yang lalu di kawasan ini pariwisata telah menciptakan 2,5 lapangan kerja atau menyerap sekitar 25% tenaga kerja (Monsen, 2004). Peranan pariwisata dalam pembangunan di tiap negara pada garis besarnya berintikan Pada intinya peranan pariwisata meberikan kontribusi pada kesejahteraan melalui tiga kepentingaan. pertama perekonomi utamanya penciptaan lapangan pekerjaan sumber devisa, pajak-pajak. Ke dua aspek sosial utamannya penyerap tenaga kerja, menurunkan angka pengangguran. Dari aspek kebudayaan antara lain dapat

memperkenalkan budaya kita kepada wisatawan-wisatawan mancanegara.

Ekowisata merupakan suatu konsep pariwisata yang mencerminkan wawasan lingkungan dan mengikuti kaidah-kaidah keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Menurut masyarakat ekowisata internasional atau *The International Ecotourism Society* (TIES), ekowisata merupakan perjalanan wisata alam yang bertanggung jawab dengan cara melakukan konservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (TIES, 2000). Dari pengertian ini ekowisata dapat dilihat dari tiga perspektif, yakni pertama ekowisata sebagai produk; kedua, ekowisata sebagai pasar; dan ketiga, ekowisata sebagai pendekatan pengembangan. Sebagai produk, ekowisata merupakan semua atraksi yang berbasis pada sumber daya alam. Sebagai pasar, ekowisata merupakan perjalanan yang diarahkan pada upaya-upaya pelestarian lingkungan dan sebagai pendekatan pengembangan, ekowisata merupakan metode pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pariwisata secara ramah lingkungan (Arida, 2009).

Wood (2002) mendefinisikan bahwa ekowisata merupakan kegiatan wisata bertanggungjawab yang berbasis utama pada kegiatan wisata alam, dengan mengikutsertakan pula sebagian kegiatan wisata pedesaan dan wisata budaya. Kemudian Fennel (1999) mendefinisikan ekowisata sebagai wisata berbasis alam yang berkelanjutan dengan fokus pengalaman dan pendidikan tentang alam, di kelola dengan sistem pengelolaan tertentu dan memberi dampak negatif paling rendah pada lingkungan serta tidak bersifat konsumtif dan berorientasi lokal.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, ekowisata dapat dilihat dari tiga perspektif, yakni:

1. Ekowisata sebagai produk jasa, yang artinya ekowisata merupakan semua atraksi yang berbasis pada sumber alam.
2. Ekowisata sebagai institusi pasar, artinya ekowisata merupakan perjalanan yang di arahkan pada upaya-upaya lingkungan.
3. Ekowisata sebagai pendekatan bagi pelestarian alam dalam pembangunan, yang artinya ekowisata dapat dijadikan sebagai

metode pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Ada 8 prinsip utama yang harus dijadikan pegangan dalam pengembangan ekowisata, yaitu :

1. Memiliki fokus area natural (*natural area focus*) yang memungkinkan wisatawan untuk menikmati alam secara personal serta langsung.
2. Menyediakan interpretasi atau jasa pendidikan yang memberikan peluang kepada wisatawan untuk menikmati alam sehingga mereka menjadi lebih mengerti, lebih mampu mengapresiasi serta lebih menikmati.
3. Kegiatan terbaik yang dapat dilakukan dalam rangka keberlanjutan secara ekologis.
4. Memberikan kontribusi terhadap konservasi alam dan warisan budaya.
5. Memberikan kontribusi secara kontinyu terhadap masyarakat lokal.
6. Menghargai serta peka terhadap nilai-nilai budaya yang ada di wilayah tersebut.
7. Secara konsisten memenuhi harapan konsumen.
8. Dipasarkan serta dipromosikan dengan jujur serta akurat sehingga kenyataanya sesuai dengan harapan.

BAB V
PENGEMBANGAN JASA EKOWISATA: STRATEGI MENGELAK KUTUKAN SDA

5.1 Fenomena Kutukan SDA

Sebagai produk kegiatan perekonomian fase tersier *alla* Rostow (Hayami dan Godo, 2006) jasa ekowisata dapat dirancang menjadi aktivitas perekonomian masyarakat dengan produktivitas yang sangat tinggi dan memberikan efek penggada pendapatan yang besar (Karyatun dkk, 2022). Artinya sebagai aktivitas perekonomian yang menggunakan atau eksploitasi sumberdaya alam lingkungan (SDAL) produk jasa ini dapat dirancang untuk menghasilkan rente perekonomian (*economic rent*) yang sangat tinggi per satuan unit sumberdaya seperti USD per ha/tahun.

Aktivitas eksploitasi jasa ekowisata tidak pernah lepas dari kebutuhan penggunaan aktivitas *outdoor* yang berarti harus selalu menggunakan areal lahan dengan luasan tertentu. Tidak seperti aktivitas pertambangan ataupun pertanian intensif yang dampak lingkungannya umumnya relatif besar dan meluas sebarannya, aktivitas untuk ekowisata tidak memerlukan luasan lahan yang rekstensif, sehingga dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkanya pun relatif mudah dikendalikan. Kegiatan ekowista dengan hanya menggunaskan unit lahan yang relatif sempit saja misalnya dalam untuk satu hari atau satu bulan, maka akan dapat dihasilkan dollar yang jauh lebih banyak dari pada untuk kegiatan pertanian, perikanan, kehutanan ataupun lainnya.

Perumpamaan yang ekstrim, misalnya bandingkan satu bidang lahan jika digunakan untuk aktivitas restoran, maka rente ekonomi per m^2 per bulan atau per tahun akan jauh lebih besar dari pada untuk budidaya pertanian atau pun untuk perikanan, apalagi untuk aktivitas kehutanan. Perbandingan ini juga dapat mejelaskan mengapa deforestasi akan terus berlangsung ketika suatu negera berkembang belum berhasil menjadi negara industri (Austin dkk, 2019; Kustanto, 2021; Gaveau, 2022), yang berarti masih banyak bergantung pada penggunaan lahan yang masih relatif luas atau ekstensif tersebut.

Berkaitan dengan kebutuhan akan luasan lahan yang relatif sempit (tidak perlu ekstensif) ini, maka dapat diharapkan sektor wisata khususnya ekowisata dapat dijadikan katup pengaman bagi maraknya pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja seperti di masa pademik Covid (Gaveau dkk, 2022) belakangan ini. Espektasi ini makin besar peluang untuk diwujudkan berkiatan pula dengan biaya investasi yang jauh lebih murah dari pada untuk pengembangan sektor-sektor lain selain ekowisata seperti dilaporkan oleh Akuino (2018). Tidak ada satu kegiatan manusia pun yang dapat memproduksi dan menghasilkan lahan. Karena itu sumberdaya lahan sebagai faktor produksi dalam perekonomian senantiasa digolongkan sebagai semberdaya alam (*natural resources*). Jika pengembangan sektor jasa ekowisata yang dapat menampung banyak tenaga kerja ini dapat digalakkan, maka kebergantungan pada luasan lahan bagi aktivitas perekonomian suatu wilayah atau pun negara dapat direduksi. Dengan kata lain, upaya untuk eksit dari perangkap kutukan SDA yang berpangkal dari kebutuhan sumberdaya lahan, juga punya harapan untuk dapat diwujudkan (Rahma dkk, 2021).

Kosa kata kutukan sumberdaya alam ini merupakan kosa kata yang menjelaskan ketika suatu SDA melimpah, yang diperoleh secara cuma-cuma (*resource endowment*) seperti bahan tambang, hasil hutan, tangkapan ikan di laut dan danau dan SDA lainnya, maka akan memicu perilaku boros dan cenderung menghambur-hamburkan SDA tersebut. Fenomena ini pada awalnya diamati di Belanda. Pada akhir Perang Dunia II, perekonomian Negara Belanda telah berhasil mencapai fase atau sistem perekonomian negara

bercorak industri manufakturing. Kemudian pada awal tahun 1946 ditemukan tambang gas alam di Laut Utara Belanda. Penemuan SDA tersebut telah mendorong sebagian besar masyarakat Belanda beralih matapencahariannya dari sebagai pekerja industri manufaktur menjadi pekerja tambang karena dapat memberikan upah yang jauh beberapa kali lipat lebih tinggi (Hayami dan Godo, 2006).

Tingkat upah yang tinggi di sektor pertambangan tersebut dimungkinkan karena sumberdaya alam ini diperoleh secara cuma-cuma dengan secara seketika pula dan juga tanpa memerlukan investasi besar yang berjangka waktu lama. Pemberian upah tenaga kerja yang tinggi ini juga merupakan wujud dari pemborosan sumberdaya keuangan yang diperoleh dari SDA tersebut. Tingginya peningkatan pendapatan yang terjadi secara mendadak ini juga memicu perilaku boros. Perilaku boros tersebut terjadi karena tidak punya cukup waktu untuk pembelajaran mengubah sikap ke arah pola hidup berhemat (*parsimonious*) ataupun bersahaja atau *frugality* (Hayami dan Godo, 2006).

Akibat maraknya para pekerja yang pindah ke aktivitas sektor pertambangan, maka kinerja industri manufaktur di Belanda waktu itu mengalami kontrakasi yang besar. Neraca perdagangan (*balance trade*) Belanda yang semula mengalami surplus karena ditopang oleh sektor industri manufaktur yang sangat efisien, kemudian mengalami defisit sangat besar yang dipicu oleh impor barang-barang hasil-hasil industri manufaktur yang diproduksi oleh negara-negara lain terutama dari Jerman, Inggris, dan Perancis. Akibatnya mata uang Belanda (*Gulden*) jatuh, yang membuat Belanda mengalami resesi berat. Oleh karena itu fenomena kutukan sumberdaya alam ini kemudian menjadi lebih populer dengan sebutan Penyakit Belanda atau *Dutch Disease* (Hayami dan Godo, 2006).

Dalam konteks tersingkirnya sektor indutri dan jasa-jasa dalam perangkap kutukan SDA tersebut, maka di dalam masyarakat terjadi pelemahan kinerja *entreprenuerialship* pula (Hayami dan Godo, 2006). Kondisi ini tidak dapat menstimulasi timbulnya insentif bagi masyarakat untuk melakukan usaha dan berinvestasi. Masyarakat lebih cenderung untuk mengambil segala sumberdaya

yang tersedia. Bukan hanya itu, bahkan banyak anggota masyarakat yang lebih memilih untuk melakukan *rent seeeking* dan tidak menghargai *property right* (Hameed, 2020). Untuk menghidari fenomena ini Maimo dan Achuo (2022) menekankan pentingnya penguatan investasi publik untuk pemberdayaan SDM, maupun untuk pengembangan pengelolaan fianansial (Ridena dkk, 2021).

5.2 Beberapa Negara yang Terperangkap Kutukn SDA

Beberapa fenomena kutukan SDA juga banyak diamati di hampir semua wilayah atau negara yang memiliki kelimpahan SDA termasuk Indonesia. Beberapa negara yang mengalami fenomena kutukan sumberdaya alam ini umumnya berada di khawasan tropika basah terutama sekali dengan kelimpahan sumberdaya berupa tambang mineral, minyak, gas bumi, maupun hasil hutan kayu. Secara ringkas pada Tabel 5.1 disajikan beberapa negara yang mengalami kutukan sumberdaya sehingga menjadi negara terbelakang atau sulit untuk beranjak menjadi negara industri yang dicirikan oleh tertekannya perkembangan dan kinerja *entreprenurialship*-nya.

Tabel 5.1. Empat negara kaya SDA dengan kinerja kewirausahaannya 2019*

No.	Jenis SDA Utama	Negara	Indeks Entreprenurship	PDB/Kapita per tahun (USD)
1.	Tambang permata	Serria Lione	131	515,93
2.	Minyak bumi dan hasil hutan kayu	Nigeria	92	2.085,03
3.	Minyak bumi dan hasil hutan kayu	Ghana	91	2.445,29
4.	Minyak bumi, batubara dan hasil hutan kayu	Indonesia	75	4.291,81

Sumber: Acs, dkk (2020)
Catatan: *dari 137 negara.

Ketika penghargaan *property right* tidak berkembang maka akan diikuti dengan berbagai kerusakan moral serta yang berujung pada keadaan kerusakan lingkungan maupun kerusakan tatanan

kehidupan bersama lainnya. Pada Tabel 5.2 disajikan dampak perluasan kerusakan lingkungan hingga ke berbagai sendi kehidupan yang dipicu oleh adanya kutukan sumberdaya alam khususnya kelimpahan energi mineral (Leonard, 2021).

Tabel 5.2. Dampak *resource curse* dan resiko negatif yang berkaitan dengan energi baru dan terbarukan (EBT)

No.	Gejala *Resource Curse*	No.	Dampak Negatifnya bagi Pengembangan EBT
1.	Kriminalitas	1.	Kejahatan boom-town, pencurian peralatan
2.	Kerusakan flora, fauna, dan lanskap lokal	2.	Kerusakan habitat, tekanan pada sumber daya yang langka (misalnya air).
3.	Pengalian investasi ke selain SDM	3.	Tenaga kerja yang kurang terampil, keragaman aktivitas perekonomi yang buruk, pendidikan yang rendah
4.	Pengalihan peruntukan lahan	4.	Kerawanan pangan
5.	Penyimpangan penggunaan lahan	5.	Internal brain-drain
6.	Kebergantungan secara ekonomi	6.	Ketergantungan pad pengaruh, hingga investasi tidak menguntungkan penduduk.
7.	Tanaga ahli didominasi pekerja asing	7.	Ketimpangan pendapatan.
8.	Konflik secara eksternal	8.	Menahan EBT sebagai senjata geopolitik, sulit untuk memberikan sanksi kepada eksportir EBT
9.	Ketimpangan gender	9.	Wanita tidak disarankan untuk memasuki pekerjaan EBT.
10.	Ketimpangan level pendapatan	10.	Disparitas antara pemilik EBT dan pekerja yang diupah.
11.	Volilitas pendapatan & defisit *balance trade*	11.	Pemotongan program sosial secara tiba-tiba, eksploitasi.
12.	Konflik internal	12.	Konflik tanah, kerusuhan politik dan sipil
13.	Penyerobotan lahan	13.	Perampasan tanah pedesaan untuk pertanian, EBT, pemindahan penduduk miskin.
14.	Hilang daya kompetisi ekspor	14.	Ekspor lebih mahal, impor lebih murah, industri lokal tergeser
15.	Kbergantung pada barang impor	15.	Pemerasan, sulit untuk memberikan sanksi kepada negara pensuplai
16.	Reduksi keragaman aktivitas perekonomian	16.	Pasca-booming ekonomi dengan keragaman rendah.
17.	Kenbergantung teknologi fan keahlian	17.	Pemerasan, pengurangan otonomi, kebijakan konten lokal memperburuk lainnya gejala
18.	Pelemahan institusi	18.	Merduksi investasi dan menurunkan kinerja demokrasi

Sumber: Leonard dkk (2021).

5.3 Strategi Mengelak Kutukan SDA: Pembelajaran dari Provinsi Bali

Jasa ekowisata sebagai bagian atau subsektor wisata dapat dikembangkan sebagai lompatan transformasi struktural perekonomian dari negara yang berbasiskan eksploitasi SDAL menjadi negara penghasil produk jasa tanpa melalui tahapan menjadi wilayah atau negara berbasis agroindustri dan industri manufaktur terlebih dahulu. Fenomena lompatan transformasi corak perekonomian ini dapat diartikan sebagai ingkaran atau argumen untuk menggugat Teori Rostow (Jednak dkk, 2014) dalam menjelaskan pembangunan berkesinambungan. Dalam konteks ini Provinsi Bali dapat dihadirkan sebagai contoh baik (*best practice*) seperti buktikan oleh Zulkarnain dan Ulfah (2021).

Keberhasilan Provinsi Bali dapat menjadikan pembelajaran yang sangat berharga untuk pengembangan strategi pengelolaan ekowisata sebagai sektor untuk mengelak kutukan SDAL. Provinsi Bali tidak mempunyai sumberdaya tambang, kecuali bahan galian golong C yang nilai ekonominya jauh di bawah tambang batu bara, minyak bumi, berbagai jenis logam. Demikian pula dengan SDA yang berasal dari hasil hutan kayu. Karena miskin SDA, di dalam kalangan masyarakat di Provinsi Bali telah menempatkan hak kepemilikan (*property right*) sebagai hak dasar yang sangat dihargai dan ditaati oleh hampir setiap individu. Dengan begitu jumlah dan frekuensi penyerobotan terhadap hak kepemilikan sangat jarang terjadi. Relatif rendahnya kriminalitas semacam ini ditopang oleh nilai-nilai agama yang dianut sehingga tatanan kelembagaan yang berkembang dari jaman nenek moyang mereka tetap relatif kuat dan lentur (*resilience*) yang menurut Chong (2020) terhadap beradaptasi terhadap berbagai perubahan yang berasal dari intrusi budaya moderen.

Salah satu bukti kelenturan tata nilai dan rekognisi budaya (Peters, 2019) tersebut adalah tentang sikapnya dalam menempatkan *property right* tentang sebagai pengakuan *interest* bagi fihak lain khususnya dalam kepentingan pemanfataan sumberdaya air secara bersama (*common pool resource*) seperti yang dipraktekan dalam sistem Subak. Sebagai suatu tatanan kelembagaan tradisional, lembaga subak terbukti lentur dalam menghadapi berbagai macam

perubahan, baik oleh adanya perubahan variabel teknologi, ekonomi, politik, maupun perubahan budaya itu sendiri. Sekalipun secara internal maupun eksternal daerah lain termasuk budaya moderen hingga budaya RI 4.0 dewasa ini, kelembagaan Subak tetap dipatuhi dan dijunjung tinggi. Artinya kelembagaan pemanfaatan sumberdaya air yang bersifat koletif ini tetap bertahan dan berkelanjutan secara berabad-abad dari nenek moyang hingga kini. Menurut Bakri (2022) institusi Subak telah berkembang menjadi kelembagaan tradisional yang formal. Dalam institusi Subak kini tetap menggunakan tata aturan adat secara tertulis tetapi untuk menegakkan tata ataurannya tetap menggunakan hukum-hukum adat, tidak menggunakan tata aturan hukum positif sehingga tidak memaksa sengketa penggunan sumberdaya air untuk dibawa ke pengadilan, melainkan dengan musyawarah. Dengan begitu pula hukum adat dalam kelembagaan Subak tetap terpilihara hingga kini tanpa merusak sosial kapital yang terakumulasi sejak lama (Vipriyanti, 2007).

Kerena kahat dalam hal SDA khususnya berupa tambang maupun hasil hutan, masyarakat Bali telah menjadikan sistem perkonomian yang berkembang dari awal berupa pertanian intensif khususnya dalam budidaya padi sawah, dengan sistem pengairan yang dikontrol lembaga subak tersebut, surplus perekonomian Provinsi Bali mulai berkembang ke perekonomian jasa wisata. Bukti nyata tatanan kelembagaan dalam subak sebagai bagian tatanan kultural yang dilandasi oleh nilai-nilai religiusitas setempat tersebut juga mengikat para warga masyarakat yang sebagaian besar berbasis pendapatan dari sektor pertanian padi sawah itu ternyata juga tumbuh dan berkembang perilaku pemelihara lingkungan dalam masyarakat Bali.

Berkaitan dengan penerapan kultur teknis padi sawah yang dilandasi kelembgaan subak tersebut, maka tinjaun keadaan fisik bentang lahan yang dominan di P Bali perlu untuk dipahami. Secara geomorfologi P Bali terbentang mulai dari dataran pantai, dataran rendah, perbukitan, sampai pegunungan dengan puncak tertingg 1.414 m dari permukaan air laut yaitu pada posisi G Agung. Seperti dapat diperiksa pada Gambar 5.1, dominan dataran pantai dan dataran rendah berada di Bagian Selatan dengann sebagian kecil di

Bagian Utara. Dengan begitu sebagian besar merupakan perbukitan dan dataran tinggi atau malah berupa pegunungan. Dalam kondisi seperti itu banyak terbentuk daerah alirangan sungai (*watershed*) dengan arah aliran utama sungai-sungainya mengikuti pola paralel yang sebagian besar mengikuti arah Utara-Selatan. Dengan begitu bentang lahan makro P Bali tampak pola sangat tertoreh (*very dissected*).

Gambar 5.1 Gemorfologi P Bali (https://dangetscreative.portfoliobox.net/shop-5/bali-topographic-map-6

Dengan pola geomorfik seperti itu, secara fisik dapat menjadikan bentang lahan (*landscape*) P Bali terbentuk teras-teras sawah mulai dari dataran pantai sampai perbukitan dan pegungungan. Teras-teras sawah tersebut dapat terbentuk juga karena secara sosial-budaya diukung oleh perkembangan kelembagaan subak yang terbukti lentur terhadap berbagai perubahan tersebut. Dengan begitu keindahan bentang lahan berupa teras-teras sawah ini juga diselingi oleh terbetuknya hutan hujan tropis melalui suksesi vegetasi ribuan tahun terutama pada wilayah perbukitan dan pegunungan sebagai hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi yang kini menjadi Taman nasioanl Bali Barat (Gambar 5.2).

Karena berupa hutan lindung dan hutan konservasi, maka eksploitasi hasil hutan kayu dan nir kayu dapat ditekan, yang sekaligus juga menekan terjadi sikap *resource curse* masyarakat berupa rendahnya tingkat perambahan hutan. Dengan begitu sumberdaya hutan yang ada ini tetap menjadi sumber plasma nutfah sekaligus sebagai sumber resapan air yang menopang keberlanjutan budidaya padi sawah dengan yang sangat memikat wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Berbagai sungai-sungai dan danau juga menambah keelokan bentang alam yang sangat indah. Bukan hanya itu, kultur budaya yang berinterferensi positif dengan nilai-nilai relegiusitas telah membangun keramahan-tamahan (*hospitality*) masyarakat di P Bali (Asyina, 2021). Keelokan obyek ekowisata seperti ini menjadi dtermanin utama untuk menarik wisatawan apalagi bagi wisman baik ekowisata bahari maupun ekowisata hutan (Nurhaida dk, 2022; Bakri dkk, 2022a). Daya tarik ini akan saling menguatkan kepuasan pengunjunga yang dilandasi oleh tingkat *hospitality* para penyedia jasa, yang pada akhirnya dapat menstimulasi untuk melakukan kunjungan ulang (Bakri dkk, 2022b).

Gambar 5.2. Assosiasi dataran tinggi dengan teras-teras sawah. https://en.wikipedia.org/wiki/Subak_(irrigation)#/media/File:Jatiluwih_rice_terraces.jpg

Pada Gambar 5.3 disajikan ekspresi dari fenomena interferensi nilai-nilai religiusitas dan kultur budidaya pada sawah.

Gambar 5.3. Fenomena interferensi nilai-nilai religiusitas dan kultur budidaya pada sawah yang ditopang Lembaga Subak. (https://regional.kompas.com/image/2020/06/29/19485861/mengenal-filosofi-dan-nilai-budaya-subak-yang-jadi-primadona-turis-di-bali?)

Bukan hanya keramah-tamahan, perkembangan nilai-nilai budaya atau kultural yang sangat kuat dan terpelihara di lingkungan masyarakat adat Bali juga telah mengikat tiap individu untuk berlaku jujur, adil, dan respek kepada orang di luar kelomppoknya. Kekuatan sosial kapital seperti ini (Vipriyanti, 2007; Astina 2020) juga telah membangun *trust* orang di luar kelompoknya (bahkan orang asing) yang makin kuat. Dengan begitu kontrol sosial terhadap kepemilikan (*property right*) juga sangat kuat dan dihargai sehingga konflik kempilikan beserta tingkat kriminalitas juga menjadi relatif rendah. Provinsi Bali sampai kini merupakan wilayah dengan tingkat kriminalitas terendah ke dua setelah Riau. (https://destinasian.co.id/provinsi-paling-aman-di-indonesia dikases 16 Oktober, 2022).

Latar belakang kelangkaan sumberdaya warisan (*resource endowment*) seperti tambang dan minim produksi hasil kayu dari hutan alam, telah menyebabkan masyarakat Bali telah berabad-abad harus mengandalkan pada usaha budidaya pertanian terutama padi

sawah. Dengan melakukan budidaya ini, tidak mengekstrak secara gratis dari alam, telah menjadikan masyarakat Bali sangat menghargai kepemilikan (*property right*) seperti ditunjukkan oleh rendahnya kriminalitas tadi yang sejatinya juga merupakan refleksi dari telah berkembanganya *trust* yang kuat (Bakri, 2022). Dengan bentang alam buatan dominan berupa teras-teras sawah (yang telah diasuh melalui sistem subak) diselang-seling bentang alam asli berupa hutan hujan tropis, sungai-sungai dan danau-danau tersebut Provinsi Bali kini berhasil menjadi masyarakat yang telah bertransisi menjadi penyedia jasa wisata yang dibangkitkan oleh kenyamanan ekologisnya atau ekowisata. Dengan loncatan ke corak perekonomian sektor jasa ini berarti Provinsi Bali tidak mengalami jebakan kutukan SDA.

Lebih dari itu sektor wisata di Provinsi Bali juga mampu menggerakan perekonomian wilayah lain. Zulkarnain dan Ulfah (2021) menunjukkan bahwa struktur pendapatan masyarakat Provinsi Bali didominasi 42.08% dari jasa wisata disusul perdagangan 10.24%, pertanian 9.63%, konstruksi 8.36%, industri pengolahan 6.12% dan sisanya 23.57% adalah sektor-sektor lainnya. Sejalan dengan itu, menurut Rahma dkk (2021), tidak seperti Provinsi Kaltim yang indeks kebergantungnya terhadap sumberdaya alam (terutama tambang) sangat besar, Provinsi Bali tidak mengalami *resource curse* karena telah berhasil bertransformasi menjadi wilayah penghasil jasa khususnya jasa wisata. Bukan hanya itu Provinsi Bali juga telah menjadi penggerak berkembangnya *demand* terhadap provinsi lain. Zaulkarnain dan Ulfah (2021) membuktikan itu. Selanjutnya, bahwa *shock* permintaan akhir di Provinsi Bali berdampak besar terhadap perekonomian provinsi-provinsi di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur. Di sisi lain, perekonomian Bali sangat dipengaruhi oleh *shock* permintaan akhir di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Fenomena ini menunjukan bahwa sektor wisata dapat menjadi pengganda pendapatan dan sekaligus mempengaruhi wilayah provinsi lain yang dikenal memberikan eksternalitas positif bagi daerah lain.

BAB VI
SIMPULAN DAN SARAN UNTUK MENGELAK KUTUKAN SUMBERDAYA ALAM

Dalam bab terakhir ini perlu disajikan esensi dari seluruh pemikiran dan fakta-fakta empiris yang telah diseneraikan mulai dari Bab 1 sampai Bab 5. Bab terakhir ini dimaksud agar para pembaca buku ini memperoleh pemahaman secara koprehensif. Lebih dari itu yang terpenting lagi agar dapat memantik imajinasi lebih lanjut tentang gagasan riset ke depan termasuk untuk melakukan kajian ilmiah, maupun merancang penerapannya dalam pengembangan pengelolan jasa lingkungan yang lebih luas dari jasa ekowisata. Idealnya juga dapat merancang penerapan dalam pengelolaan jasa wisata sampai di level tapak. Untuk kepentingan itu, maka disajikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi berupa 2 sub-bab berikut ini.

6.1 Simpulan

Dari sisi permintaan (*demand*) terhadap jasa ekowisata, sebagai subsektor jasa wisata dengan tumpuan utama pada pendayagunaan SDAL merupakan aktivitas konsumsi level mewah. Artinya konsumen utamanya merupakan kalangan yang telah melampaui kesejahteraan di atas level subsisten, sudah mencapai satu atau beberapa level di atas garis kemiskinan, atau telah berkecukupan bahkan berkelebihan. Dengan kata lain, hanya masyarakat yang mempunyai surplus pendapatan saja yang mampu "membeli" dan mengkonsumsi produk jasa ini. Berjaitan dengan itu,

kelompok masyarakat ini di sisi lain dipastikan akan menuntut standar layanan dan sangat tinggi yang berarti sensitif pada kualitas layanan.

Tuntutan pasar jasa ekowisata seperrti ini hanya dapat dipenuhi oleh penyedia jasa (*suplier*) yang khusus, dalam arti mengikuti standar layanan sesuai dengan selera konsumen alias selera pasar. Jika tidak, maka dikhawatirkan jasa wisata yang disediakan sulit bahkan tidak bisa berkembang sekalipun potensi SDAL yang ada sangat eksotif secara kasat mata. Sebaliknya jika penyedia jasa ekowisata ini dapat dibina atau dibangun (*empowering*) maka sangat mungkin menjadi penyedia jasa yang berkualitas tinggi sekalipun mungkin SDAL yang kasat mata tidak terlalu unggul. Dampak lanjutannya atas peningkatan kualitas layanan adalah pada maraknya kunjungan ataupun kunjungan ulang. Dampak lebih lanjut, adalah kemampuan untuk membangkitkan efek pengganda (*multplier effect*) pendapatan melalui mekanisme peningkatan aktivitas berbagai sektor hulu maupun sektor hilir, yang berarti dapat menciptakan pendapatan masyarakat, dan sekaligus meningkatkan pedapatan pemerintah melalui berbagai bentuk pajak dan pungutan.

Selain itu mengingat obyek ekowista umumnya berada di perdesaan, maka maraknya kunjungan wisata juga dapat mendistribusikan pemerataan pendapatan antara pusat terhadap daerah. Bila mekanisme ini terus dikuatkan maka akan dapat mereduksi tekanan terhadap SDA yang akhirnya dapat dipergunakan sebagai strategi untuk eskit dan agar terlepas dari perangkap kutukan SDAL terutama untuk wilayah-wilayah yang hingga kini masih sangat menggantungkan pembangunannya pada kelimpahan SDA mineral yang tak terpulihkan seperti Kalimantan Timur, Riau, dan NAD dll.

6.2 Pengembangan Strategi Mengelak Kutuan SDA: Suatu Saran

Selain kesimpulan, satu bagian lagi yang penting sebagai penutup buku ini adalah pengajuann saran dan rekomendasi. Saran dalam buku ini ditujunkan kepada para penelitian yang berkaitan dengan pengembangan khasanah keilmuan terutama bidang wisata

ataupun ekowisata. Sedangkan rekomendasi ditujukan untuk para praktisi terutama para perancang kebijakan publik yang berkaitan dengan pengembangan ekowisata atau pun para penasehatnya.

Dalam kaitannya dengan kebutuhan akan data dasar sebagai landasan pengembangan ekowisata di level wilayah ataupun di level tapak, maka saran-saran untuk melaksanakan penelitian yang realitis untuk diajukan khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan data dasar untuk melakukan pengembangan ekowisata yang meliputi 3 level pengembangan:

(1) Pada level nasional perlu kajian wilayah yang beresiko akan terperangkap dalam situasi kutukan sumberdaya disertai dengan skenario pengembangan keunggulan kolaborotif ekowisata dan sektor-sektor yang terkait disertai dengan analisis keterkaiatan spasial maupun kebijakan makro ekonomi antarprovinsi. Penggunaan metode untuk mendeteksi adanya proses transformasi struktural menurut spasial corak perekonomian akan sangat membantu untuk mengarahkan pada penghindaran terhadap jebakan kutukan SDA. Penggunaan teori grafitasi, teori-teori lokasi, dan model-model turunannya (seperti *Shift-Share Analysis*, *Location Question*, dan *Input-output Interegional Analysis*) merupakan piranti yang handal untuk merancang pengurangan kebergantungan SDA dengan mengarahkan pada pengembangan ekowisata yang potensial. Hasil utama dari kajian di level ini perlu disajikan dalam skala rekonesan dilengkapi peta-peta dengan level detil pada skala 1 : 250.000 atau lebih besar yang menggambarkan rekomendasi kajian lebih mendalam pada level subnasional.

(2) Pada level subnasional (provinsi atau kabupaten/kota) yaitu penelitian untuk merancang strategi pengembangan potensi obyek-obyek lokal bagi pengembangan potensial bagi ekowisata dilengkapi dengan peningkatan eksternalitas positif dari obyek-obyek ekowisata di wilayah kabupaten/kota sekitarnya. Pada dasarnya penelitian level ini merupakan penelitian yang lebih detil yang difokuskan untuk obyek-obyek ekowisata yang mempunyai potensi terbaik menurut yang

disarankan dari hasil penelitian level nasional. Artinya penggunaan teori grafitasi, teori-teori lokasi, dan model-model turunannya perlu diterapkan untuk menganalisis keterkaitan antarkabupaten atau antarkota yang berdekatan. Hasil penelitian perlu dilengkapi peta-peta dengan level detil minimal skala 1: 50.000. Selain itu hasil penelitian ini juga perlu dilengkapi dengan keunggulan lokal yang kompetitif khususnya untuk penguatan ekonomi kreatif yang berbasis budaya lokal yang potensial untuk menarik calon wisata terutama wisman.

(3) Pada level tapak perlu dilakukan penelitian untuk: (a) penguatan daya tarik obyek-obyek wisata yang telah beroperasi selama ini, dan (b) pengembangan calon-calon obyek ekowisata potensial menurut hasil penelitian level kabupaten/kota, (c) merancang pengembangan inovasi lokal berbasis variabel sosial-kultural bagi industri kreatif yang potensial akan menjadi preferensi wisatawan terutama wisman, dan (d) merancang pemberdayaan UMKM yang beroperasi di lokasi wisata bagi peningkatan kualitas layanan para penyedia jasa wisata (*tourism service provider*) terutama untuk peningatan perilaku keramah-tamahannya (*their hospitality*) termasuk para pedangang kaki lima, tukang parkir, penjaga keamanan, penjual eceran (termasuk makanan, minuman, dan *souveneer*), restoran pelayan hotel dll.

Saran-saran ini merupakan suatu metode atau strategi untuk menghindarkan suatu wilayah akan terperangkap dalam situasi kutukan sumberdaya (*resorce curse*) melalui pengembangan jasa wisata terutama segmen ekowisata. Apabila strategi diterapkan maka diyakini program-program pemberdayaan masyarakat di sektor penyedia jasa wisata akan dapat menjadi motor penggerak peningkatan kunjungan wisata, membangkitkan industri rumah tangga (*home industry*), meningkatkan kinerja kewirausahaan (*entrepreurship*), meningkatkan penciptaan lapangan kerja, mereduksi pengangguran, mendongkrak pendapatan masayarakat, meningkatkan PAD ataupun penerimaan pajak daerah, dan

meningkatnya surplus tabungan untuk menggerakan investasi lokal dan menarik investasi asing.

Bila skenario berlangsung secara berkelanjutan, maka lebih lanjut secara agregat juga akan menstimulasi pertumbuhan aktivitas perekonomian sektor hulu dan hilir serta mentransformasi corak perekonomian wilayah ke arah sektor industri dan jasa khususnya jasa wisata, yang menjadikan eksploitasi SDAL secara fisik akan tereduksi secara nyata. Artinya bahwa masyarakat di wilayah tersebut akan terhindar dari perangkap kutuan SDAL. Dengan begitu berartri pula bahwa pembebasan individu dan sekaligus juga pembebasan masyarakat dari berbagai belenggu keterbelakangan dapat diwujudkan seperti yang dimaksudkan oleh Amartya Sen (Gasper dan Staveren, 2003).

DAFTAR PUSTAKA

Ács, Z.J., L. Szerb, E. Lafuente and G. Márkus. 2020. *Global Entreprenur Index* 2019. https://www.researchgate.net/figure/1-The-Global-Entrepreneurship-Index-Rank-of-All-Countries-2019_tbl1_338547954

Acs Z. and D. Storey. 2004. Introduction: Entrepreneurship and economic development. *Regional Studies*, 38: 871-877.

Agarwal R., D.B. Audretsch and M.B Sarkar. 2007. The process of creative construction: Knowledge spillovers, entrepreneurship, and economic growth. *Strategic Entrepreneurship Journal*, 1: 263-286.

Aji, C. I., Hasbi, M. Z.N., Salekhah, F., dan Ami, M. 2021. Implementasi analitycal networking process (anp) distribusi zakat terhadap pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan. *Jurnal Tabarru : Islamic Banking and Finance*. 4(1):195-208.

Anggraeni, A. 2016. Analisis yuridis pengrusakan hutan (deforestasi) dan degradasi hutan terhadap lingkungan. *Jurnal Jurisprudentie*. 3(1):33-41.

Akuino, A. 2018. Analisis penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata (sektor perdagangan, hotel dan restoran) di Kota Batu. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(02):153-167.

Arliman S, L. 2018. Eksistensi hukum lingkungan dalam membangun lingkungan sehat di indonesia. *Jurnal Lex Librum*. 5(1):761-770.

Arianto, Z. dan Wirasenjaya. 2017. *Upaya Pemerintah Joko Widodo Guna Mendorong Implementasi Sustainable Development Goals di Indonesia*. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyahh Yogyakarta.

Arida, N.S 2009. *Meretas Jalan Ekowisata Bali (Proses Pengembangan, Parisipasi Lokal dan Tantangan Ekowisata di Tiga Desa Kuno Bali)*. Denpasar. Universitas Udayana.

Asker, S., L. Boronyak, N. Carrard, and M. Paddon, 2010. *Effective community based tourism: A best practice manual. Institute for Sustainable Futures*. University of Technology Sydney. Sydney

Astina, M.A. 2021. The valaue of local wisdom on hotel employment in Badung Regency. *Journal of Business on Hospitality and Tourism.* Vol.7(3):293-303. Https://dx.doi.org/10.22334/jbhost.v713.

Austin, K.G., A. Schwantes, Y. Gu, dan P. S. Kasibhatla. 2019. What causes deforestation in Indonesia? *Environment Research Letter*, Vol 14(2):1-10. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aaf6db.

Bakri, S., M. P. Utami, A. F. Ashaf, A. Windah, dan H. Purnaweni. 2022a. *Prediction model of eco-tourism visitor interest to Pahawang Island, Lampung Province, Indonesia.* Paper diseminrakan dalam IAPA 2022 Annual Int. Conference & The 3rd IntL. Indonesia Conference on Interdisciplinary Studies (IICIS): transformation and Agile Governance, Business and Society in Contemporary World. Bandar Lampung, October, 28th, 2022.

Bakri, S. A.P. Apriliani, A. F. Ashaf, D. Despa, S. H. Sitorus, M. P. Utami, N. Nurhasanah, H. Purnaweni, dan C. Danisari. 2022b. Satisfaction as the basis for enhancing intension repeated visitor through empowering the hospitality of service provider: Study at 3 ecotourism objects at pringsewu regency_Lampung Province. *International Journal of Advance and Innovative Research Volume* 9, Issue 3 (VIII):24-30.

Bakri, S., Raya, A.,Y. Indriani, dan J. F. Suwandi. 2018. Toddler's immunity against dengue hemorraghic fever based on sex and age: the role of environment and family's habitual variables. *Proceeding of the 3rd SHIELD International Conference*: 190-210. *Bandar Lampung. https://3rdshieldproceeding.uprci.org*

Bakri. 2012. Fungsi intrinsik hutan dan faktor endogenik pertumbuhan ekonomi sebagai determinan pembangunan wilayah Provinsi Lampung. *Disertasi*,IPB. Bogor.

Bakri, S., D. Darusman, B. Juanda, dan Bahruni. 2014. Pengembangan wilayah di bawah kendala sumnberdaya. Jurnal Sosio Ekonomika,18(2):161-170.

BAPPENAS. 2020. *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)*. Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Burn, P and A. Holder. 1997. *Tourism : A New Perspective*. Prestice Hall International Hampstead.

Chong, D.K.L. 2020. The side effects of mass tourism: The voices of Bali islanders. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*. Vol.25(2):157-169. DOI:10.1080/10941665.2019.1683591.

Demartoto, A. 2009. *Pembangunan Pariwisata berbasis Masyarakat*. Penerbit Sebelas Maret University Press.

Deng, T. and M. Ma. 2014. Resource curse in tourism economies? An investigation of China's world cultural and natural heritage sites. Vol. 19, No. 7, 809–822, http://dx.doi.org/10.1080/10941665.2013.806943.

Eastwood, R., M. Lipton and A. Newell. 2010. Farm size. *In* Pingali, P. L. and R. E. Evenson, eds., *Handbook of Agricultural Economics*. North Holland: Elsevier.

Fardan, M. 2015. Mengawal sustainable development goals(SDGs): Meluruskan orientasi pembangunan yang berkeadilan. *Sosioreligius*, 1(1)

Fennell, D. A. 1999. *Ecotourism: An Introduction*. London, Routledge.

Fritsch, M. 2008. How does new business formation affect regional development? *Small Business Economics*. 30(1): 1-14.

Galagamage, P. 2021. *Development: An Introduction*. Social Policy and Social Development. DOI:10.13140/RG.2.2.26388.63361.

Gasper, D. R. dan I.P. van Staveren. 2003. Development as freedom - and as what else? *Feminist Economics*.Vol. 9(2-3):137-161. doi.org/10.1080/1354570032000078663.

Gaveau, D. L. A., B. Locatelli, M. A. Salim, Husnayaen, T. Manurung, A. Descals, A. Angelsen, E. Meijaard, D. Sheil. 2022. Slowing deforestation in Indonesia follows declining oil palm expansion and lower oil prices.

PLoS ONE 17(3): e0266178. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266178.

Hameed, S. 2020. Political economy of rentierism in the Middle East and disruptions from the digital space. *Contemporary Review of the Middle East*. Vol. 7(1): 54–89. https://doi.org/10.1177/2347798919889782.

Hastuty, G., D. W.S.R Wardani, C. Wulandari dan, S. Bakri. 2019. Peran hutan mangrove dalam ekosistem perairan terestris sebagai pengendali penyakit demam berdarah dengue (DBD) di bawah skenario pemanasan global. *Prosiding Seminar Nasional Hari Air Dunia 2019 Palembang 21 Maret 2019*. Pascasarjana Usri.

Hayami, Y. dan Y. Godo. 2006. *Economics Development: From Poverty to Wealthy Nation*. 3rd Ed. Oxford University Press.

Hayami, Y. 2001. *Economics Development: From Poverty to Wealthy Nation*. 2rd Ed. Oxford University Press.

Hien, T. 2010. Three essay on determinat, strategic, behavior and formation of entreprenuership in Vietnam. *Ph.D Dissertation*. University of Trento, CIFREM.

IMF. 2022. *Climate Change and Chronic Food Insecurity in Sub-Saharan Africa*. African and Research Department.

Indro, P. N. 2013. Kemiskinan Global Dalam Prespektif'Development as Freedom'Amartya Sen Kasus: Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. 9(1):23-34.

Ishartono dan S.T. Raharjo. 2016. Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan. *Social Work Jurnal*, 6(2): 154-272.

Issundari, S., dan M.Y. Yani. 2021. Implementasi pembangunan berkelanjutan dalam mengatasi kemiskinan melalui kerja sama

internasional daerah. *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan.* 13(1):103-122.

Jednak, S., D. M. Nikolic, D. Kragulj dan M.Vujosevic. 2014. Economic activities structure and development: Evidence from Serbia. *Management Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies.* Vol. 19(71):29-38 DOI: 10.7595/management.fon.2014.0012

Karyatun S., K. Wiweka, R. H. Demolingo, P. P. Adnyana, I. Nurfikriyani. 2022. Tourist village multiplier effect studies: Small scale approach best practice of Desa Wisata Nglanggeran, Yogyakarta, Indonesia. *International Journal of Management, Innovation & Entrepreneurial Research*, Vol.6(2):139-153 https://doi.org/10.18510/ijmier.2020.6213.

Kustanto, A. 2021. Does Trade Openness Cause Deforestation? A Case Study from Indonesia *Jurnal Ekonomi Pembangunan.* Vol.19 (2): 165-182.

Leonard, A. , A. Ahsan, F. Charbonnier, and S. Hirmer. 2021. The resource curse in renewable energy: A framework for risk assessment. *Energy Strategy Reviews*, 41(2):100841-100856. https://doi.org/10.1016/j.esr.2022.100841.

Lipton, M. 1977. *Why Poor People Stay Poor*: A *Study of Urban Bias in World Development*. Temple-Smith, London.

Luthfi, W. 2021. Perjalanan Program SDGs di Indonesia, Apa Saja Pencapaiannya? *https://www.goodnewsfromindonesia.*

McDonald, R. 2006. Sustainable development as freedom, International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 13:6, 445-447, DOI: 10.1080/13504500609469693

Meadows, D. H., D.L. Meadows, J. Randes, dan W.W. Behrens. 1972. *The Limits to Growth.* Universe Books, New York.

Miamo, C.W. dan E. D. Achuo. 2022. Can the resource curse be avoided? An empirical examination of the nexus between crude oil price and economic growth. *SN Business Economiocs.* Vol.2(5):1-23. https://doi.org/10.1007/s43546-021-00179-x.

Mukti, A.D, S. Bakri, Lindrianasari dan A, Setiawan. 2019. Penggunaan faktor sosial demografi dan sikap kepedulian pada lingkungan sebagai landasan dalam pengembangan jiwa entrepreneurship: Studi di wilayah Sub Urban Bandar Lampung. *Prosiding Seminar Biology* 4, *Tema* Isu-Isu Strategis Sains, Lingkungan, dan Inovasi Pembelajarannya. Universitas Muhamadiyah, Surakata, pp.314-322.

Murphy, P. E. 2013. Community driven tourism planning. *Tourism Management Journal*. 9(2), 96–104.

Ida Nurhaida, I., S. H. Sitorus, S. Bakri, D. Despa[4], dan N.Nurhasanah. 2022. Attraction as the basis of planning for post covid-19 tourism visit recovery: study on the Way Kambas National Park eco-tourism area, Lampung Province. Paper diseminrakan dalam IAPA 2022 Annual Int. Conference & The 3rd Int. Indonesia Conference on Interdisciplinary Studies (IICIS): transformation and Agile Governance, Business and Society in Contemporary World. Bandar Lampung, October, 28th, 2022.

Nuryanti, Wiendu, 1993. Concept, Perspective and Challenges, makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

OECD. 2000. *Learning Regions and Cities*: *Knowledge*, *Learning and Regional Innovation Systems*. Paris: Organization for Economic Cooperation and Development.

Pelita, A. , J. F. Suwandi , S. Bakri dan M. Riniarti. 2019. Peranan ekosistem perairan terestrial terhadap insidensi penyakit malaria: Studi di Provinsi Lampung. *Prosiding Seminar Nasional Hari Air Dunia 2019 Palembang 21 Maret 2019*. Pascasarjana Usri.

Panuluh, M.R dan R. Fitri. 2016. Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. *Briefing Paper*.

Peters, B.G. 2019. *Institutional Theory in Political Science: The Institutionalism.* 4th Edition. Elward Edgar Publishing. Northampton US & Cheltenham UK.

Rahma, H., A. Fauzib, B. Juanda, dan B. Widjojanto. 2021. Fenomena natural resource curse dalam pembangunan wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. Vol. 21 (2): 148–163.

Ramly, N. 2007. *Pariwisata Berwawasan Lingkungan, Belajar dari Kawasan Wisata Ancol.* Penerbit Granfindo Khazanah Ilmu. Jakarta

Saputri, D. E., S. Bakri, dan R. Zuraida. 2015. Peranan sistem repong damar terhadap pendapatan, asupan makan dan status gizi balita: studi kasus di Desa Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. *Jurnal Sylva Lestari*. Vol. 3(1):63-70.

Saptutyaningsih, E. 2007. Dampak perubahan pengeluaran wisatawan terhadap pendapatan rumah tangga di indonesia, (Pendekatan struktual path analysis (spa) dalam sbse Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 8 (1): 1 – 18.

Setiawan, H. 2022. Paradox of plenty challenges in regional dveleopment in Aceh after two decades of special autonomy. *Journal of Government Study*, Vol. 2(1): 1-16. https://doi.org/10.53013/bestuurskendu.2.1.1-16.

Stimson, R. J. dan R. R. Stough. 2008. Changing approach to economics development: Focus on Endogenous Factors. *Working Paper*, Financial Development and Regional Economics, Regional Science Association International and Banco Central de la Republica Argentino.

Suansri, Potjana. 2003. *Community Based Tourism Handbook*. REST Project United Press TIES.Thailand.

Syaputra, A. D. 2016. Peranan LAZISMU dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat D.I. Yogyakarta. *Journal of Islamic Economics Lariba.* 2(2):49-56.

Sriyani, A. K. Berawi, S. bakri, dan H. kaskoyo. 2020. Development of prediction model for toodler diarrhea based on maternal care, characteristict of toodler, demogaphy and sanitation. *International Journal of Progresive Science and Technology*. Vol. 23(2):354-365.

Trihano. 2015. *Pembangunan Berkelanjutan*. Penerbit CV. Sagung Seto. Jakarta.

Uysal H.T., S. Aydemir, dan E. Gence. 2018. Chapter 23 *Maslow's hierarchy of needs in the 21st century: The examination of vocational differences. Researches On Science And Art In 21st Century Turkey 211.*

World Tourism Organization. 2020. *Tourism Trends*. United Nation. Madrid.

Yekti, R. 2020. *SDGs (Sustainable Development Goals) dan 1000 Hari Pertama Kehidupan*. Fakultas Kedokteran, Univeristas Kristen Indonesia. Jakarta.

Yuningsih, A. 2007. Peran dan komitmen Indonesia dalam "*Millenium Development Goals*": Perspektif humas internasional. *Jurnal Media Tor*. 81(2):257-270.

Van Praag C. M., J. S.Cramer, dan J. Hartrog. 2002. Low-risk aversion encourages the choice for entrepreneurship: An empirical test of a truism. *Journal of Economic Behavior and Organization* 48:29-36.

Villalobos, M.C. R., J.osué G. G.Martínez and R.O. M. Camarena. 2018. Economies of scale and minimization of the cost: evidence from a manufacturing company. *Journal of Eastern Europe Research in Business and Economics*, Vol. 2019{1-16. DOI: 10.5171/2018. 128823. http://ibimapublishing.com/articles/JEERBE/2018/12882.

Vipriyanti, N.U. 2007. Studi sosial ekonomi tentang keterkaitan antara modal sosial dan pembangunan ekonomi wilayah: Studi kasus di empat kabupaten di Provinsi Bali. *Disertasi* IPB, Bogor.

Zulkarnain, R. and N. Ulfah. 2021. The linkages of Bali Economy. *Prosiding Seminar Offical Statistics. 2021.* DOI: https://doi.org/10.341c3/semnasoffstat.v2021i1.845.

BIOGRAFI PENULIS

Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si., Lahir di Kediri 05 Mei 1961, kini adalah dosen profesional di Program Studi S1 dan S2 Kehutanan dan Program Studi S2 dan S3 Ilmu Lingkungan Universitas Lampung. Lulus S1 dan S2 dari Program Studi Ilmu Tanah IPB tahun 1986 dan 1999, serta lulus S3 dari Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD) IPB tahun 2012. Selain memegang sertifikasi dosen, peneliti ini juga memegang; [1] Sertifikat Kompetensi Khusus dalam Bidang Perencanaan Hutan dan [2] Sertifikat Kompetensi Khusus Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan di Wilayah Kesatuan Pengelolan Hutan (KPH) yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Kehutanan (LSP P3) yang berlisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Peneliti ini pernah menjadi Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Lampung pada periode 2012 sampai 2016 dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan sejak 2016 sampai sekarang. Banyak melakukan penelitian pembangunan kawasan perdesaan dan kehutanan. Berbagai penelitiannya telah dipublikasikan dalam jurnal nasional, jurnal internasional serta dalam bentuk buku.

Dr. Abdul Firman Ashaf, S.I.P., M.Si. Lahir di Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, 11 November 1972. Kini adalah dosen di Program S1 dan S2 Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung. Menyelesaikan S1 Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIPOL Universitas Gadjah Mada (1997), S2 Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, Bandung (2004), serta S3 Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, Bandung (2010). Menulis beberapa buku, antara lain: *Jurnalis Perempuan dan Aktivisme Media* (2009), *Media, Teks, dan Budaya* (2018), dan *Sejarah Bredel 1994* (2020). Menginisiasi sejumlah riset, antara lain: Hegemoni dan Resistensi Pers Islam pada Era Orde Baru (2005); Media Islam dan Formasi Gerakan Islam di Indonesia (2017); Media Lokal dalam Politik Elektoral (2019); Media Penyiaran dalam Politik Lokal di Provinsi Lampung (2021)

Dr. Eng. Ir Dikpride Despa, S.T., M.T. IPM, ASEAN Eng. Doctor of Engineering (DR. Eng) dari Kyushu Instititute of Technogy Jepang, lahir di Pariaman tanggal 28 April 1972. Saat ini sebagai Ketua Program Profesi Insinyur Universitas Lampung (Unila). Sebagai Dosen tersertifikasi pada bidang Teknik Elektro yang memilikii sertifikasi Kompotensi Ahli (SKA) Madya Sistem Distribusi, SKA Maya bidang Elektronika dan Komunikasi Gedung serta SKA Madya K3 bidang Konstruksi, aktif pada berbagai kegiatan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta berbagai pekerjaan professional dibidang Keteknikan, khususnya bidang Teknik Elektro dan Informatika. Member IEEE, Persatuan Insinyur Indonesia (PII) yang terigistrasi sebagai Insinyur Profesional Madya (IPM) serta ASEAN Engineering. Selain aktif sebagai Narasumber, Assesor Kompetensi dan Reviewer, juga aktif menulis berbagai artikel ilmiah yang dipublikasikasikan pada tingkat Nasional maupun Internasional. Berbagai penghargaan dan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) serta Paten juga telah diperoleh sepanjang karir mengabdi sebagai Dosen, Peneliti dan Insinyur Profesional.

Siti Herawati Sitorus, S.Hut. Peneliti lahir di Bandar Lampung, 14 Maret 1998. Tahun 2016 menjadi mahasiswa Jurusan Kehutanan Fakultas, Pertanian Universitas Lampung melalui SBMPTN. Menjadi mahasiswa PS Magister Ilmu Lingkungan, dengan Beasiswa PNBP Universitas Lampung (Unila). Pernah menjadi presenter pada [1] Conference IAPA 2022 annual international conference & IICIS dengan tema "Digital Transformation and Agile Goverment, Business and Society in Contemporary Word" [2] Seminar Nasional Ilmu Lingkungan (SnaIL) 2022 dengan tema "Kontribusi pendekatan multidisiplin dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim". Pernah menjadi penulis paper IAPA prossiding terindeks WoS dengan judul [3] Attraction as the Basis of Planning for Post Covid-19 Tourism Visit Recovery: Study of the Way Kambas National Park Eco-tourism Area, Lampung Province. Artikel yang telah dipublikasikan [4] Strategi pengelolaan hutan rakyat Pinang Jaya Kemiling dengan analisis SWOT [5] Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan hutan rakyat Pinang Jaya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. Pernah menjadi penulis berita bersama team di Lampungpost.co [6] Urgensinya pembangunan TPA baru akibat overloadnya TPA Bakung mencemari lingkungan sekitar. Pernah menjadi ketua pelaksana kuliah umum [7] Mata kuliah Analisis Kebijakan dan Kelembagaan dengan tema "Status dan perkembangan kebijakan lingkungan hidup dalam mendukung kelestarian perusahaan di Indonesia" [8] Mata kuliah Agroforestri dan kinerja lingkungan degan tema "Pentingnya agroforstri dalam kelestarian hutan". Pernah menjadi Asisten dosen [9] Mata kuliah Manajemen hutan dan Pembangunan kehutanan.

Mia Putri Utami, S.T. Peneliti dilahirkan di Bandar Lampung pada hari Selasa 19 Oktober 1999. Tahun 2017 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan lulus pada tahun 2021. Selama menjadi mahasiswa Teknik Pertanian peneliti aktif mengikuti organisasi Persatuan Mahasiswa Teknik Pertanian (PERMATEP) sebagai Bendahara Bidang Keprofesian pada periode 2018/2019. Menjadi asisten dosen pada mata kuliah Mekanisasi Pertanian pada semester genap 2019/2020. Tahun 2021 peneliti tercatat sebagai mahasiswa PS Magister Ilmu Lingkungan, dengan Beasiswa PNBP Universitas Lampung (Unila). Pernah menjadi presenter pada [1] Conference IAPA 2022 annual international conference & IICIS dengan tema "Digital Transformation and Agile Goverment, Business and Society in Contemporary Word" [2] Seminar Nasional Ilmu Lingkungan (SnaIL) 2022 dengan tema "Kontribusi pendekatan multidisiplin dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim". Pernah menjadi penulis paper IAPA prossiding terindeks WoS dengan judul [3] Prediction Model Of Eco-Tourism Visitor Interest to Pahawang Island, Lampung Province, Indonesia. Pernah menjadi sekertaris pelaksana kuliah umum Mata kuliah Analisis kebijakan dan kelembagaan dengan tema "Status dan perkembangan kebijakan lingkungan hidup dalam mendukung kelestarian perusahaan di Indonesia". Asisten dosen Mata kuliah Manajemen hutan dan Pembangunan kehutanan.

Adella Putri Apriliani, S.Hut. Peneliti dilahirkan di Menggala, Kabupaten Tulang Bawang 16 April 1999, S1 di Program Studi Kehutanan, Universitas Lampung melalui beasiswa jalur Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP) lulus tahun 2022. Tercatat sebagai mahasiswa PS Magister Ilmu Lingkungan, dengan Beasiswa PNBP Universitas Lampung (Unila). Menjadi Narasumber Pelatihan Analisis Statistik SEM (*Structural Equation Modelling*) mahasiswa S3 Doktor Ilmu Lingkungan, S2 Magister, dan S1 Kehutanan di Unila Pernah menjadi Presenter pada [1] Conference di India dengan tema The ^{8}*th International Multidisciplinary Electronic Conference on "National Education Policy 2020: Focus on Learning and Student-Centered Education System (Issues & Challenges)" on September 24, 2022, dan* [2] Konferensi Nasional "Inovasi Teknologi Silvikultur dalam Upaya Percepatan Pembangunan Hutan Indonesia". Artikel yang telah dipublikasi [1] Analisis Hubungan Modal Sosial dan Tingkat Pendapatan Agroforestri Petani Kelompok Hutan Kemasyarakatan Di KPHL Batutegi" dalam *Journal of People, Forest and Environtment*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2021, dan [2] *Satisfaction as the Basis for Enhancing Intension Repeated Visitor through Empowering the Hospitality of Service Provider: Study at 3 Ecotourism Objects at Pringsewu Regency_Lampung Province* dalam Proceeding of The ^{8}*th International Multidisciplinary Electronic Conference on "National Education Policy 2020: Focus on Learning and Student-Centered Education System (Issues & Challenges)*. Pernah menjadi Asisten dosen Pengelolaan Jasa Lingkungan, Asisten Dosen Manajemen Hutan, dan Asisten Dosen Perencanaan Kehutanan, dan peneliti aktif sebagai *research assistant* baik dibidang kehutanan maupun lingkungan.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kebaruan Ide dan Prospek Penerapannya

Dalam awal bab ini penting untuk dibahas terlebih dahulu mengenai fokus masalah utama bagi perencanaan pembangunan wilayah agar kesejahteraan masyarakatnya tidak tertinggal sebagaimana yang umum terjadi di berbagai negera berkembang. Seperti dapat dirujuk dalam (Stimson dan Stough, 2008) bahwa sepanjang peradaban, telah sering terjadi paradoks bahwa banyak wilayah atau negara yang kaya sumberdaya alam (SDA) ternyata malah banyak mengalami keterbelakangan, dilanda kemiskinan dan malnutrisi, seperti dapat dirujuk dalam karya Acs dkk (2020) dan Leonard (2021) yaitu Serria Lione, Nauru, Ghana, Nigeria dan beberapa lainnya. Sebaliknya, banyak pula wilayah ataupun negara yang kahat (*shortage*) akan SDA malah makmur dan sejahtera (Stimson dan Stough, 2008; Bakri dkk, 2014) seperti Singapura, Jepang, Korea Selatan dan masih banyak lainnya. Lebih dari satu dasawarsa yang lalu para peneliti ini menunjukkan bahwa adanya kelinpahan SDA di suatu wilayah telah menekan kreativitas maupun karakter kewirausahaan (*entrepenurship*) masayarakat dan telah membuat semakin banyak menggantungkan penghidupannya pada SDA yang ada. Fenomena yang paradoksal tersebut pada umumnya terjadi karena masyarakatnya menghargai terlalu rendah (*undervalued*) terhadap SDA yang melimpah yang dimiliki secara cuma-cuma tanpa banyak jerih payah, tanpa banyak berusaha.